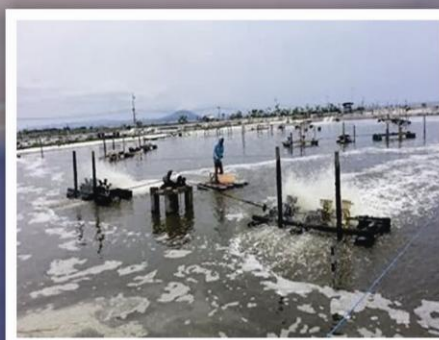
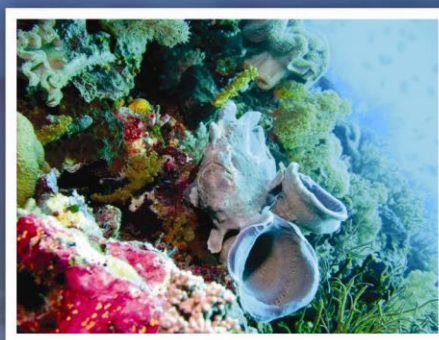




LAPORAN TAHUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN 2015



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

JALAN BAJIMINASA NO. 12, TELP 0411 - 873680, FAX 0411-858779

Website : www.dkp.sulselprov.go.id

MAKASSAR

2016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 dapat tersusun. Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan gambaran dan informasi sejumlah pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan diselama tahun 2015.

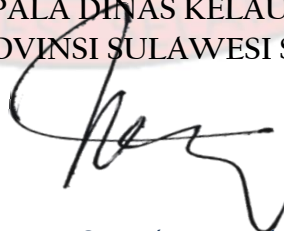
Secara umum program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015 telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai sasaran. Hal ini menjadi modal dasar untuk lebih mengembangkan pembangunan Kelautan dan Perikanan ditahun 2016 dan masa mendatang.

Disadari bahwa tercapainya tujuan pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tidak terlepas dari hasil kerjasama yang baik dan terpadu antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan stakeholder lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Akhirnya kepada semua pihak dan instansi yang telah membantu terbitnya Buku Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 diucapkan terima kasih.

Makassar,

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. I S K A N D A R

Pangkat : Pembina Utama Madya
N I P : 19560716 197910 1 003

I. RINGKASAN

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota Makassar terletak antara 0°12' - 8° LS dan diantara 116°48' - 112° 36' BT dengan luas wilayah sekitar 45.764,53 Km², panjang garis pantai 1.937 Km yang terdiri dari 24 kabupaten/kota, 304 kecamatan.

Jumlah Penduduk Sulawesi Selatan tahun 2015 tercatat sebanyak 8.520.304 jiwa atau meningkat 1,04 % dari tahun 2014. Diantara jumlah penduduk tersebut terdapat tenaga kerja yang mengelola sumberdaya Kelautan dan Perikanan (nelayan, pembudidaya, Pengolahan dan Pemasaran dan Petani Garam) sebanyak 792.654 jiwa. Komposisi tenaga kerja sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat jumlah nelayan sebanyak 136.274 orang atau 17,2 %, pembudidaya sebanyak 292.823 orang atau 36,9 %, Pengolahan dan pemasar sebanyak 380.223 orang atau 47,9% dan petani garam sebanyak 4.768 orang atau 0,6 %.

Untuk mengorganisasi pelaksanaan kegiatan pembangunan baik non teknis maupun teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, diperlukan staf yang cukup dan memiliki integritas yang handal. Pada tahun 2015 di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan memiliki staf pegawai negeri sipil sebanyak 206 orang.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tetap mengacu pada Program Revitalisasi Perikanan yang tujuannya diarahkan untuk mempercepat peningkatan produktivitas dan produksi serta kualitas hasil perikanan sehingga dapat memberi kontribusi yang sebesar-besarnya guna menanggulangi permasalahan nasional, yaitu pengurangan kemiskinan (*propoor*), peningkatan tenaga kerja (*projob*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*progrowth*).

Pelaksanaan masing-masing sub program dibiayai melalui dana Dekonsentrasi (APBN) sebesar Rp. 14.418.310.000, APBD sebesar Rp. 57.364.337.664 Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 5.339.780.000 dan Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp. 6.001.700.000

Hasil pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan selama tahun 2015 tercatat total produksi sebesar 3.786.834,5 ton, sedangkan pada tahun 2014 produksi perikanan sebesar 3.377.689,6 ton dimana mengalami peningkatan sebesar 409.144,9 ton atau 12,1 %. Pada tahun 2015 total volume ekspor

sebesar 139.601,9 ton naik 2,8 % dari tahun 2014 dan nilai sebesar US \$ 244,7 juta turun 17,5 % dari tahun 2014.

Sejalan dengan peningkatan produktivitas usaha, maka tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan pada berbagai usaha sebagai berikut: Nelayan Laut Rp. 31.339.663, Pembudidaya Tambak Rp. 22.989.700, Pembudidaya Rumput Laut *Eucheuma cottonii* Rp. 22.292.553, Pembudidaya KJA Laut Rp. 16.816.667, Nelayan Perairan Umum Rp. 14.897.265, Pembudidaya kolam Rp. 13.691.078, Pembudidaya KJA Air tawar Rp. 8.868.694, Pembudidaya Sawah Rp. 8.632.558.

Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun masyarakat Sulawesi Selatan tahun 2015 tercatat sebanyak 49,7 kg/kapita/tahun (naik 6,2%).

Penyediaan/Rehabilitasi prasarana produksi perikanan budidaya ditambah dimaksudkan untuk meningkatkan atau mempercepat pemasukan air pada saat terjadi pasang dan juga sebagai media penampung air yang akan masuk ketambak sehingga kualitas air yang akan masuk dapat menjamin kehidupan ikan, udang maupun rumput laut yang dibudidayakan.

Sarana budidaya lainnya yaitu Balai Benih Ikan (BBI) dibangun/direhabilitasi di beberapa daerah yang memiliki potensi sumber air yang cukup. Sehubungan dengan pelaksanaan prasarana dan sarana Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka tingkat pelayanan juga semakin baik, pelayanan yang dimaksudkan meliputi kemudahan untuk mendapatkan sarana produksi (benih ikan, calon induk ikan mas/nila dan bibit rumput laut), teknologi, informasi pasar dan harga, penggunaan sarana untuk bongkar dan muat ikan hasil tangkapan, air bersih, solar dan kemudahan untuk ekspor.

Sekaitan dengan pelayanan baik dalam memanfaatkan asset pemerintah maupun bentuk jasa yang dilakukan, maka dengan mengacu pada perda-perda yang ada, besarnya pendapatan asli daerah sektor Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat Rp. 2.531.220.412,- (84,4%) dari target Rp. 3.000.000.000.-

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 I. PENDAHULUAN.....	 1
II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN.....	3
2.1. Keadaan Geografis	3
2.2. Demografi	3
2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan	4
a. Perikanan Tangkap	4
b. Perikanan Budidaya	4
c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan.....	5
d. Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan.....	5
e. Pengujian Mutu Hasil Perikanan.....	6
f. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap.....	8
g. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar.....	9
h. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan pantai.....	10
III. ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN.....	 13
3.1. Struktur Organisasi.....	13
3.2. Kepegawaian.....	15
3.3. Aset Pemerintah	17
3.4. Keuangan.....	17
a. Belanja Aparatur	17
b. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DI SULAWESI SELATAN	 19
4.1. Tujuan dan Sasaran	19
a. Tujuan.....	19
b. Sasaran.....	19
4.2. Kebijakan dan Program Strategis	20
a. Kebijakan Strategis	20
b. Program Strategis	21
4.3. Sumber Pembiayaan	24
4.3.1. Dana Dekonsentrasi	24
4.3.2. Dana Tugas Pembantuan	24

4.3.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)	24
4.3.4. Dana Daerah	25
a. Belanja Langsung	26
b. Belanja Tidak Langsung	26
4.4. Kegiatan Pembangunan	27
4.4.1. Perikanan Budidaya.....	27
a. Kegiatan Budidaya Laut dan Payau	27
b. Kegiatan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum.....	30
c. Kegiatan Sarana dan Prasarana Budidaya	34
4.4.2. Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41
a. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	41
b. Seksi Kelautan dan Konservasi.....	49
4.4.3. Pengawasan dan Pengendalian SDKP.....	63
a. Sarana dan Prasarana Pengawasan.....	63
b. Penataan dan Penegakan Hukum SDKP.....	69
c. Pengembangan SDM Pengawasan SDKP	85
4.4.4. Bina Usaha dan Kelembagaan.....	97
a. Pembinaan Mutu dan Pemasaran	97
b. Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan.....	103
c. Pembinaan Usaha.....	106
V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN	111
5.1. Ekonomi	111
5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.....	111
5.1.2. Produksi Perikanan.....	111
a. Budidaya	111
b. Penangkapan.....	114
5.1.3. Konsumsi Ikan	114
5.1.4. Pemasaran.....	114
5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya.....	115
5.1.6. Tenaga Kerja	115
5.2. Proyek dan Pembiayaan	115
5.2.1. Dekonsentrasi (APBN).....	115
5.2.2. Provinsi.....	116

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Target dan Realisasi Pengujian PPSKI Tahun 2015.....	6
2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	8
3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015	13
4. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014	14
5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014 dan 2015	15
6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2015.....	16
7. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Pendidikan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2015.....	16
8. Barang, Tanah/bangunan dan Lahan Usaha Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015.....	17
9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015	18
10. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2015.....	25
11. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Benur, Nener, Pakan Saponin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	27
12. Laporan Hasil Produksi Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang Vannamei) di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	28
13. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	28
14. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2015.....	31
15. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang Bersumber dari Dana APBN Tahun 2015.....	33
16. Pengendalian Distribusi OIKB DKP Provinsi Sulawesi Selatan.....	38
17. Daftar Nama-Nama Manajer Pengendali Mutu (MPM) pada Unit Perbenihan di Sulawesi Selatan.....	38
18. Daftar Unit Pembenihan yang Bersertifikat CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) Di Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	39

19. Hasil Monitoring dan Surveillance OIKB pada Distributor & Toko/Depo Obat Ikan – DKP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	40
20. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Takalar.....	64
21. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Bantaeng.....	65
22. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Bulukumba.....	65
23. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Pangkep.....	65
24. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kota Pare-Pare.....	65
25. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Barru Tahun 2015.....	66
26. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Bone Tahun 2015.....	67
27. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Selayar Tahun 2015.....	67
28. Kegiatan Pembinaan Produksi Bernilai Tambah Sumber Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015.....	98
29. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan Sumber Anggaran APBD Tahun 2015.....	99
30. Daftar Rekapitulasi Pengadaan melalui Jasa Pihak Ketiga Tugas Pembantuan Tahun 2015.....	102
31. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan Usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2014 – 2015.....	111
32. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Satuan Kerja Tahun 2015.....	116
33. Rincian Alokasi dan Tingkat Realisasi Belanja Publik Tahun 2015.....	116

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Peta Wilayah Penangkapan Udang, Tuna, dan Rumput Laut.....	119
2. Lokasi Pos Pengawasan SDKP Subsidi Pengembangan SDM Pengawasan KP Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	120
3. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan, Tahun 2015	121
4. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Usaha Pengumpulan, Penampung, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2015 Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014.....	122
5. Rekapitulasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2015 Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014.....	123
6. Rekapitulasi Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) Tahun 2015 Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014.....	124
7. Data Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	125
8. Produksi BBU/Hatchery di Sulawesi Selatan, Tahun 2015.....	126
9. Produksi Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) di Sul-Sel, Tahun 2015	138
10. Produksi BBI di Sulawesi Selatan, Tahun 2015	131
11. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Hasil Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, Tahun 2015	134
12. Rekapitulasi Volume Pengujian Tahun 2015.....	136
13. Rekapitulasi Jumlah Pokmaswas Aktif Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pokmaswas Sampai Dengan Desember 2015.....	137
14. Data SDM PPNS Perikanan yang Aktif dibidang Pengawasan SDKP Kab/Kota dan Provinsi Hasil Pembinaan Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan Perikanan tahun 2015.....	138
15. Produksi Benih dan Jumlah Induk pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payau La'joa Soppeng 2015.....	139
16. Data Produksi Pembenihan Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai tahun 2014.....	140
17. Daftar Unit Pengolahan Ikan/Udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.....	142
18. Data unit Pengolahan Ikan yang Memperoleh Sertifikat HACCP Tahun 2015.....	148

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah telah pula memberikan kewenangan otonomi bagi daerah untuk membangun dan mengembangkan daerahnya sendiri sesuai kebutuhan serta sumberdaya yang dimiliki demi kemakmuran rakyatnya.

Sejalan dengan Undang-Undang tersebut, maka Provinsi Sulawesi Selatan sebagai daerah otonomi telah membenahi diri untuk membangun daerahnya dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada diantaranya adalah sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

Paradigma pembangunan Kelautan dan Perikanan kedepan tetap diarahkan pada visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu “Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan dan Simpul Jejaring Akselarasi Kesejahteraan Masyarakat” sedangkam Misi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu “ 1) Meningkatkan Kualitas Kemakmuran Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, 2) Meningkatkan Kualitas Kelestarian Lingkungan, 3) Meningkatkan Daya Saing daerah dan Sinergitas Regional, Nasional dan Global, 4) Mengembangkan SDM Kelautan dan Perikanan serta Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih. Hal ini untuk mewujudkan tiga pilar pembangunan yaitu *Pro-Poor* (Pengentasan kemiskinan), *Pro-Job* (Penyerapan Tenaga Kerja), *Pro-Growth* (Pertumbuhan) dan *Pro-Sustainability* (Keberlanjutan), yang dalam pelaksanaannya perlu didukung dengan penciptaan iklim usaha yang mendorong investasi dibidang kelautan dan perikanan (*Pro-Business*).

Dalam rangka mengoptimalkan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan, maka dilaksanakan melalui pendekatan sektor kegiatan yang meliputi (1) Perikanan Budidaya, (2) Perikanan Tangkap, pesisir dan pulau-pulau kecil (3) Kelembagaan dan Usaha Perikanan, dan (4) Perlindungan, Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan.

Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus mendorong peningkatan pertumbuhan produksi dengan fokus pada peningkatan produksi perikanan budidaya, sementara pada pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diupayakan melalui pengembangan sarana dan prasarana teknologi penangkapan ikan

yang ramah lingkungan. Adapun Produksi Perikanan Sulawesi Selatan bersumber dari usaha perikanan penangkapan (Laut & Perairan Umum) dan usaha perikanan budidaya (Laut, Tambak, Kolam dan Sawah). Belum optimalnya pencapaian tingkat produktifitas usaha perikanan budidaya dan upaya penangkapan memberi dampak pada kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor perikanan secara keseluruhan. Pembangunan usaha Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan ke depan akan menjadi usaha perikanan yang berproduktivitas dan memiliki daya saing yang tinggi baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor. Upaya yang dilakukan diarahkan pada tiga ruang lingkup pengembangan yaitu optimalisasi dan pengembangan kegiatan produksi, peningkatan daya saing melalui penanganan dan pengolahan produk hasil perikanan, dan pengembangan mekanisme dan jaringan pemasaran. Dengan komitmen ini, pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan secara optimal akan mampu memberi kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan di Sulawesi Selatan dan Nasional.

Sejalan dengan Arah dan Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan tahun 2015 yaitu Peningkatan kelestarian dan penanganan dampak lingkungan dan Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing Daerah. Kegiatan usahanya meliputi budidaya rumput laut, pengolahan, penangkapan dan perbengkelan. Beberapa kegiatan di daerah yang juga mendukung usaha pemberdayaan tersebut seperti **Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, P2HP, dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)**. Peningkatan Kesempatan Kerja, pengembangan daya saing dan ekspor, Revitalisasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan, Pengembangan Wilayah Pesisir dan Kelautan, dan Akselerasi.

Pengamanan sumberdaya ikan akibat dari eksploitasi yang berlebihan dilakukan melalui perlindungan, pengendalian dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berencana dan berkelanjutan terutama di perairan pantai yang ditandai telah padat tangkap. Melalui cara tersebut diharapkan jaminan ketersediaan sumberdaya ikan dapat dipertahankan secara berkesinambungan guna mendukung pembangunan di daerah Sulawesi Selatan.

II. KEADAAN DAERAH SULAWESI SELATAN

2.1. Keadaan Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan beribukota di Makassar terletak antara $0^{\circ} 12' - 8'$ Lintang Selatan dan di antara $116^{\circ} 48' - 122^{\circ} 36'$ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sulawesi Barat

Sebelah Timur : Teluk Bone dan Prov. Sulawesi Tenggara

Sebelah Selatan : Laut Flores

Sebelah Barat : Selat Makassar

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan adalah $45.764,53 \text{ Km}^2$, secara administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 21 Kabupaten dan 3 kota yang terdiri dari 304 kecamatan. Kabupaten Luwu Utara merupakan kabupaten terluas dengan luas $7.502,68 \text{ Km}^2$ atau luas kabupaten tersebut merupakan 16,46 % dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan.

Jumlah sungai yang mengalir wilayah Sulawesi Selatan tercatat sekitar 67 sungai. Aliran sungai terbanyak terdapat di kabupaten Luwu, yaitu 25 aliran sungai. Sungai Saddang adalah sungai terpanjang yang mengalir meliputi Kabupaten Tator, Enrekang dan Pinrang. Panjang sungai tersebut masing-masing 150 Km.

Di Sulawesi Selatan terdapat 5 (lima) danau yakni Danau Tempe, Sidenreng dan Lapompak yang masing-masing berada di Kabupaten Wajo, Sidrap dan Soppeng serta Danau Matano dan Towuti di Kabupaten Luwu Timur.

2.2. Demografi

Jumlah penduduk Sulawesi Selatan tahun 2015 tercatat sebanyak 8.520.304 jiwa. Dari jumlah 804.161 jiwa yang terdiri dari 136.274 jiwa adalah nelayan, 292.823 jiwa adalah pembudidaya ikan, 370.296 jiwa adalah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan 4.768 jiwa adalah pembudidaya garam. Komposisi jumlah penduduk pada setiap Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.3. Prasarana dan Sarana Perikanan

a. Perikanan Tangkap

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah prasarana perikanan tangkap yang berfungsi untuk menunjang kegiatan bongkar muat hasil perikanan. Pada prasarana tersebut terdapat sarana penunjang yakni tempat pemasaran ikan, tempat kapal bersandar, perkantoran, gedung pertemuan dan tempat perbengkelan.

Di Sulawesi Selatan sampai tahun 2015 terdapat 20 unit PPI yang terdapat di 18 Kabupaten/kota yang masih sementara kondisinya rata-rata baik, namun pembangunan prasarana pelabuhan perikanan /pangkalan pendaratan ikan terus menerus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap nelayan, yang merupakan kelanjutan pemasaran hasil tangkapan dan distribusi untuk mendukung kegiatan agribisnis pada sektor kelautan dan perikanan.

b. Perikanan Budidaya

Prasarana utama pada kegiatan budidaya adalah saluran irigasi baik untuk irigasi tambak maupun irigasi kolam/Mina Padi (sawah). Selama ini Dinas Perikanan dan Kelautan baru menangani irigasi tambak sedangkan untuk irigasi kolam/Mina Padi (sawah) dilakukan oleh Dinas Pengairan.

b.1. Perbenihan Udang

Perbenihan udang terdiri dari ukuran skala besar (hatchery) dan skala kecil atau hatchery skala rumah tangga (HSRT). Di Sulawesi Selatan tahun 2015 terdapat 22 unit hatchery dan 69 unit HSRT yang aktif dengan total produksi per tahun sebesar 4.498.872.000 ekor benur udang dan bandeng, dengan rinciannya hatchery 3.386.058.000 Ekor dan HSRT 1.112.814.000 Ekor

b.2. Perbenihan Ikan

Perbenihan ikan yang dimaksud adalah ikan air tawar yang diproduksi oleh Balai Benih Ikan (BBI). Pada tahun 2015 BBI yang ada di daerah dikelola langsung oleh pemerintah daerah (PEMDA)/UPTD Kab/Kota dan swasta yang aktif berjumlah 35 unit Realisasi produksi BBI sebesar 36.975.000 ekor Adapun benih ikan yang diproduksi adalah ikan mas, nila, dan lele dengan ukuran 1 – 3 cm, 3 - 4 cm dan 5 – 7 cm.

c. Pengolahan dan Pengawetan Hasil Perikanan

Di Sulawesi Selatan ada dua jenis sarana pengolahan/pengawetan hasil perikanan yakni bersifat modern dan tradisional (konvensional), kedua jenis usaha tersebut memiliki segmen pasar yang hampir sama. Untuk pengolahan modern hampir sebagian besar dipasarkan ke luar negeri (ekspor), sedangkan yang konvensional pasarnya dalam negeri dan luar negeri.

Pengolahan modern meliputi produk segar (udang, ikan dan kepiting), beku (Udang, ikan, kepiting, paha kodok), kering (sirip ikan hiu, rumput laut, telur ikan terbang dan teripang), olahan (rumput laut dan kepiting), sedangkan tradisional meliputi produk asap (ikan), kering (cumi, ikan dan rumput laut), pindang (ikan), terasi (ikan) dan peda (ikan). Unit pengolahan yang mendukung dapat dilihat pada lampiran 6

d. Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan

Usaha budidaya ikan telah berkembang sejak tahun 1980-an, terutama budidaya air tawar dan air payau, kemudian diikuti dengan kegiatan budidaya laut, namun demikian pengalaman menunjukkan bahwa usaha budidaya baik ikan air tawar, payau maupun laut sering mengalami kegagalan oleh adanya kendala biologis yang berupa serangan wabah hama dan penyakit ikan yang hingga saat ini sebagian permasalahan tersebut belum dapat diatasi. Penyebabnya antara lain terbatasnya pengetahuan petani menyangkut penyakit ikan dan belum tersedianya atau terbatasnya teknologi efektif dan praktis dalam pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit ikan. Namun demikian pemerintah melalui UPTD Kesehatan Ikan telah melakukan pemantauan dan pemeriksaan dan melakukan sosialisasi kepada pembudidaya untuk melakukan pemeriksaan benih/bibit/benur sebelum dilakukan penebaran sehingga mendapatkan kualitas benih/bibit/benur yang baik.

Bentuk kegiatan yang merupakan penjabaran dari upaya meningkatkan produktivitas dan produksi dalam pengembangan budidaya ikan di Sulawesi Selatan, yaitu Pembinaan Kesehatan Ikan dan Sertifikasi Sarana Perikanan, yang pelaksanaannya mencakup beberapa hal sebagai berikut :

1. Identifikasi, monitoring, pengawasan dan pengendalian hama dan penyakit ikan maupun Residu OIK
2. Pemeriksaan Laboratorium terhadap produk dan sarana perikanan dan upaya pencegahan penyebaran penyakit

3. Peramalan terhadap kemungkinan adanya serangan hama dan penyakit.
4. Pemberian rekomendasi teknologi penanggulangan hama dan penyakit.
5. Pemberian penilaian standarisasi, labelisasi dan sertifikasi benih dan sarana produksi lainnya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pengujian PPSKI Tahun 2015

<i>Jenis Pengujian</i>	<i>Tahun 2015</i>	
	<i>Target Pengujian</i>	<i>Realisasi</i>
PCR	844	93
Mikrobiologi		91
Kualitas Air		130
Residu		237
<i>Total</i>	<i>844</i>	<i>551</i>

Sumber : UPTD Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan Pangkep

Kendala yang dihadapi pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan Pangkep antara lain :

1. Keberadaan Laboratorium yang belum menghasilkan pemeriksaan yang optimal terhadap deteksi ikan, karena peralatan yang masih perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga lebih profesional dan permanen.
2. Kurangnya minat masyarakat untuk melakukan pemeriksaan tentang Hama dan Penyakit Ikan namun tindakan yang diambil dalam rangka mengantisipasi hal tersebut telah dilakukan kegiatan workshop penyakit ikan dan sosialisasi monitoring residu dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat pembudidaya tentang hama dan penyakit.
3. Masih rendahnya koordinasi dan konsolidasi terhadap lembaga terkait tentang pengendalian penyakit ikan di Sulawesi Selatan, karena masih terbatasnya sarana komunikasi dan transportasi.

e. Pengujian Mutu Hasil Perikanan

UPTD Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Makassar, merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan mendapat pendelegasian dan kewenangan sebagai Lembaga Inspeksi dan Sertifikasi dalam penerbitan sertifikasi kesehatan komoditi perikanan. Dengan demikian diharapkan ekspor produk perikanan Sulawesi Selatan dapat semakin meningkat dan terjamin mutu keamanannya.

UPTD BPPMHP telah di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional sebagai Laboratorium Penguji dengan Nomor Akrediasi No LP-094-IDN dengan ruang lingkup parameter pengujian berupa Angka Lempeng Total, E. Coli, Salmonella SP, V. Cholera, V. Parahaemolyticus, Staphylococcus, Histamin, Logam Berat (Hg, Pb, Cd), hloramphenicol, Organoleptik, Kadar Air dan Kadar Abu. Pada Bulan Desember Tahun 2012 UPTD BPPMHP di Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sebagai Lembaga Inspeksi Type A dengan Nomor Akreditasi No. LI-052-IDN.

Selama tahun 2015 UPTD BPPMHP Makassar menerbitkan Health Certifikat sebanyak 7.5001 HC dan telah melakukan pengujian sampel sebanyak 4.501 sampel. Target PAD pada tahun 2015 UPTD BPPMHP Makassar sebesar Rp. 2.350.000.000 sedangkan Pendapatan Asli Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 1.998.771.412 dengan persentase capaian sebesar 85,05 %.

UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan memberikan pelayanan sertifikasi dengan menerapkan sistem pelayanan : *"One Day Service"* (Sertifikasi Produk Perikanan Satu Hari) yang mengacu ke ISO 9001:2008 dan juga menerapkan sistem manajemen mutu yang sesuai dengan jenis, ruang lingkup dan volume kegiatan pengujian yang dilaksanakan dengan mengacu pada persyaratan pedoman ISO/IEC 17025:2005.

Permasalahan yang dihadapi pada UPTD BPPMHP pada tahun 2013 yaitu :

1. Tenaga teknis yang berstatus pegawai tetap/PNS masih kurang
2. Kondisi bangunan kantor UPTD saat ini sudah tidak memenuhi syarat sebagai tempat pelayanan sertifikasi dan sebagai laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sesuai aturan negara Uni Eropa dan Negara Mitra
3. Peralatan pengujian yang dibutuhkan oleh customer belum optimal tersedia diantaranya peralatan pengujian Histamin dengan HPLC, Waterbath untuk pengujian Logam Berat dan ICP

Upaya penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Perlu adanya penambahan pegawai yang berstatus Pegawai Tetap
2. Perlu pengalokasian dana dan koordinasi untuk pengadaan sarana air bersih
3. Perlu pengalokasian dana untuk pembanguna gedung baru sesuai aturan negara Uni Eropa dan Negara Mitra

Tabel 2. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD BPPMHP Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Target	Bulan	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2.350.000.000	Januari	108.273.166	4,61
2		Februari	136.729.686	5,82
3		Maret	155.857.254	6,63
4		April	206.035.534	8,77
5		Mei	168.878.878	7,19
6		Juni	166.713.129	7,09
7		Juli	135.305.074	5,76
8		Agustus	152.131.431	6,47
9		September	158.734.522	6,75
10		Oktober	172.266.690	7,46
11		November	196.957.036	8,38
12		Desember	237.889,012	10,12
TOTAL			1.998.771.412	85,05

Sumber : UPTD BPPMHP

f. Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap yang bernaung dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi khusus bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap secara nyata telah me-nunjukkan kegiatan yang berbasis kemasyarakatan dengan tujuan menyentuh masya-rakat nelayan skala kecil sampai menengah sehingga peningkatan usaha dapat tercapai dan secara langsung akan mempengaruhi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan nelayan sebagai ujung tombak dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Permasalahan yang terdapat pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap selama tahun 2015 yaitu :

- ◆ Terdapat kegiatan yang lamban dalam pengerjaan oleh pihak ketiga karena cuaca yang ekstrim tetapi akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.
- ◆ Kurangnya perhatian nelayan penerima dalam memperbaiki alat setelah dioperasikan di lapangan sehingga bila ada kerusakan nelayan malas memperbaiki.
- ◆ Lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian alat yang diserahkan ke kabupaten

- ◆ Dukungan biaya operasional nelayan dalam menjalankan usahanya masih minim sehingga perlu adanya stakeholder
- ◆ Masih banyak masyarakat nelayan yang enggan menerapkan pasca panen yang baik pada saat mendapatkan hasil tangkapan sehingga mutu hasil tangkapan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh stake holder.
- ◆ Masih banyak nelayan yang mengambil jalan pintas dengan melakukan penangkapan ilegal fishing (Bom dan Bius).

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan tangkap yaitu :

- Senantiasa melakukan pembinaan kepada nelayan oleh tenaga pendamping ataupun penyuluh perikanan lapangan untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait.
- Bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang diberikan secara bertahap setiap tahun agar diawasi pendistribusiannya agar penerima benar-benar pelaku usaha perikanan.
- Nelayan lebih proaktif menggalang dana, agar tidak terfokus mengharapkan bantuan modal dari pemerintah dengan berkoordinasi dengan KKMB Kabupaten
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait.
- Perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk lebih meningkatkan pembinaan kepada nelayan.
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait.

g. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar

Salah satu rangkaian dalam siklus budidaya perairan tawar adalah perbenihan ikan air tawar. Perbenihan ikan air tawar memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai penyedia sarana produksi berupa benih ikan. Keberadaan perbenihan ikan air tawar sebagai pendukung budidaya seperti pemeliharaan ikan dikolam, tambak, mina padi, air deras serta pemanfaatan perairan umum seperti keramba jaring apung dan lainnya.

Hal tersebut diatas, merupakan acuan bagi UPTD PPBAT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyusun program kegiatan dalam kurun waktu tahun anggaran 2015. Disamping tugas dan fungsi sebagai pembinaan dan pengembangan budidaya ikan air tawar di Sulawesi Selatan, juga diberikan tugas perbantuan sebagai pengumpul PAD berupa retribusi penjualan benih ikan air tawar.

LAPORAN TAHUNAN 2015

Pada Tahun 2015 UPTD PPBAT diberikan target PAD sebesar Rp. 195.000.000 dengan realisasi sebesar Rp 195.200.000 atau sekitar 100,1 %.

Kegiatan budidaya ikan air tawar yang dilaksanakan oleh UPTD PPBAT meliputi:

- Pembenihan ikan air tawar meliputi Ikan Mas, Nila, Lele Sangkuriang
- Pembesaran ikan untuk calon induk dikolam pemeliharaan meliputi jenis ikan Mas, Nila, Lele Sangkuriang dan Ikan Patin
- Kerjasama petani sawah pemeliharaan ikan mas dengan penebaran benih umur seminggu, memanfaatkan waktu musin palawija (80 hari)
- Pembesaran ikan disawah dengan sistem kemitraan dengan petani sawah
- Pembesaran Ikan Nila, Mas, Lele ditambak bekas udang windu dan bandeng yang masih memiliki salinitas dibawah 5 permil
- Restocking perairan umum seperti danau, waduk, sungai dan rawa

Permasalahan yang dihadapi oleh UPTD PPBAT selama tahun 2015 yaitu :

- Permintaan benih ikan di luar kabupaten Soppeng semakin banyak sementara kendaraan pengangkut benih yang dimiliki UPTD PPBAT sudah tua yang memerlukan biaya operasional yang tinggi
- UPTD PPBAT setiap tahun digunakan sebagai tempat magang, praktek lapang, field trip namun tidak dilengkapi dengan tempat ibadah

Upaya pemecahan masalah yang dilakukan oleh UPTD PPBAT yaitu :

- Perlu adanya pengadaan kendaraan operasional pengangkut benih ikan yang baru sehingga lebih memperlancar pemasaran ikan ke daerah yang jaraknya jauh dari Lajoa Soppeng
- Perlunya adanya pembangunan tempat ibadah walaupun itu hanya mushallah yang berukuran kecil.

h. Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai

UPTD Pembinaan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai merupakan pilar untuk pengembangan usaha budidaya laut dan pantai di Sulawesi Selatan dan mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 bersumber dari penjualan benih udang windu seharga Rp. 45.010.000 dan penjualan

benih udang vannamei seharga Rp. 45.100.000 sehingga total PAD tahun 2015 sebesar Rp. 90.110.000

Adapun beberapa permasalahan dan upaya pemecahan yang dihadapi oleh UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai selama Tahun 2015 yaitu :

a. Ketatausahaan

- ◆ Belum Profesionalnya tenaga ketatausahaan
- ◆ Tenaga ketatausahaan hanya dimonopoli tenaga honorer karena tidak adanya staf subag tata usaha

Upaya Pemecahan

- ◆ Tenaga PNS sangat minim sehingga perlu penambahan staf sebagai tenaga ketatausahaan.
- ◆ Penambahan tenaga ketatausahaan yang berpengalaman atau tenaga kontrak yang mempunyai latar belakang pendidikan spesialis
- ◆ Perlu penambahan tenaga organik atau PNS untuk bidang teknis

b. Pelatihan dan Pembinaan

Upaya yang dilakukan dalam rangka pembinaan dan pelatihan budidaya tambak dan laut tahun 2015

- ◆ Mensosialisasikan kepada petani tambak, baik petani langsung maupun penggelondongan tentang cara-cara penanganan bibit, baik benur maupun nener mulai dari pengangkutan dari Hatchery maupun backyard sampai dilokasi tambak sehingga dapat meminimalisir resiko kematian.
- ◆ Cara membudidayakan udang dengan baik sesuai standar teknologi yang diterapkan
- ◆ Cara penanganan hasil dari lokasi tambak sampai kepengumpul atau pabrik (Eksport)

c. Teknologi Budidaya

Upaya yang dilakukan dalam rangka pengawasan mutu hasil perikanan :

- ◆ Memberikan pemahaman kepada petani tambak terutama pada saat panen tentang cara penanganan hasil panen, yaitu dengan menggunakan sarana dengan baik misalnya cool books dan penggunaan es sehingga tidak mengurangi mutu produk yang dihasilkan

Upaya yang dilakukan dalam rangka penyediaan benur tahun 2015 :

- ◆ Perbaiki sarana produksi

- ◆ Penyediaan induk yang berkualitas
- ◆ Menggunakan pakan yang bermutu
- ◆ Melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional yang ada
- ◆ Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab



ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 08 Tahun 2008, tanggal 28 Juli 2008 Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan susunannya sebagai berikut :

*Tabel 3. Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015*

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas	Ir. Iskandar	19560716 197910 1 003	Pembina Utama Madya (IV/d)
2	Sekretaris	Ir. A.Chairil Anwar, MM	19620925 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Ka. Subag Umum dan Kepegawaian	Ir. Alimuddin	19660908 199903 1 004	Penata Tk. I (III/d)
	Ka. Subag Keuangan	Drs. Syarifuddin, S.Pi	19590423 197812 1 001	Pembina (IV/a)
	Ka. Subag Program	Ir. Ign Eko Susetiyo, MM	19660101 199503 1 005	Pembina (IV/a)
3	Ka. Subdin Perikanan Budidaya	Ir. Sulkaf S. Latief, MM	19630423 198903 1 010	Pembina Tk.I (IV/b)
	Kasie. Budidaya Laut dan payau	Ir. Hardi Haris, MM	19650816 199403 1 008	Pembina (IV/a)
	Kasie Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum	Ir. Ibrahim Rumbi, MM	19670223 199803 1 005	Pembina (IV/a)
	Kasie Sarana dan Prasarana Budidaya	Ir. Muhammad Madja	19640507 199303 1 008	Penata Tk.I (III/d)
4	Ka. Subdin Perikanan Tangkap Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dr. Ir. Muh. Natsir Mallawi, M.Si	19620327 199103 1 004	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	Andi Mei Agung, S.ST.Pi	19780530 200312 1 006	Penata (III/c)
	Kasie Perikanan Tangkap	Muh. Gemuruh, S.Pi	19610531 198303 1 006	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Kelautan dan Konservasi	Ir. A. Mallombassi Mappewali	19670118 199603 1 002	Penata Tk. I (III/d)
5	Kasubdin Bina Usaha dan Kelembagaan	Ir. Abd. Hafid Mallewa	19611102 198903 1 012	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	Ir. Arni Mahmud, MM	19640316 199203 2 004	Pembina (IV/a)
	Kasie Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan	Ir. A. Mustamin, M.Si	19651231 199803 1 003	Pembina (IV/a)
	Kasie Pembinaan Usaha	Ir. Lyna Indriati, M.Si	19590719 199003 2 001	Pembina (IV/a)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
6	Kasubdin Perlindungan Pengawasan dan Pengendalian	Ir. Miftahuddin	19630531 198903 1 015	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasie Penataan dan Penegakan Hukum	Ir. Abd. Khalik, MM	19650509 199903 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie. Pengembangan SDM Pengawasan	Ir. Masnia T	19620313 199101 2 001	Pembina (IV/a)
	Kasie. Sarana dan Prasarana Pengawasan	-	-	-

Sumber : Subag Kepegawaian

Tujuan dan fungsi dari masing-masing struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Pergub Nomor 40 Tahun 2008.

Susunan organisasi tersebut di atas juga dilengkapi dengan 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang melaksanakan tugas sebagai pelaksana langsung kegiatan teknis di daerah. UPTD dalam melaksanakan tugas berbeda dengan subdinas teknis dan dibawah pimpinan langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun UPTD yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Susunan Organisasi UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/Golongan
1	2	3	4	5
1	Kepala Unit Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi dan Perikanan Tangkap	Ir. H. Bahtiar Lewa, MT	19640816 199003 1 013	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Ir. Muh. Usman, MM	19660418 199803 1 009	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Sarana dan Prasarana Perikanan	Ir. St. Syahtirah Syam	19659617 199803 2 002	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Mekanisasi Kapal Perikanan dan Kesehatan Kerja	Ir. Husni Husain	19651112 199212 1 001	Penata Tk. I (III/d)
2	Kepala Unit Pengelolaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	St. Zaleha Soebarini, S.Pi, M.Si	19670913 199103 2 016	Pembina (IV/a)
	Kasubag Tata usaha	Ir. Rosdiana, MM	19670116 199503 2 002	Pembina (IV/a)
	Kasi Standarisasi dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan	Sukmawati Gaffar, S.ST.Pi	19730331 199803 2 009	Penata Tk. I (III/d)
	Kasie Teknologi Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	Ir. Abdul Azis, M.Si	19661231 199903 1 030	Penata Tk. I (III/d)
3	Kepala Unit Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai	Ir. Amri Tjoneng, MM	19640421 199102 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Mas'ud Banas, S.Pi	19580307 197812 1 002	Penata Tk. I (III/d)

No	Jabatan	Nama	Nip	Pangkat/ Golongan
1	2	3	4	5
	Kasie Pembinaan dan Pelatihan	Sahabuddin, S.Pi	19681911 200003 1 004	Pembina (IV/a)
	Kasie Teknologi Budidaya Laut dan pantai	Deppalana, S.Pi, MM	19740605 199803 1 007	Penata Tk I (III/d)
4	Kepala Unit Pembinaan Kesehatan dan Sertifikasi Sarana Perikanan	Ir. Basri Hamal, MP	19650508 199103 1 017	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Febrian Budianto, S.Pi, MM	19730201 199903 1 013	Pembina (IV/a)
	Kasie Analisis Pemantauan dan Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan	Ir. Wahyuni, S.Pi, MM	19641005 199103 2 012	Pembina (IV/a)
	Kasie Standarisasi dan Sertifikasi Sarana Perikanan	Muh. Ridha, S.Pi, M.Si	19680615 199803 1 013	Pembina (IV/a)
5	Kepala Unit Pembenihan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	Ir. Syafaruddin, MM	19640605 199003 1 007	Pembina Tk. I (IV/b)
	Kasubag Tata Usaha	Nursalam, S.Pi	19710601 200003 1 006	Penata (III/c)
	Kasie Teknologi Perbenihan Air Tawar	-	-	-
	Kasie Pembinaan dan pelatihan	Handayani Pratiwi, S.Pi	19700621 200701 2 019	Penata Muda Tk I (III/b)

Sumber : Subag Kepegawaian

3.2. Kepegawaian

Pada tahun 2015 tercatat jumlah pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 206 orang turun 2,4 % bila dibandingkan dengan tahun 2014.

Adapun jumlah komposisi pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015 pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah dan Komposisi Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2014 dan 2015

Tingkat/gol	Tahun				(%)
	2014	%	2015	%	
IV	24	11,4	29	14,1	20,8
III	153	72,5	144	69,9	(5,9)
II	30	14,2	29	14,1	(3,3)
I	4	1,9	4	1,9	0
Jumlah	211	100	206	100	(2,4)

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian

Tabel 6. Rekapitulasi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2015

No	uraian Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sekretaris Dinas	30	23	53
2	Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap	17	15	32
3	Bidang Perikanan Budidaya	13	8	21
4	Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan	8	10	18
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	13	6	19
6	UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	4	14	18
7	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	10	5	15
8	UPTD sertifikasi Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan	7	3	10
9	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai	8	1	9
10	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	6	2	8
11	Pengawas Perikanan (Penggabungan Dengan Pengawas Benih Ikan)	1	1	2
Total		117	89	206

Sumber : Subag Kepegawaian

Tabel 7. Rekapitulasi PNS Berdasar Pendidikan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Periode 31 Desember 2015.

No	uraian Kerja	Pendidikan								Jumlah
		S3	S2	S1	D.IV	D.III	SLTA	SMP	SD	
1	Sekretaris Dinas	0	7	32	1	3	9	0	1	53
2	Bidang Kelautan, Pesisir dan Perikanan Tangkap	1	3	19	5	1	3	0	0	32
3	Bidang Perikanan Budidaya	0	3	15	3	0	0	0	0	21
4	Bidang Bina Mutu, Usaha dan Kelembagaan	0	5	9	0	2	2	0	0	18
5	Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	0	3	13	1	0	2	0	0	19
6	UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	0	3	11	0	2	2	1	0	19
7	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	0	2	7	1	2	3	0	0	15
8	UPTD sertifikasi Pembinaan dan Pengembangan Sertifikasi Kesehatan Ikan	0	4	2	0	1	3	0	0	10
9	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai	0	2	4	1	1	0	0	1	9
10	UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Tawar	0	1	5	0	0	1	0	1	8
11	Pengawas Perikanan (Penggabungan Dengan Pengawas Benih Ikan)	0	1	1	0	0	0	0	0	2
Total		1	34	118	12	12	25	1	3	206

Sumber : Subag Kepegawaian

3.3. Aset Pemerintah

Inventarisasi aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berupa barang (bergerak dan tidak bergerak), tanah/bangunan dan lahan/unit usaha yang terdapat di daerah. Tahun 2015 aset Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di uraikan seperti tabel berikut.

Tabel 8. Barang, Tanah/bangunan dan lahan usaha Milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	259
	a. Alat Angkutan (Roda 4 & Roda 2)	6
	b. Alat Kantor dan Rumah Tangga	152
	c. Alat Studio dan Komunikasi	9
	d. Alat Ukur	9
	e. Alat Laboratorium	83
2	Gedung dan Bangunan	5
	a. Bangunan Gedung	5
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3
	a. Instalasi	3
Jumlah		267

Sumber Sub Bagian Umum

3.4. Keuangan

a. Belanja Aparatur

Belanja aparatur digunakan untuk membiayai Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tambahan Penghasilan dan Intensif Pungutan Retribusi Daerah pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sebesar Rp. 16.498.236.542,- terjadi penurunan sebesar 2,1 % bila dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar Rp. 16.846.441.712,- Realisasi sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp. 16.295.494.117,- atau 98,77 %.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan juga menangani PAD, yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada beberapa obyek pajak.

LAPORAN TAHUNAN 2015

Untuk tahun 2015 Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ditargetkan sebesar Rp. 3.000.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.531.220.412 atau 84,37 %. Adapun sumber dan target besarnya PAD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 9. Target dan Realisasi PAD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2015

NO	uraian	Dasar Hukum	Target	Realisasi
1	<i>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</i>	Perda No. 1 Tahun 2013	2.778.000.000	2.167.625.412
	- Sertifikat Mutu Ekspor dan Surat Keterangan Asal			
	➤ UPTD LPPMHP Makassar		2.634.000.000	1.998.771.412
	➤ Lab. Kesehatan Ikan Pangkep		14.000.000	77.729.000
	- Kerjasama Sewa Tambak		110.000.000	68.050.000
	- Sewa Rumah Dinas		20.000.000	23.075.000
2	<i>Retribusi Penyelenggaraan Perizinan dalam Lingkup Pemerintah Prov. Sulslel</i>	Perda No. 4 Tahun 2008	50.000.000	78.285.000
3	<i>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</i>	Perda No. 3 Tahun 2008	172.000.000	169.950.000
	- Penjualan Benih Ikan dan Udang		172.000.000	285.310.000
TOTAL			3.000.000.000	2.531.220.412

Sumber : Subag Keuangan

IV. PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Sesuai dengan Visi dan Misi, maka ditetapkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan sesuai dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi (Penguatan Kelembagaan dan kesejahteraan Sosial)
2. Meningkatkan kelestarian lingkungan
3. Meningkatnya daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan global
4. Meningkatkan lapangan pekerjaan usaha perikanan yang berkeadilan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
5. a. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pemerintahan desa
b. Mewujudkan pemerintahan yang baik

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan
2. Tercukupinya infrastruktur dasar dan layanan dasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
3. Meningkatnya perlindungan fungsi lingkungan dan penanganan dampak lingkungan hidup.
4. Terjaganya iklim investasi berkualitas yang mendukung Sulawesi Selatan sebagai simpul jejaring ekonomi dan jasa luar jawa
5. a. Meningkatnya keterampilan dan inovasi pelaku usaha kelautan dan Perikanan
b. (1). Terwujudnya kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan daerah yang kuat dan transparan dalam mendukung reformasi birokrasi
(2). Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, inovatif dan tertib
(3). Terwujudnya peningkatan kapasitas dan pendayagunaan aparatur pemerintahan daerah yang berkelanjutan
(4). Terwujudnya perencanaan dan pengendalian pembangunan yang berkualitas, responsif gender dan memperhatikan kearifan lokal

4.2. Kebijakan dan Program Strategis

a. Kebijakan

Pada Tahun 2015 legislatif baru dan kabinet baru mulai berjalan. Karena itu, sebagian dari kebijakan akan menyesuaikan diri dengan arahan dari kabinet baru tersebut. Pembangunan tahun 2015 sebagian masih melanjutkan prioritas tahun 2014 yakni pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kapasitas infrastruktur wilayah. Selain itu, ditambahkan prioritas baru yakni :

- Peningkatan Kelestarian dan Penanganan dampak Lingkungan :
 - ◆ Perlindungan fungsi lingkungan;
 - ◆ Penanganan dampak lingkungan;
 - ◆ Konservasi dan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
 - ◆ Antisipasi perubahan iklim
- Pengembangan Kerjasama Daerah dan Daya Saing Daerah :
 - ◆ Pengembangan kerjasama Provinsi Sul-Sel dengan Provinsi Luar Negeri;
 - ◆ Pengembangan kerjasama Kabupaten/Kota dengan Kabupaten/Kota lain di Indonesia dan Luar Negeri;
 - ◆ Pengembangan Sistem Jaringan Distribusi komoditas strategis;
 - ◆ Penguatan system inovasi daerah;
 - ◆ Pengembangan dukungan MP3EI dan BKPRS.

b. Program Strategis

Dengan memperhatikan Analisis lingkungan strategis asumsi dan faktor penentu keberhasilan disamping visi, misi dan kebijakan dengan tetap berpedoman kepada program pembangunan pusat, maka Program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Renstra 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya dan Disiplin Aparatur
Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Capaian Kinerja

Untuk mendukung keberhasilan Program Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan beberapa kegiatan yang dananya bersumber dari dana Dekonsentrasi dan APBD.

Dana Dekonsentrasi

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP

- Pembinaan Pelaksanaan dan Koordinasi Pengelolaan Keuangan KKP
- Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran dan Monev Pembangunan KKP
- Pengembangan Data Statistik dan Informasi Kelautan dan Perikanan

2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, alat Penangkap Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan
- Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan
- Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap
- Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan
- Pengelolaan Sumberdaya Ikan (SDI)
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Perikanan Tangkap

3. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

- Pengelolaan Sistem Kesehatan Ikan dan Lingkungan Pembudidayaan Ikan
- Pengelolaan Sistem Pembenihan Ikan
- Pengelolaan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan
- Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya Ditjen Perikanan budidaya

4. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas
- Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan
- Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan
- Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan
- Operasional Pemantauan Pemanfaatan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan

5. Program Peningkatan Daya Saing Usaha dan Produk Kelautan dan Perikanan

- Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan
- Penguatan dan Perluasan akses Pasar Luar Negeri Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan Produk dan Usaha Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan
- Pengembangan Produk dan Usaha Pasca Panen Non Pangan Hasil Perikanan
- Peningkatan Investasi dan Perluasan Usaha Pasca Panen Kelautan dan Perikanan
- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis di Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan

6. Program Pengelolaan Sumberdaya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis
- Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha
- Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil
- Pendayagunaan Pesisir dan Lautan
- Penataan Ruang dan perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KP3K.

7. Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu & Keamanan Hasil Perikanan

- Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
- Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- Pengembangan Sistem Manajemen Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

DANA APBD

1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

- Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Tawar
- Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (udang dan bandeng)
- Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya
- Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan
- Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumput Laut
- Penyusunan Data Statistik Perikanan Budidaya
- Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan Pangkep
- Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Payau dan Laut

2. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir & Pulau-Pulau Kecil

- Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap
- Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (Pengembangan Pelabuhan)

3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau Kecil Serta Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau kecil
- Pengembangan Unit Usaha dan Ekonomi Masyarakat pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan
- Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
- Pengembangan Lab. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
- Pembinaan Produksi Bernilai Tambah
- Penyusunan Data Statistik Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan
- Pengembangan dan Promosi Hasil produk Perikanan
- Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan dan Koperasi

5. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Pengawasan dan Peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan Masyarakat Pengawas
- Peningkatan Operasional Pengawas dan Sarana Prasarana Pengawas
- Penyuluhan Hukum dalam pendayagunaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas
- Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMHP Makassar
- Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBPL Bojo Barru
- Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBAT Lajoa Soppeng
- Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPSKI Pangkep
- Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMPT Barombong
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas

7. Program Peningkatan Kapasitas dan Kinerja SKPD

- Peningkatan Disiplin Aparatur dan Peningkatan Sumberdaya Manusia

8. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Perencanaan dan Sistem Evaluasi Kinerja

- Koordinasi Perencanaan & Pelaporan Capaian Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik

4.3. Sumber Pembiayaan

4.3.1. Dana Dekonsentrasi

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola dana sebesar Rp. 14.418.310.000 atau terjadi kenaikan sebesar 12,3 % dari tahun anggaran 2014 Rp. 12.836.506.000. Anggaran tersebut dialokasikan pada satuan kerja yaitu :

- 4.3.1. Sekretaris Jenderal (01) Rp. 652.293.000
- 4.3.2. Ditjen Perikanan Tangkap (03) Rp. 3.474.588.000
- 4.3.3. Ditjen Perikanan Budidaya (04) Rp. 3.483.310.000
- 4.3.4. Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05) Rp. 1.142.825.000
- 4.3.5. Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06) Rp. 2.987.417.000
- 4.3.6. Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (07) Rp. 2.254.000.000
- 4.3.7. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (13) Rp. 423.877.000

4.3.2. Dana Tugas Pembantuan

Pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 6.001.700.000 dengan realisasi Rp. 5.775.774.100 (96,2 %) yang terdiri dari:

- ◆ Ditjen Perikanan Tangkap sebesar Rp. 600.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 561.254.900
- ◆ Ditjen Perikanan Budidaya sebesar Rp. 3.831.710.000 dengan realisasi sebesar Rp. 3.742.648.900
- ◆ Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebesar Rp. 1.569.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.471.870.300

4.3.3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Jumlah penerima dana DAK untuk Tahun Anggaran 2015 sebanyak 24 kabupaten/kota dengan jumlah dana sebesar Rp. 99.290.064.672 bila dibandingkan

dengan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 101.107.268.159,- mengalami penurunan sebesar 1,8 %, sedangkan untuk DKP Provinsi mendapatkan dana DAK pada tahun 2015 sebesar Rp. 5.339.780.000 dan dana Pendamping sebesar Rp. 533.978.000 dengan realisasi dana DAK sebesar Rp. 4.300.129.295 dan Dana Pendamping sebesar Rp. 430.012.930.

Tabel 10. Daftar Kabupaten/Kota Penerima DAK Tahun 2015

No	Kabupaten	DAK (Rp)	Pendamping (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Gowa	2.354.220.000	332.346.400	2.686.566.400
2	Takalar	4.103.550.000	410.355.000	4.513.905.000
3	Bulukumba	5.027.429.092	502.742.909	5.530.172.001
4	Bantaeng	3.523.450.000	352.345.000	3.875.795.000
5	Jeneponto	4.609.060.000	460.906.000	5.069.966.000
6	Bone	5.017.310.000	501.731.000	5.519.041.000
7	Sinjai	4.258.770.000	425.877.000	4.684.647.000
8	Selayar	5.012.150.000	501.215.000	5.513.365.000
9	Wajo	4.030.320.000	403.032.000	4.433.352.000
10	Luwu	4.584.910.000	458.491.000	5.043.401.000
11	Palopo	3.849.348.182	384.934.818	4.234.283.000
12	Luwu Utara	4.180.642.725	418.064.273	4.598.706.998
13	Tana Toraja	2.364.700.909	236.470.091	2.601.171.000
14	Enrekang	2.276.980.000	235.948.000	2.512.928.000
15	Soppeng	2.671.150.000	267.115.000	2.938.265.000
16	Sidrap	2.694.110.000	269.411.000	2.963.521.000
17	Pare - Pare	2.728.110.000	436.411.000	3.164.521.000
18	Barru	4.882.350.000	488.235.000	5.370.585.000
19	Pangkep	5.239.010.000	523.901.000	5.762.911.000
20	Maros	4.419.350.000	441.935.000	4.861.285.000
21	Pinrang	4.075.490.000	407.549.000	4.483.039.000
22	Toraja Utara	2.454.370.000	245.437.000	2.699.807.000
23	Luwu Timur	4.794.516.364	479.451.636	5.273.968.000
Jumlah		99.290.064.672	10.187.780.861	109.477.845.533

Sumber : Subag Perencanaan

4.3.4. Dana Daerah

Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selain di danai dekonsentrasi juga didukung pendanaan APBD, untuk tahun 2015 total anggaran sebesar Rp. 73.862.574.206,- dengan rincian belanja langsung Rp. 57.364.337.664,- dan belanja tidak langsung Rp. 16.498.236.542,- ini berarti terjadi penurunan sebesar 3,5 % dari tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 76.563.288.212,-

a. Belanja Langsung

Belanja langsung yang dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 57.364.337.664 dengan realisasi Rp. 53.304.160.317 (92,9 %).

Dana tersebut diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan. Alokasi dana tersebut terdapat pada delapan program kegiatan yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 16.246.336.914 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.784.773.454 (91%).
- Program Peningkatan Disiplin Aparatur sebesar Rp. 770.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 736.935.250 (95,7%).
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan sebesar Rp. 1.235.670.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.210.257.035 (97,9 %).
- Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir sebesar Rp. 3.318.725.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.176.773.920 (95,7 %).
- Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan sebesar Rp. 1.654.683.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.617.083.540 (97,7%).
- Program Pengembangan Budidaya Perikanan sebesar Rp. 20.013.734.750 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.359.877.403 (96,7 %).
- Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebesar Rp. 9.514.750.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.025.242.300 (84,3 %).
- Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan sebesar Rp. 4.610.438.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.393.217.415,- (95,3 %).

b. Belanja Tidak langsung

Belanja tidak langsung dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan rutin dan gaji Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2015 dialokasikan dana sebesar Rp. 16.498.236.542 dengan realisasi Rp. 16.295.494.117 (98,8 %).

4.4. Kegiatan Pembangunan

4.4.1. Perikanan Budidaya

a. Kegiatan Budidaya Laut dan Payau

Pembangunan sektor kelautan dan perikanan kedepan lebih diarahkan kepada pengembangan agribisnis dengan sasaran utamanya adalah pemberdayaan masyarakat pembudidaya, melalui pengembangan kerjasama antara pembudidaya dan dunia usaha.

Sebagai salah satu komoditi unggulan ekspor non migas dari sektor Kelautan dan Perikanan yaitu udang dan rumput laut. Untuk dapat mewujudkan usaha budidaya udang sebagai penghasil Devisa Negara, dimana budidaya udang merupakan salah satu kegiatan perikanan terbesar yang dapat dikatakan sebagai suatu industry karena telah ditunjang oleh sebagian besar industri hulu hingga hilir dan identik dengan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pembudidaya, disamping itu, dengan tidak mengabaikan masalah sosial ekonomi.

Tabel 11. Laporan Hasil Produksi Penerima Paket Bantuan Benur, Nener, Pakan, Saponin di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

A. Komoditi Udang dan Bandeng

No	Kabupaten	Jml Klp	Jml Paket	Paket Bantuan				Hasil Produksi		Keterangan
				Benur (Ekor)	Nener (Ekor)	Pakan (Kg)	Saponin (Kg)	Udang (Kg)	Bandeng (Kg)	
1	Selayar	5	100	1.100.000	-	2.500	2.000	-	-	Proses bdy
2	Sinjai	11	300	4.200.000	100.000	5.000	4.000	994,5	3.235	
3	Bulukumba	13	400	22.500.000	542.500	8.000	-	1.694,5	7.013	
4	Bantaeng	6	100	-	342.500	3.000	-	-	-	Proses bdy
5	Jeneponto	22	300	3.000.000	742.500	3.000	-	-	85.300	
6	Takalar	25	500	3.629.500	1.265.000	7.225	340	2.404	28.635	
7	Makassar	14	470	4.200.000	1.510.000	-	-	13.741,9	138.625	
8	Maros	19	600	6.000.000	1.485.000	6.000	-	20.366	108.120	
9	Pangkep	14	400	3.500.000	742.500	8.000	-	15.740	111.785	
10	Barru	9	300	7.975.000	200.000	-	-	7.643	-	Proses bdy
11	Pinrang	9	200	3.000.000	400.000	-	-	-	-	Proses bdy
12	Luwu Utara	6	200	2.200.000	-	5.000	4.000	4.288	-	Proses bdy
13	Luwu	10	200	1.700.000	100.000	5.000	4.000	975	14.683	
14	Wajo	9	200	2.740.000	340.000	1.000	800	100	45.185	
15	Bone	18	400	5.189.000	599.000	4.975	-	3.930	35.022	
16	Gowa	6	100	1.100.000	100.000	2.500	-	4.552	6.769	
17	Luwu Timur	6	200	2.000.000	200.000	5.000	-	480	3.900	
Total		202	4.970	74.033.500	8.669.000	66.200	15.140	76.908,9	588.272	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

LAPORAN TAHUNAN 2015

Tabel 12. Laporan Hasil Produksi Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (udang vannamei) Di provinsi Sulsel Tahun 2015

B. Komoditas udang vannamei

No	Kab/Kota	Penerima Paket		Paket Bantuan			Hasil Produksi	Keterangan
		Jml Klp	Jml Paket	Benur (ekor)	Pakan (Kg)	Saponin (Kg)		
1	Maros	2	50	1.666.650	-	-	-	Proses Bdy
2	Barro	5	100	3.333.300	-	-	5.861	Proses Bdy
3	Pinrang	2	50	1.000.000	2.500	-	3.191	Proses Bdy
4	Selayar	2	50	1.200.000	1.250	1.000	-	Proses Bdy
5	Pangkep	2	70	1.400.000	3.500	-	9.645	Proses Bdy
6	Bulukumba	3	40	960.000	1.000	800	3.709,2	Proses Bdy
7	Jeneponto	3	30	999.990	-	-	868	
8	Luwu	2	50	1.200.000	1.250	1.000	910	Proses Bdy
9	Pare – Pare	2	40	960.000	1.000	800	2.083	Proses Bdy
10	Palopo	1	20	400.000	1.000	-	87	
11	Luwu Utara	4	100	2.000.000	5.000	-	2.021	
Total		28	600	15.119.940	3.600	3.600	28.375,2	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

Tabel 13. Laporan Hasil Produksi Paket Bantuan Sarana Budidaya Rumput Laut Di provinsi Sulsel Tahun 2015

C. Komoditas Rumput Laut

No	Kab/Kota	Jml Klp	Jml Paket	Bibit (kg)	Tali No. 9 (kg)	Tali No.5 (kg)	Tali No.1 (kg)	Produksi	Ket
1	Sinjai	7	200	26.066	1.000	2.000	200	46.072	
2	Selayar	10	200	19.550	1.000	1.600	200	1.994,2	
3	Bulukumba	24	300	29.325	1.500	2.400	300	9.250,4	
4	Bantaeng	19	400	39.100	2.000	3.200	400	46.258,0	
5	Jeneponto	22	350	57.050	1.000	1.600	200	71.739,0	
6	Takalar	40	500	48.875	2.500	4.000	500	56.054,0	
7	Maros	7	200	19.550	1.000	1.600	200	100.180,0	
8	Pangkep	18	250	32.050	1.000	1.600	200	4.092,0	
9	Barro	9	200	19.550	1.000	1.600	200	34.712,9	
10	Pinrang	10	200	19.550	1.000	1.600	200	56.390,0	
11	Luwu Timur	12	200	19.550	1.000	1.600	200	14.867,1	
12	Luwu Utara	8	200	19.550	1.000	1.600	200	9.775,0	
13	Palopo	7	200	19.550	1.000	1.600	200	11.737,3	
14	Luwu	19	200	19.550	1.000	1.600	200	47.479,0	
15	Wajo	13	200	29.839	580	928	116	109.925,0	
16	Bone	33	200	19.550	1.000	1.600	200	17.879,0	
Total Produksi		258	4.000	438.255	18.580	30.128	3.716	638.404,9	

Sumber : Seksi Budidaya Laut dan Payau

Permasalahan yang dihadapi oleh seksi Budidaya Laut dan Payau selama tahun 2015 yaitu :

- Keterbatasan induk yang berkualitas
- Kurangnya perbenihan yang bersertifikasi CPIB
- Lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian induk dan benih
- Kawasan budidaya disulawesi selatan didominasi oleh tambak tradisional
- Dukungan prasarana irigasi tambak belum mampu menjamin ketersediaan air, baik kuantitas maupun kualitas
- Masih ada masyarakat pembudidaya ikan yang enggan menerapkan CBIB karena mempertanyakan manfaat langsung bagi dirinya
- Petani yang telah menerapkan CBIB belum sepenuhnya melakukan pencatatan
- Beberapa jenis obat ikan, bahan biologi dan kimia belum teregistrasi, beredar dan dimanfaatkan oleh pembudidaya ikan.
- Dukungan pembinaan oleh Kab/Kota belum optimal
- Kawasan/hamparan tidak memungkinkan untuk menerapkan CBIB
- Terjadinya keterlambatan penyaluran paket bantuan sarana produksi budidaya dikarenakan beberapa hal :
 - a) Pihak ke-3 yang ditunjuk untuk menyalurkan paket tidak memahami pentingnya jadwal tanam
 - b) Ketersediaan stok bibit yang sesuai dengan spesifikasi lapangan kurang
 - c) Jadwal tanam yang sudah ditentukan sejak awal tiba-tiba berubah dikarenakan cuaca tidak mendukung untuk dilakukan penebaran.
 - d) Untuk Kabupaten Luwu Timur pada kegiatan pengadaan bibit rumput laut dan tali di Desa Bawalipu dan Desa Burau, Kecamatan Wotu sebanyak 145 paket tidak tersalurkan, hal ini disebabkan karena ketidaksiapan lokasi dan calon penerima paket bantuan

Upaya pemecahan yang dilakukan yaitu :

- Diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada petani dan juga perbankan untuk memberikan modal usaha bagi masyarakat pembudidaya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
- Mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada kelompok tani pembudidaya baik dengan sosialisasi, pelatihan tentang teknologi kepada kelompok tani
- Senantiasa melakukan pembinaan kepada petani oleh tenaga pendamping ataupun penyuluh perikanan lapangan untuk menjalin kerjasama dengan instansi terkait.

- Bantuan sarana dan prasarana secara bertahap setiap tahun diberikan oleh pihak terkait termasuk DKP Kab/Kota dan dari DKP Prov SulSel.
- Mengadakan pelatihan keterampilan kepada masyarakat oleh instansi terkait tentang inovasi teknologi rumput laut menjadi olahan ataupun teknologi pengolahan rumput laut menjadi bahan setengah jadi (ATC) sebelum dijual keindustri sehingga meningkatkan nilai jual.
- Perlu adanya kebijakan lebih lanjut dari pihak pemerintah untuk menstabilkan harga rumput laut seperti dengan adanya industri pengolahan rumput laut yang dimiliki oleh pemerintah agar dapat mengendalikan fluktuasi harga di-tingkat petani
- Panitia pengadaan barang dan jasa agar melakukan evaluasi kepada pihak ke-3
- Sebaiknya jasa pihak ke-3 yang ditunjuk untuk menyalurkan bantuan sarana produksi budidaya agar lebih awal melakukan kontak dengan pihak hatchery.

b. Kegiatan Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum

Salah satu potensi sumberdaya perikanan budidaya yang diharapkan dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, adalah sumberdaya perikanan budidaya yang berasal dari air tawar dengan program dan kegiatan yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan dan pelaku usaha perikanan budidaya air tawar.

Pada Tahun 2015, Seksi Budidaya Air Tawar dan Perairan Umum mengelola kegiatan yang bersumber dari APBD dan APBN Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Anggaran 2015, adalah sebagai berikut :

APBD

- a. Bantuan paket budidaya air tawar kepada kelompok pembudidaya berupa benih ikan air tawar dan pakan pellet, dengan total kelompok yang dibantu 68 kelompok atau 1.450 paket.

Waktu : Maret – November 2015

Lokasi : 9 Kabupaten/Kota

Jumlah Dana : Rp.1.450.000.000

- b. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Air Tawar

Waktu : Maret 2015

Lokasi : Kabupaten Tana Toraja

Jumlah Peserta : 100 orang

Jumlah Dana : Rp. 40.290.000

- c. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Air Tawar

- Waktu : Maret 2015
 Lokasi : Kabupaten Toraja Utara
 Jumlah Peserta : 100 orang
 Jumlah Dana : Rp. 40.290.000
- d. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Air Tawar
 Waktu : April 2015
 Lokasi : Kabupaten Enrekang
 Jumlah Peserta : 100 orang
 Jumlah Dana : Rp. 40.290.000
- e. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Air Tawar
 Waktu : Mei 2015
 Lokasi : Kabupaten Sidrap
 Jumlah Peserta : 100 orang
 Jumlah Dana : Rp. 40.290.000
- f. Kegiatan : Temu Lapang Budidaya Air Tawar
 Waktu : Juni 2015
 Lokasi : Kabupaten Soppeng
 Jumlah Peserta : 100 orang
 Jumlah Dana : Rp. 40.290.000

Tabel 14. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang bersumber dari Dana APBD Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kinerja			Ket
		Input (Rp)	Output	Outcome	
Budidaya Ikan Air Tawar					
1.	Tana Toraja <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Ikan MasPaket Bantuan Ikan Lele	200.000.000 40.000.000	200 Pkt 40 Pkt	Meningkatnya Hasil produksi budidaya air tawar	
2.	Toraja Utara <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Ikan MasPaket Bantuan Ikan Lele	200.000.000 40.000.000	200 Pkt 40 Pkt		
3.	Enrekang <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	200.000.000	200 Pkt		
4	Sidrap <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	160.000.000	160 Pkt		
5.	Soppeng <ul style="list-style-type: none">Paket Bantuan Air Tawar	160.000.000	160 Pkt		

Lanjutan.....

LAPORAN TAHUNAN 2015

6.	Luwu Utara • Paket Bantuan Air Tawar	200.000.000	200 Pkt		
7	Maros • Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	100 Pkt		
8	Gowa • Paket Bantuan Air Tawar	50.000.000	50 Pkt		
9	Makassar • Paket Bantuan Air Tawar	100.000.000	100 Pkt		
	Jumlah	1.450.000.000	1.450 Pkt		

Sumber : Seksi Budidaya Air Tawar Dan Perairan Umum

APBN

- a. Kegiatan : Restocking di Perairan Umum
 Jumlah Dana : Rp. 85.000.000
 Lokasi :
 1. Kel. Limpo Majang dan Kel. Kaca, Kec. Mariorawo Kabupaten Soppeng
 Desa Kessing, Kec. Donri-donri Kab. Soppeng
 Jumlah Benih : Ikan 40.000 ekor
 Waktu : Mei 2015
 2. Danau Sidenreng, Kel. Wette'e, Kec. Pancalautan Kabupaten Sidrap
 Jumlah Benih : Ikan Mas 15.000 ekor, Ikan Tawes 15.000 Ekor dan Ikan Nila 15.000 Ekor
 Waktu : Juni 2015
- b. Kegiatan : Pertemuan Sosialisasi Pra Sertifikasi Hak Tanah Pembudidaya Ikan TK. Provinsi Sulsel
 Waktu : April 2015
 Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan
 Jumlah Peserta : 24 orang
 Jumlah Dana : Rp. 64.790.000
- c. Kegiatan : Pertemuan Usaha Ikan Hias Air Tawar
 Waktu : Mei 2015
 Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan
 Jumlah Peserta : 30 orang
 Jumlah Dana : Rp.31.250.000
- d. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Ikan Air Tawar
 Waktu : Mei 2015
 Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan
 Jumlah Peserta : 24 orang

- Jumlah Dana : Rp.67.110.000
- e. Kegiatan : Temu Teknis Perbenihan Air Tawar
- Waktu : September 2015
- Lokasi : Provinsi Sulawesi Selatan
- Jumlah Peserta : 24 orang
- Jumlah Dana : Rp.59.910.000

Tabel 15. Alokasi Paket Budidaya Air Tawar yang bersumber dari Dana APBN Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kinerja			Ket
		Input (Rp)	Output	Outcome	
1.	Restocking Soppeng dan Sidrap - Benih Ikan	85.000.000	95.000 Ekor	Meningkatnya Produksi Air Tawar di Perairan Umum	

Sumber : Seksi Budidaya Air Tawar Dan Perairan Umum

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2015 pada seksi budidaya Air Tawar dan Perairan Umum Yaitu :

1. Terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar
2. Ketidaksesuaian musim budidaya ditingkat kelompok dengan waktu pengadaan ditingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya dilapangan sering terlambat.

Tindak lanjut permasalahan yang dilakukan pada seksi budidaya Air Tawar dan Perairan Umum yaitu :

1. Untuk mengatasi terbatasnya dana yang teralokasi untuk pengembangan budidaya air tawar, maka seksi budidaya air tawar melakukan seleksi yang ketat terhadap usulan/proposal yang masuk.
2. Mengatasi permasalahan ketidaksesuaian musim budidaya di tingkat kelompok dengan waktu pengadaan ditingkat satker sehingga pelaksanaan kegiatan budidaya dilapangan sering mengalami keterlambatan dari waktu yang seharusnya, telah diupayakan penyesuaian jadwal kegiatan dengan musim tanam dikab/kota.

Pada Tahun 2015, tidak dilakukan Lomba Kinerja Kelompok dan Kelembagaan Perikanan Budidaya Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, namun pemenang lomba

tersebut diusulkan untuk mengikuti lomba tingkat nasional. Adapun juara yang didapatkan oleh pemenang lomba tingkat provinsi pada tingkat nasional yaitu :

- I. Pemenang Lomba Kelompok Pembudidaya Udang/Bandeng
Peringkat III (Ketiga) : Kelompok Sipurennu, Kab. Barru
- II. Pemenang Lomba Kelompok Pembudidaya Rumput Laut
Peringkat III (Ketiga) : Kelompok Madeceng, Kab. Bone
- III. Pemenang Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan Hias
Peringkat III (Ketiga) : Kelompok Benteng Bersinar, Kab. Gowa
- IV. Pemenang Lomba Kelompok Pembudidaya Ikan Lele/Patin
Peringkat III (Ketiga) : Kelompok Santarie, Kab. Pangkep
- V. Pemenang Lomba Kelompok Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)
Peringkat II (Kedua) : Hatchery Mandiri, Kab. Pinrang
- VI. Pemenang Lomba Kelembagaan (Minapolitan)
Peringkat III (Ketiga) : Tim Pokja Minapolitan Kab. Pinrang
- VII. Pemenang Lomba Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
Peringkat III (Ketiga) : UPP Lipang Bajeng, Kab. Gowa

c. Kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

- a. Kegiatan : Apresiasi Pembinaan Mutu CPIB
Waktu : Tanggal 20 s/d 21 April 2015
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- b. Kegiatan : Temu Koordinasi Petugas Auditor dan Fasilitator CBIB
Waktu : Tanggal 01 s/d 02 September 2015
Lokasi : Hotel Quality Plaza, Makassar
- c. Kegiatan : Temu Teknis Budidaya Sarana dan Prasarana Budidaya
Waktu : Tanggal 17 April 2015
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel
- d. Kegiatan : Temu Koordinasi Penerapan CBIB
Waktu : Tanggal 14 September 2015
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel
- e. Kegiatan : Temu Koordinasi Distribusi OIKB
Waktu : Tanggal 8 Desember 2015
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel
- f. Kegiatan : Temu Koordinasi Perbenihan
Waktu : Tanggal 14 Desember 2015
Lokasi : Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. SulSel

APBD

1. Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya

- Pengadaan Calon Induk Ikan Mas 500 Kg di Kabupaten Gowa, Takalar dan Sinjai dengan kelompok penerima yaitu :

No	Kabupaten	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Gowa	- UPR Kampung Baru - UPR Rawa Indah	Buakkang Maccini Baji	Bungaya Bajeng
2	Takalar	UPR Toa Manjina	Lassang	Polombangkeng
3	Sinjai	UPR Bawakaraeng	Gunung Perak	Sinjai Barat

- Pengadaan Artemia dan Pakan Larva di Kabupaten Barru dengan kelompok penerima Aquaculture Kelurahan Coppo Kec. Barru Kabupaten Barru.
- Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar di Kabupaten Gowa dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Sokkolia	Sokkolia	Bontomarannu
2	Pembudidaya Nila Paraikatte	Romanglasa	Bontonompo
3	Pembudidaya Kube	Bunga Ejaya	Palangga
4	Pembudidaya Tosikalabbiri	Taeng	Palangga
5	Pembudidaya Awal Mandiri	Bonto Bontoa	Somba Opu
6	Pembudidaya Swadarma	Malino	Tinggimoncong
7	Pembudidaya Mina Sejahtera	Timbuseng	Pattalassang
8	Pembudidaya Dalle Tabua	Katangka	Bontonompo
9	Pembudidaya Minasa Baji	Sokkolia	Bontomarannu
10	Pembudidaya Benteng Bersinar	Benteng Somba Opu	Barombong

- Pengadaan Bibit Rumput Laut di Kabupaten Takalar dengan Kelompok Penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Kelompok Cahaya Tani	Punaga	Mangarabombang
2	Pembudidaya Sipakainga	Laikang	Mangarabombang
3	Pembudidaya Laut Biru	Laikang	Mangarabombang
4	Pembudidaya Puntondo	Laikang	Mangarabombang

- Pengadaan Bibit Rumput Laut, Pengadaan Nener dan Benur di Kabupaten Jeneponto dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Pembudidaya Alpeta	Pao	Tarowang
2	Pembudidaya Fabbulo Sibatang	Pao	Tarowang
3	Pembudidaya Mutiara Biru	Pao	Tarowang

- Pengadaan Bibit Rumput Laut dengan kelompok penerima Padaidi Desa Watang Suppa Kec. Suppa Kabupaten Pinrang.

- Pengadaan Bibit rumput laut dikabupaten Pangkep dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Cemerlang Usaha Mandiri	Kanyurang	Liukang Kalmas
2	Kanyurang Tata Persada	Kanyurang	Liukang Kalmas
3	Cipta Usaha Mandiri	Pl. Doang Doang	Liukang Kalmas
4	Gemilang Usaha Bahari	Pl. Doing Doing	Liukang Kalmas

- Pengadaan Bibit rumput laut dengan kelompok penerima pembudidaya Siparingerangi Desa Bonepute Kecamatan Tonra Kabupaten Bone.
- Pengadaan Percontohan Keramba Tancap dikecamatan Duampanua Kab. Pinrang.

2. Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan

- Pengadaan Belanja Percontohan penerapan CPIB dikabupaten Maros, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Citra Bersama	Palantikang	Maros Baru
2	Harapan Baru	Bontoa	Maros
3	Bahari	Bontoa	Maros
4	Butta Ada	Mananjang	Maros Baru

- Pengadaan Belanja Percontohan penerapan CPIB dikabupaten Pangkep, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Lontara	Bori Appaka	Bungoro
2	Nurul Ilmi	Boddie	Mandalle
3	Bulu – Bulu	Anrong Appaka	Pangkajene
4	Sipakarennu	Bonto Perak	Pangkajene

- Pengadaan Belanja Percontohan penerapan CPIB dikabupaten Pinrang, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Makkaritutue	Mattirotsasi	Mattirosompe
2	Macolli Loloe	Mattirotsasi	Mattirosompe
3	Rawa Subur Lapolo Balena	Patobong	Mattirosompe
4	Ingin Maju	Patobong	Mattirosompe

- Pengadaan Belanja Percontohan penerapan CPIB dikabupaten Jeneponto, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Julukana	Boronglamu	Arungkeke
2	Karya Bersama	Boronglamu	Arungkeke
3	Se're Kana	Boronglamu	Arungkeke
4	Maju Bersama	Boronglamu	Arungkeke
5	Baji Ngaseng	Boronglamu	Arungkeke

6	Bunga Satu	Boronglamu	Arungkeke
7	Mawar Mekar	Boronglamu	Arungkeke

- Pengadaan Belanja Percontohan penerapan CPIB dikabupaten Bone, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Sipakamase	Panyiwi	Cendrana
2	Ancee 2	Panyiwi	Cendrana
3	Ancee Bersama	Panyiwi	Cendrana
4	Ancee 1	Panyiwi	Cendrana

- Pengadaan Benur dan Nener dikabupaten Maros, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Padaidi	Bontoa	Bontoa
2	Mangemba	Bontoa	Bontoa
3	Sipakainga	Bontoa	Bontoa
4	Kokoa	Bontoa	Bontoa

- Pengadaan Bibir rumput laut diKota Makassar, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Citra Bahari	Lae - Lae	Ujung Pandang
2	Citra Bahari II	Lae - Lae	Ujung Pandang

- Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar diKota Makassar, dengan kelompok penerima yaitu :

No	Nama Klp	Desa	Kec/Kel
1	Abbulo Sibatang	Tanjung Merdeka	Tamalate
2	Truno Lele I	Tanjung Merdeka	Tamalate
3	Tamarunang I	Tanjung Merdeka	Tamalate
4	Tamarunang II	Tanjung Merdeka	Tamalate

APBN

1. Sertifikasi CBIB

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Competent Authority Lokal, telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian sertifikasi CBIB dan tahun 2015 Sulawesi selatan telah mencapai penilaian sertifikasi dimana target yang diberikan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Cq. Diektorat Produksi sebanyak 130 unit an Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan mencapai dan melebihi target yang diberikanan sebanyak 194 unit. Adapun realisasi perkembangan CBIB periode tahun 2015 sebagai berikut.

Tabel 16. Perkembangan Sertifikasi CBIB Periode Tahun 2015

LAPORAN TAHUNAN 2015

No	Tahun	Target	Penilaian CBIB	Realisasi
1	2015 Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4	130 Unit	58 Unit 12 Unit 56 Unit 68 Unit	58 Unit 12 Unit 56 Unit 68 Unit
Jumlah		130 Unit	194 Unit	194 Unit

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

2. Sertifikasi CPIB

Upaya dalam rangka meningkatkan kualitas benih ditempuh dengan menerapkan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan sebagai langkah awal melatih petugas atau operator perbenihan menjadi Manajer Pengendali Mutu (MPM) CPIB. Adapun realisasi Pembina Mutu Perbenihan sampai tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Daftar Nama - Nama Manajer Pengendali Mutu (MPM) pada Unit Perbenihan di Sulawesi selatan sampai Tahun 2015

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Alamat	Ket
1	Muh. Furqun Ramdani	PT. Jajaran Pantai Nusantara	Monumen Emmy Saelan IV No. 20 Mksr	BS
2	Andrew Tengawan	PT. Sentosa Takalar	Dusun Parappa, Desa Laguruda Kec. Mappasunggu, Takalar	BS SERT
3	Abdullah Fudail, S.Si	PT. Esaputli Prakarsa Utama	Dsn Jalange, Desa Mallawa, Kec. Mallusetasi, Kab. Barru	SERT/ISO
4	Ir. H. Muh. Ishak		Jl. A. Mappanyukki No 9 Mksr	
5	Fatimah Sakka		Jl. Prs Mks-Parepare Km 138	
6	Amri Said	UPR Cakkempong	Kel. Tassililu Kec. Sinjai Barat	BS
7	Alesman	PT. Saniri Jaya	Ujung Indah, Desa Cilellang Kec. Mallusetasi Kab. Barru	BS
8	Yulianto			
9	Bambang Kusbiantoro			
10	Margono	PT. Surya Monodon	Jl. Sangir No. 69 Mksr	BS
11	Arif Sudirman		Dsn. Sawakung, Desa Tamasaju, Kec. Galesong Utara Takalar	BS
12	Rizal, S.Pi	PT. Puncak Sinunggal	Jl. Prs Mksr-Parepare Kel. Mallawa Kab. Barru	BS
13	Asse Bandu	UPR Mattapa	Desa Manurung Kec. Bola Kab. wajo	BS
14	Darmawan	UPTD PPBAT Lajoa Soppeng	Jennae, Lajoa Kabupaten Soppeng	BS
15	M. Hasby Rasyad S.Pi			
16	H. Abdullah, S.Pi			
17	Guno Gumelar	BBAP Takalar	Galesong Selatan Kab. Takalar	BS
18	Mutmainna		Ujung Indah, Desa Cilellang Kec. Mallusetasi	BS
19	Sirajuddin, S.St.Pi		Galesong Selatan Kab. Takalar	BS
20	Muh. Darwis Nur	Backyard UD. Anugrah Bumi Hero Barru	Kabupaten Barru	BS
21	Christhoper, SE	PT. Andatu Pinrang	Suppa Kabupaten Pinrang	BS
22	Pangki Panar	UPR Tang Okke Sidrap	Kabupaten Sidrap	BS
23	Masyur Amin, S.Pi	BBi limbung Kab. Gowa	Kabupaten Gowa	BS
24	Kail Yasir, S.Pi	UPTD BBI Ompo	Kab. Soppeng	BS
25	Baharuddin, SP	BBi Kalosi Alau, Kab. Sidrap	Kab. Sidrap	

Lanjutan.....

No	Nama	Instansi/Perusahaan	Alamat	Ket
26	Ir. Muh. Saleh	UD. Mahkota Windu Pinrang	Suppa, Kab. Pinrang	BS
27	Mirayanti	PT. Phisindo	Kab. Barru	BS
28	M. Natsir, S.Pi	BBI Bontomanai Kab. Gowa	Bontomanai, Kab. Gowa	BS
29	Ir. Andi Mustamin, MP	BBU Bojo Barru	Bojo, Kab. Barru	BS
30	Bahtiar Abtar	PT. Hakata Marine Barru	Kab. Barru	BS
31	Ashar Rijal, Spd	UPR Mamminasae Kab. Soppeng	Jennae, Kab. Soppeng	BS
32	Ir. Taufik Sabir	Hatchery Mini Mandiri Pinrang	Suppa Kab. Pinrang	BS
33	Abdul Salam Nurdin	UD. Sinar Benur Lembac	Kab. Barru	BS
34	H. Rijal Nappa	Backyard Sinar Baru Takalar	Kab. Takalar	BS

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Catatan : BS = Belum Sertifikasi

Sert/Iso = Sertifikasi/Iso

BP Sert = Belum Perpanjangan Sertifikasi

Adapun realisasi dari sertifikasi CPIB sampai dengan Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 18. Daftar Unit Pembenihan yang Bersertifikat CPIB Sulawesi selatan Tahun 2015

No	Kabupaten	Unit Pembenihan	Komoditas	Grade
1	Barru	1. HSRT Turikale (Aziz, M) 2. HSRT Bintang Benur (Taufik Hidayat) 3. HSRT Siperennu Benur (Marwan) 4. HSRT Arkan Benur (Asri) 5. HSRT Nadia Benur (Suparman) 6. HSRT Aldi Putra Benur 7. HSRT Naufa Benur 8. HSRT Anugerah Benur 9. HSRT Anugerah Bumi Hero 10. HSRT Halim Asri Bahari 11. HSRT Nur Rahmat Benur Palie (NBP) 12. CV. Saniri Jaya 13. HSRT Aura Benur 14. UPTD PPBL DKP SulSel 15. HSRT Benur Afiat 16. HSRT Rezky Bersama 17. HSRT Armina Benur Palie 18. UD. Segar 19. HSRT Benur Bahari 20. HSRT Rezky Benur mandiri 21. HSRT Windu Pasifik 22. PT Esaputli Prakasa Utama 23. UPTD BPPBLP Bojo DKP SulSel	Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Vannamae Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Windu Udang Vannamae Udang Windu	Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik Sangat Baik Baik Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Sangat Baik Baik Baik
2	Wajo	UPTD Kalola	Ikan Mas	Sangat Baik
3	Pinrang	1. UD. Buana Windu 2. Benur Utama 3. HSRT Mahkota Windu	Udang Windu Udang Windu Udang Windu	Baik Sangat Baik Baik
4	Takalar	1. HSRT Lim Sejahtera 2. HSRT Diamond Benur Mappakalombo	Udang Vannamei Udang Windu	Cukup Sangat Baik
5	Palopo	UPTD BBI Salupao DKP Palopo	Ikan Mas	Baik

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

3. Sistem Pengendalian OIKB (Obat Ikan, Kimia dan Bahan Biologi)

Pengembangan Sistem Pengendalian OIKB diimplementasikan dalam 3 (Tiga) kegiatan pokok yaitu 1) Pelayanan Pendaftaran Obat Ikan, 2) Perizinan Usaha Obat Ikan dan 3) Pembinaan, Pemantauan (Pengendalian) dalam hal penyediaan dan Peredaran OIKB.

Adapun hasil Monitoring OIKB di tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Tabel 19. Hasil Monitoring dan Surveillance OIKB Pada Distributor & Toko/Depo Obat Ikan - DKP Provinsi Sulsel Tahun 2015

No	Objek Pantauan	Alamat	Nama OIKB	Produsen	Keterangan
A	Distributor				
1	PT. Bina San Prima	Jl. Yos Sudarso, 27 Mksr	<ul style="list-style-type: none"> - Bioivit Aquatic - C-san Aquatic - Destan Aquatic - Ex-Am Aquatic - Premium - C Aquatic - Protect Aquatic - Thionil Aquatic - San O₂ Aquatic - Probiobac Aquatic 	PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Caprifarmino Labs	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar
B	Toko/Depo				
1	Toko Wira Tani	Jl. Mangga No. 64 Palopo	<ul style="list-style-type: none"> - Ursal - EM4 - Lakonin (Serbuk Biji Teh) 	CV. Bunga Tani PT. Songgo Langit	Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan
2	Toko Tani Putra	Jl. Yos Sudarso Palopo	<ul style="list-style-type: none"> - Bentan - Raphane (Cair) - Green Tama (Pupuk Cair) - Lodan - Ursal - Raja Bandeng - Color Maid 	CV. Agro Nusantara CV. Scorlet CV. Putra Agro Mandiri CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Tdk Terdaftar
3	Toko Ikram	Suli, Kec. Suli Kab. Luwu	<ul style="list-style-type: none"> - Benstan - Pegasus - Raja Bandeng - Lakonin (Serbuk Biji Teh) 	CV. Agro Nusantra CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan
4	Toko Karya Sejahtera	Pasar Belopa Luwu	<ul style="list-style-type: none"> - Dursban - Raphane (Cair) - Raja Bandeng 	CV. Scorlet CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
5	Toko Tunas Tani	Jl. Pasar Sentral Sinjai	<ul style="list-style-type: none"> - Bio Sulation - Super NB - Raja Bandeng 	PT. Marindo Lab PT. Songgo langit PT. SHS	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
6	Toko Tani Abadi	Jl. Lasinrang Pare-Pare	<ul style="list-style-type: none"> - Eornakol (bubuk) - EM4 - Raja Bandeng - Lodan - Lakonin (Serbuk Biji Teh) - Benstan 	CV. Scorlet PT. Songgo Langit CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Agro Nusantara	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar Terdaftar Diizinkan digunakan
7	Toko Harapan Tani	Jl. A. Makkasau Pinrang	<ul style="list-style-type: none"> - Ursal Cair - Lodan - Raja Bandeng - Eotnakol (bubuk) - Petrogrow 	CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Bunga Tani CV. Scorlet PT. Petrokimia Kayaku	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar

Lanjutan.....

No	Objek Pantauan	Alamat	Nama OIKB	Produsen	Keterangan
8	Toko Tani	Jl. Poros Barru	- Dursban - Raphane (Cair) - Raja Bandeng	- CV. Scorlet CV. Bunga Tani	Tdk Terdaftar Tdk Terdaftar Terdaftar
9	Toko Medicapit	Jl. Kemakmuran Kab. Pangkep	- C- San Aquatic - Destan Aquatic - Ex-Am Aquatic - Premium – C Aquatic - Protect Aquatic - Thionil Aquatic - San O ₂ Aquatic - Probiobac Aquatic	PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Sanbe Farma PT. Caprifarmindo Labs	Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar Terdaftar

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Dalam upaya pengembangan sarana dan prasarana budidaya masih banyak permasalahan ataupun kendala yang dihadapi diantaranya sebagai berikut:

- Khususnya untuk pengembangan parasarana baik perbenihan maupun irigasi alokasi dana yang tersedia masih sangat kecil. Sehingga upaya untuk mengoptimalkan kondisi fasilitas atau bangunan prasarana tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama karena terkendala dana yang minim.
- Dalam pelaksanaan pengembangan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sebagian besar petani pembudidaya ikan belum mengetahuinya, walaupun sosialisasi telah dilakukan namun ini hanya terbatas pada petani tertentu saja.
- Pengendalian distribusi OIKB juga belum optimal dilakukan terutama terhadap Depo/Toko Obat Ikan yang berada dikab/kota karena keberadaan depo/toko obat ikan tersebut bukan spesifik menjual kebutuhan untuk budidaya perikanan saja.

4.4.2. Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

a. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan APBN

1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Akses KUR Sektor Kelautan dan Perikanan

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Sebagai upaya pemerintah membuka peluang akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan melalui alternatif sumber permodalan baik sumber permodalan konvensional maupun kredit komersil, 2). Mensosialisasikan berbagai alternatif sumber permodalan bagi nelayan dan petani ikan sebagai jalan untuk mengambil kredit pinjaman dari bank yang difasilitasi oleh pemerintah, 3) Mengkoordinasikan kebutuhan dan permasalahan permodalan yang ada di daerah, 4). Mempersiapkan data calon debitur potensial dalam rangka persiapan pembiayaan usaha penangkapan ikan.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Akses KUR Sektor Kelautan dan Perikanan sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang berasal dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota se Sulsel, UKM, Pengusaha dan Nelayan.

Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat diambil kesimpulan bahwa :
1). Diharapkan pembangunan kelautan dan perikanan berbasis wilayah dilakukan dengan pendekatan dan sistem manajemen kawasan dengan prinsip integritas, efisiensi, kualitas dan akselerasi, 2). Pemberdayaan masyarakat melalui pendampingan merupakan suatu upaya untuk mempersiapkan masyarakat melalui penguatan kelembagaan usaha masyarakat

2. Pelaksanaan Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Wanita Nelayan

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1). Meningkatkan pengetahuan, keterampilan wanita nelayan, 2). Merubah sikap dan pola pikir kearah yang lebih maju para wanita nelayan, 3). Dapat meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan kelompok dan anggotanya.

Peserta yang hadir pada pertemuan Pelaksanaan Kegiatan Diversifikasi Usaha Nelayan dan Wanita Nelayan sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang yang berasal dari 11 (Sebelas) Kelurahan/Desa Kabupaten Bantaeng.

Dengan selesainya pertemuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai wanita nelayan yang suami atau keluarganya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, agar pada musim paceklik tiba mereka memiliki sumber penghasilan lain untuk mempertahankan ekonomi keluarga.

3. Pertemuan TOT Aplikasi PUPI

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi PUPI untuk administrator dan penggunaan, 2). Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan aplikasi PUPI

Peserta yang hadir pada pertemuan TOT Aplikasi PUPI sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang yang berasal dari instansi terkait Kab/Kota se Sulawesi Selatan.

Adapun kebutuhan system pencetakan Kartu Nelayan berupa perangkat keras/Hardware yaitu Komputer (Processor Intel p4, Hard Disk Space 128 MB, Memory 521 MB), Printer Kartu, Jaringan Internet, Blangko Card (PVC UK : 86 MM x 55 MM), perangkat lunak yaitu aplikasi printing kartu nelayan 1.3 keterampilan/Brainware yaitu mengerti system informasi dan bisa mengatasi trouble shooting.

4. Pertemuan Rencana Pengembangan Lembaga Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Fasilitas Intermediasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Mengidentifikasi jenis-jenis kearifan lokal serta manfaatnya, baik yang masih lestari maupun yang hampir punah, 2). Melakukan inventarisir yang selanjutnya dilakukan penguatan dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan serta masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal dan pengembangan budidaya bahari.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Rencana Pengembangan lembaga Sosial Budaya Masyarakat Pesisir Fasilitas Intermediasi sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang yang berasal dari instansi terkait Kab/Kota se Sulawesi Selatan.

Dengan selesainya pertemuan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Kearifan lokal adalah seperangkat pengetahuan yang dikembangkan oleh suatu kelompok masyarakat setempat yang terhimpun dari pengalaman panjang menggeluti alam dalam ikatan hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak secara berkelanjutan dan dengan ritme harmonis, 2). Suku Bajo adalah sekelompok masyarakat yang berabad-abad telah hidup dan menggunakan hidupnya pada laut, 3). Nelayan adalah sekelompok masyarakat yang hidup dari sumberdaya hayati laut tetapi kehidupannya tidak sepenuhnya tergantung pada laut.

5. Pelatihan Fasilitas Intermediasi

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Mengidentifikasi jenis-jenis kearifan lokal serta manfaatnya, baik yang masih lestari maupun yang hampir punah, 2). Melakukan inventarisir yang selanjutnya dilakukan penguatan dalam rangka meningkatkan peran kelembagaan serta masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal dan pengembangan budidaya bahari.

Peserta yang hadir pada Pelatihan Fasilitas Intermediasi sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang yang berasal dari instansi terkait Kab/Kota se Sulawesi Selatan.

Dengan selesainya Pertemuan Pelatihan Fasilitas Intermediasi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Dibutuhkan sinergitas dan dukungan terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, 2). Penyesuaian terhadap program kegiatan, arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan, perikanan dan pulau-pulau kecil, 3). Peningkatan pengembangan pembangunan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil.

6. Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah SeHAT Nelayan

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1). Memberikan kepastian/status hukum atas kekayaan (asset) milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, 2). Meningkatkan kepastian usaha nelayan melalui kepemilikan asset berupa tanah yang dapat didayagunakan sebagai agunan untuk mengakses permodalan, 3). Meningkatkan minat dan kepercayaan lembaga keuangan/perbankan untuk menyalurkan kredit kepada nelayan kecil, 4). Memberikan jaminan pada nelayan untuk meningkatkan kualitas permukiman yang layak, permanen dan sehat.

Peserta yang hadir pada pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah SeHAT Nelayan sebanyak 65 orang peserta yang terdiri dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota dan Badan Pertanahan Nasional Kab/Kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Dengan selesainya pertemuan Monitoring dan Evaluasi Program Sertifikasi Hak Atas Tanah SeHAT Nelayan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1). Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta SeHAT tingkat Provinsi, 2). Melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta bersama pokja Kab/Kota, 3). Menghimpun daftar peserta dari masing-masing kab/kota dan mengirim kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap cq. Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat, 4). Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

7. Pertemuan Sosialisasi sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan

Kegiatan pertemuan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) nelayan yang dilaksanakan di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan antara lain : Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Barru, Kabupaten Pinrang, kabupaten Luwu, Kota Palopo, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah agar nelayan dapat memiliki agunan yang bisa dijadikan jaminan untuk mengakses permodalan ke perbankan atau lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan usahanya, sedangkan kegiatan sertifikasi hak atas tanah nelayan dimaksudkan untuk meningkatkan status hukum hak atas tanah milik nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif menjadi modal aktif, yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank.

Dengan selesainya Pertemuan Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dapat ditarik kesimpulan bahwa usaha penangkapan ikan skala kecil diharapkan dapat membantu nelayan dan usaha penangkapan skala kecil mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Peran dan keikutsertaan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan melalui koordinasi yang sinergi, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan maupun pelaporan.

Kegiatan APBD

1. Dari Pelatihan Pembinaan kelembagaan Kelompok

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota kelompok tentang manfaat dalam Kelompok Usaha Bersama, 2) Penguatan Kelembagaan Kelompok dengan upaya menyamakan persepsi tentang manajemen usaha yang dikelola berdasarkan azas-azas yang ditetapkan pada kelompok usaha bersama, 3) Mengetahui peluang dan potensi pasar.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Pembinaan Kelembagaan Kelompok sebanyak 50 (lima Puluh) orang yang terdiri dari Kelompok Usaha Bersama Kota Makassar, yang pada umumnya sebagai nelayan, serta calon penerima paket bantuan bidang perikanan tangkap.

Dengan selesainya pertemuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pengembangan KUB dan pemanfaatan Akses Permodalan dikab/kota, diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi peserta, sehingga tujuan utama dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi serta manajemen KUB dapat tercapai.

2. Pertemuan Diversifikasi Usaha Nelayan (Kab. Jeneponto Selayar dan Takalar)

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan, 2). Menurunnya jumlah nelayan penuh, 3). Bertambahnya jumlah nelayan sambilan utama, menurunnya jumlah nelayan sambilan.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Diversifikasi Usaha Nelayan sebanyak 50 (Lima Puluh) orang

Dengan selesainya pertemuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai wanita nelayan yang suami atau keluarganya memiliki mata pencarian sebagai nelayan, agar pada musim paceklik tiba mereka memiliki sumber penghasilan lain untuk mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga nelayan, diperlukan kontribusi wanita nelayan dalam menciptakan dan mengelola usaha ekonomi produktif sebagai mata pencarian alternatif.

3. Pertemuan Teknologi Peningkatan Produksi Garam (Kab. Jeneponto, Selayar Takalar, Kota Makassar)

Tujuan dari kegiatan ini adalah 1). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi petani garam tentang penerapan teknologi Ulir dan Filter (TUF.12) pada lahan garam rakyat, 2). Menyamakan persepsi tentang manfaat teknologi TUF dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam yang sesuai dengan standarisasi garam industri, dalam rangka Swasembada Garam Industri Tahun 2015, 3). Mengetahui peluang pasar garam industri

Peserta yang hadir pada Pertemuan Teknologi Peningkatan Produksi Garam yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yang merupakan petani usaha garam rakyat yang berdomisili di daerah sentra program PUGAR, yang pada umumnya berprofesi sebagai penggarap/petani garam, dan KUGAR penerima bantuan langsung mandiri tahun 2015.

Dengan terlaksananya kegiatan Pertemuan Teknologi Peningkatan Produksi Garam pada sentra PUGAR di kabupaten Jeneponto, diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi peserta, sehingga tujuan utama dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi petambak garam rakyat dalam peningkatan kualitas dan kuantitas produksi garam dapat tercapai dengan baik.

4. Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Masyarakat Pesisir

Tujuan dari kegiatan ini adalah Memfasilitasi akses permodalan dengan layanan jasa keuangan bagi kelompok usaha penangkapan ikan serta akses pemasaran baik didalam maupun diluar daerah.

Peserta yang hadir pada pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Masyarakat Pesisir sebanyak 60 (Enam Puluh) orang yang terdiri dari nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Dengan terlaksananya kegiatan Pertemuan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha Masyarakat Pesisir, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1). Pemerintah dalam mendampingi menyiapkan kelompok usaha bersama untuk mengembangkan kegiatan usahanya, 2). Memfasilitasi serta pendampingan kelompok usaha dengan konsultan keuangan mitra bank (KKMB) dan mensinkronkan beberapa program Modal pemerintah yang berkelanjutan, 3). Menyiapkan regulasi untuk menciptakan iklim usaha yang baik dan mengawal pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, 4). Memonitor usaha masyarakat dengan mengevaluasi usaha dan pelaku usaha dan menginventarisasi jenis usaha dan pelaku usaha.

5. Pertemuan Fasilitas Akses Modal Usaha Masyarakat Pesisir

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Mensosialisasikan berbagai alternatif permodalan bagi penerima anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang telah difasilitasi oleh pemerintah, 2). Mengkoordinasikan kebutuhan dan permasalahan permodalan yang dihadapi oleh setiap anggota KUB yang ada didaerah khususnya wilayah pesisir, 3). Mempersiapkan data calon debitur yang potensial dalam rangka persiapan pembiayaan usaha penangkapan ikan didaerah.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Fasilitas Akses Modal Usaha Masyarakat Pesisir sebanyak 30 (Tiga Puluh) Orang yang berasal dari masyarakat pesisir yang tergabung dan terdaftar sebagai anggota KUB dan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng

6. Pertemuan Validasi Aplikasi Data Kelompok usaha Bersama (KUB)

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1). Validasi data KUB yang potensial untuk ditumbuhkan menjadi koperasi, 2). Meningkatkan kemampuan KUB dalam mengelola, baik dalam hal kelembagaan maupun keuangan, 3). Meningkatkan kemampuan dan mengembangkan skala usaha perikanan tangkap sehingga lebih menguntungkan bagi anggotanya dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Validasi Aplikasi Data kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 62 (Enam Puluh Dua) orang yang berasal dari kabupaten/kota se Sulawesi Selatan.

Dengan selesainya pertemuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rangka pengembangan KUB dan pemanfaatan akses permodalan di Kab/Kota, diharapkan dapat memberikan manfaat dan nilai tambah bagi peserta, sehingga tujuan utama dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi serta manajemen KUB dapat tercapai.

7. Pertemuan Fasilitas Kelompok usaha Bersama Mandiri

Tujuan dari kegiatan ini adalah : 1) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi anggota kelompok tentang manfaat dalam Kelompok Usaha Bersama, 2). Penguatan kelembagaan kelompok dengan upaya menyamakan persepsi tentang manajemen usaha yang dikelola berdasarkan azas-azas yang ditetapkan pada kelompok usaha bersama, 3). Mewujudkan kemandirian kelompok usaha bersama dalam bentuk koperasi.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Fasilitas Kelompok Usaha Bersama mandiri sebanyak 60 (Enam Puluh) orang yang terdiri dari Kelompok Usaha Bersama

diKab/Kota, yang pada umumnya sebagai nelayan, yang merupakan calon penerima paket bantuan bidang perikanan tangkap untuk tahun anggaran 2016.

8. Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Asuransi Kapal Nelayan dan Asuransi Nelayan.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menberikan informasi dan pengetahaun bahwa kegiatan usaha penangkapan ikan merupakan pekerjaan yang memiliki resiko tinggi, dan tingkat kecelakaan kerja usaha penangkapan ikan yang mengakibatkan cacat fisik dan kematian masih cukup besar, sehingga untuk menanggulangi resiko social ekonomi yang dihadapi nelayan selama menjalankan kegiatan usaha penangkapan ikan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cacat fisik dan kematian ada pemberian jaminan/perlindungan perekonomian bagi nelayan dan keluarganya dalam kelangsungan hidupnya.

Peserta yang hadir pada Pertemuan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir melalui Asuransi Kapal Nelayan dan Asuransi Nelayan sebanyak 100 (Seratus)orang yang merupakan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/kota dengan mengikut sertakan masyarakat nelayannya.

Dengan selesainya pertemuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Nelayan yang memiliki asuransi jiwa selama melaut akan merasa memiliki perlindungan dan keluarga yang ditinggalkan akan memperoleh jaminan uang santunan jika keluarga mereka yang berprofesi sebagai nelayan mengalami musibah atau kecelakaan kerja saat melaut.

Permasalahan dan upaya pemecahan

Permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2015 ini adalah masih banyaknya program yang terlambat pencairan dana atau anggarannya segingga sedikit banyaknya dapat berpengaruh pada jadwal kegiatan khususnya pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jika hal ini bisa teratasi maka besar kemungkinan kegiatan yang telah terjadwal ini dapat berjalan sesuai dengan waktunya.

Permasalahan lainnya adalah potensi lahan yang tersedia ditiga kabupaten (Kab. Jeneponto, Takalar dan Pangkep) cukup besar kurang lebih sebesar 1.869 Ha, hal yang berpotensi dalam peningkatan produksi garam di Sulawesi Selatan. Permasalah yang timbul saat ini adalah kualitas produksi garam yang dihasilkan belum memenuhi kualitas standar (Kw 1) dengan kandungan NaCl > 90 %.

B. Seksi Kelautan dan Konservasi

Kegiatan APBD

1) Bimtek Rehabilitasi dan Konservasi pada Kawasan yang Terdegradasi Berat

- ✦ Pertemuan Bimtek Rehabilitasi dan Konservasi pada Kawasan yang Terdegradasi Berat Satker Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dilaksanakan pada tanggal 1 April 2015 bertempat di Desa Babang, Kabupaten Luwu
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah 1). Memberikan penyadaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan wilayah pesisir, 2). Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam upaya melakukan aktifitas pelestarian lingkungan, khususnya dalam upaya rehabilitasi dengan melakukan penanaman mangrove.
- ✦ Kegiatan ini diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten Luwu, aparat kecamatan, aparat desa, dan masyarakat (Kelompok Masyarakat Pelestari Lingkungan).
- ✦ Rekomendasi dari kegiatan ini adalah bahwa kegiatan bimtek merupakan salah satu upaya peningkatan kepedulian dan keterampilan masyarakat dalam upaya pencegahan pencemaran lingkungan di wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, untuk itu kegiatan seperti ini dalam secara rutin dilakukan oleh pihak pemerintah di wilayah-wilayah pesisir lainnya.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya daya dukung dan peran serta masyarakat untuk mewujudkan upaya pencegahan pencemaran lingkungan.

2) Pertemuan Koordinasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD)

- ✦ Kegiatan Pertemuan Koordinasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 13 April 2015 bertempat di Desa Lasitae, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru
- ✦ Tujuan kegiatan ini adalah untuk mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan; memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait dengan KKPD; dan mendorong dan menginisiasi terbentuknya KKPD.
- ✦ Pertemuan Koordinasi Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ini diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) orang peserta yang terdiri dari DKP Kabupaten

Barru, Aparat Kecamatan Tanete Rilau, Aparat Desa Lasitae, Kelompok Pengawasa dan Masyarakat Nelayan.

- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah agar pemerintah Kabupaten Barru dapat menyediakan kawasan perairannya untuk menjadi Kawasan Konservasi Perairan (KKP) sebagai lahan yang dapat mendukung pengelolaan dan pemanfaatan perikanan berkelanjutan.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah berkembangnya kawasan konservasi perairan yang dikelola secara bijaksana dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) *Penanaman Mangrove*

- Penanaman Mangrove dilaksanakan pada bulan April 2015, berlokasi di Desa Babang (Dusun Aou), Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan
- Tujuan dari kegiatan ini adalah melestarikan fungsi dan kemampuan sumberdaya ekosistem mangrove guna menjalin kesinambungan dan pemanfaatannya dengan tetap berpedoman pada asas manfaat dan kaidah-kaidah pelestarian sumberdaya alam; memulihkan fungsi dan peran ekosistem mangrove sebagai pelindung pantai dari abrasi, sunami, degradasi dan erosi pantai; penanaman kembali pohon bakau disepanjang garis pantai; dan terciptanya kawasan yang dilindungi oleh jalur hijau.
- Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya wilayah pesisir dari kerusakan lingkungan seperti pencemaran, abrasi dan sebagainya.

4) *Sinkronisasi Data Statistik KP3K*

- Sinkronisasi Data Statistik KP3K dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 di ruang Pertemuan DKP Provinsi Sulawesi Selatan
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara dinas yang membidangi kelautan dan perikanan ditingkat provinsi, kab/kota dalam rangka mendukung statistik kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KP3K) yang lebih berkualitas.
- Sinkronisasi Data Statistik KP3K diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) Orang peserta yang terdiri dari pengelola statistik KP3K provinsi dan Kab/Kota.
- Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlu adanya pengumpulan data di kab/kota secara berkelanjutan untuk dapat menjadi sumber informasi dalam perencanaan program kelautan dan perikanan.

- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat dengan terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang bertanggung jawab yang berpedoman pada rencana strategis yang telah dibuat.

5) *Kajian Potensi Tingkat Pencemaran terhadap Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kota Makassar*

- ✦ Kegiatan Kajian Potensi Tingkat Pencemaran terhadap Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kota Makassar dipihak ketigakan kepada Puslitbang Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin pada Bulan Oktober dan November 2015 diperairan kota Makassar.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi potensi-potensi kegiatan antropogenik yang dapat mencemari perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disekitar Kota Makassar
- ✦ Dari kegiatan Kajian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :
 - Wilayah pesisir kota Makassar sangat rentang mendapatkan pencemaran akibat kegiatan-kegiatan antropogenik baik oleh kegiatan rumah tangga, perkantoran, pariwisata maupun industri.
 - Kondisi ekosistem pesisir kota Makassar sejauh 5 Km kearah laut umumnya telah rusak kecuali ekosistem mangrove diwilayh Untia dan Barombong.
 - Kondisi parameter fisika dan kima perairan cenderung dibawah nilai ambang batas untuk menunjang kelangsungan hidup dan pertumbuhan biota pada ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil
 - Parameter kualitas air logam berat sudah terdeteksi diperairan pesisir kota Makassar yang mengidentifikasikan perairan tercemar
- ✦ Adapun saran yang diberikan adalah :
 - Perlunya rehabilitasi lingkungan berupa penanaman mangrove disepanjang pesisir untuk mereduksi berbagai pencemaran yang terdapat diperairan;
 - Pelaksanaan dan pengawasan penerapan Amdal/UKP-UPL bagi berbagai kegiatan usaha yang memanfaatkan pesisir dan laut wajib dilakukan untuk memberikan jaminan kualitas lingkungan agar tidak mengalami kerusakan;

- Pengolahan limbah baik aktivitas rumah tangga, perkantoran, industri maupun kegiatan pariwisata dan perikanan/kelautan mutlak dilakukan untuk menekan limbah yang masuk keperairan;
- Pelibatan masyarakat penting menjaga pesisir dan kelautan.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat dan isu bencana pencemaran, selain itu akan menjadi proses pembelanjaan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mengenali potensi pencemaran yang ada disekitar mereka sehingga akan menghasilkan program penanggulangan pencemaran perairan yang efektif dan optimal.

6) *Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem*

- ✦ Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 di Pulau Cambang-Cambang dan Cangke Kabupaten Pangkep.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya kelestarian suatu ekosistem; Membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi dalam melakukan gerakan rehabilitasi dan pengelolaan ekosistem pesisir dan laut yang bertanggung jawab; dan memberi motivasi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan upaya pengawasan yang berbasis masyarakat terhadap praktek yang sifatnya "Destructive"
- ✦ Kegiatan Sosialisasi Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Ekosistem diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) orang, yang terdiri dari DKP Kabupaten Pangkep, Aparat Kecamatan dan Desa, Tokoh Masyarakat dan Nelayan.
- ✦ Rekomendasi yang diberikan dari kegiatan ini adalah perlunya koordinasi dan kerjasama yang baik antara stakeholders terkait dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
- ✦ Manfaat kegiatan ini terciptanya ketahanan lingkungan di wilayah pesisir karena meningkatnya kepedulian masyarakat akan kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

7. *Pengadaan Tukik Penyu pada Ekosistem yang disesuaikan di Kabupaten Pangkep*

- ✦ Kegiatan Pengadaan Tukik Penyu pada Ekosistem yang disesuaikan di Kabupaten Pangkep dipihak ketigakan oleh CV. Karya Sejahtera dengan lokasi kegiatan di Pulau Cangke Kabupaten Pangkep pada bulan Oktober – November 2015

- Tujuan dari kegiatan ini adalah : sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung pelestarian satwa langka; salah satu upaya membantu memperbesar peluang hidup penyu di habitat alaminya; dan menumbuhkan kesadaran serta kecintaan terhadap satwa yang harus dilestarikan keberadaannya agar tidak punah.
- Manfaat kegiatan ini adalah terjaganya keberadaan spesies penyu di perairan yang tetap menjamin keseimbangan alam.

8. Pembuatan Artificial Reef (Rumah Ikan) di Kota Makassar

- Pelaksanaan kegiatan ini di pihak ketigakan yang dikerjakan oleh CV. Rimpa dengan lokasi kegiatan di Perairan Barrang Lompo Kota Makassar pada bulan Agustus – Oktober 2015
- Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah sebagai upaya menjadikan daerah karang sebagai tempat koloni ikan dan biota laut lainnya yang dalam jangka panjang struktur bangunan terumbu buatan akan ditumbuhi tumbuhan laut dan karang alami.
- Manfaat kegiatan ini adalah meningkatnya perekonomian masyarakat wilayah pesisir dalam rangka menciptakan objek wisata bahari bawah laut selain itu memberikan fungsi mitigasi bencana dalam mencegah terjadinya abrasi pantai.

9. Pembuatan Mooring Buoy di Kawasan Kepulauan Spermonde Makassar

- Pelaksanaan kegiatan ini di pihak ketigakan yang dikerjakan oleh CV. Adi Karya Pratama dengan lokasi kegiatan di perairan Spermonde Makassar pada bulan Oktober – November 2015
- Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah mengadakan tempat penambatan kapal untuk meminimalisir kerusakan terumbu karang akibat penggunaan jangkar.
- Manfaat kegiatan ini adalah menurunnya tingkat kerusakan karang akibat jangkar kapal.

10. Pertemuan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan KKP

- Kegiatan pertemuan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan KKP dilaksanakan pada hari Sabtu Tanggal 5 Desember 2015 di Hotel Grand Irmawan, Jl. Pengayoman No. 36 Mksr.
- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, pemahaman dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang Kawasan Konservasi Perairan;

dan untuk mensosialisasikan kegiatan konservasi perairan di wilayah perairan Provinsi Sulawesi Selatan.

- ✦ Kegiatan pertemuan ini diikuti oleh 80 (Delapan Puluh) peserta yang terdiri atas BPSPL Makassar, Instansi terkait ditingkat Provinsi, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi, LSM dan Masyarakat.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan dan pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) dan selanjutnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan yang bertanggung jawab.

11. Workshop Pengembangan Pengelolaan Ekosistem Mangrove

- ✦ Kegiatan Workshop Pengembangan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dilaksanakan pada Hari Jumat tanggal 4 Desember 2015 di Hotel Grand Irmawan, Jl. Pengayoman No. 36 Makassar
- ✦ Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat terhadap perbaikan dan pemulihan lingkungan; agar terwujud pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan di provinsi Sulawesi Selatan; dan meningkatkan pemahaman dan pengetahuan para pengelola terhadap pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya ekosistem mangrove.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pengelolaan dan pemanfaatan ekosistem mangrove dan selanjutnya dapat mendukung ketahanan lingkungan pesisir dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan yang bertanggung jawab.

Kegiatan APBN

1. Penyiapan Daerah Terkait Dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

- ✦ Kegiatan Penyiapan Daerah Terkait dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 April 2015 bertempat di Hotel Grand Palace Makassar
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan reklamasi pantai dan agar tercipta pemahaman dari

peserta mengenai peraturan perundang-undangan yang harmonis dan selaras dan dapat diimplementasikan oleh pemerintah daerah beserta stakeholder.

- ✦ Peserta Kegiatan Penyiapan Daerah Terkait dengan Izin Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebanyak 35 (Tiga Puluh Lima) orang yang berasal dari BPSPL Makassar, Bappeda Provinsi, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman provinsi Sulawesi Selatan, Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD), DKP Sulsel, Kab/Kota dan Perguruan Tinggi.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terlaksananya pengembangan dan pembangunan diwilayah P3K yang bijaksana dan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pada khususnya.

2. Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Coremap-CTI

- ✦ Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Coremap-CTI dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 18 Mei 2015 bertempat di Hotel Grand Town Makassar
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melaksanakan koordinasi, pembinaan dan penanganan isu-isu yang berkaitan dengan kegiatan Coremap-CTI; agar terwujud pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan di provinsi Sulawesi Selatan.
- ✦ Peserta Koordinasi Kegiatan Coremap-CTI sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari BPSPL Makassar, BKPN Kupang, DKP Sulsel, DKP Kabupaten Pangkep dan Selayar, Instansi terkait di Tingkat Provinsi, Perguruan Tinggi dan Kelompok Masyarakat.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu pengelolaan dan pemanfaatan SDA di wilayah P3K khususnya ekosistem terumbu karang yang bertanggung dengan mengedepankan kelestarian dan keberlanjutan.

3. Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan

- ✦ Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan dilaksanakan pada Hari Senin, tanggal 15 Juni 2015 di Hotel Grand Celino, Jl Lanto Dg. Pasewang.
- ✦ Kegiatan ini bertujuan adanya persamaan persepsi dalam meningkatkan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian jenis ikan yang terancam punah, endemic dan langka
- ✦ Kegiatan Sosialisasi Perlindungan dan Pelestarian Jenis Ikan diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri atas BPSPL Makassar, DKP Provinsi Sulsel, Instansi terkait ditingkat Provinsi, DKP Kab/Kota dan Perguruan Tinggi.

- Manfaat dari kegiatan ini akan semakin meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan dan pelestarian terhadap jenis ikan yang terancam punah, endemic dan langka

4. Konsultasi Publik Pencadangan KKP

- Kegiatan Konsultasi Publik Pencadangan KKP Satker DKP dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 bertempat di Hotel Novena, Jl. Ahmad Yani No. 25 Kabupaten Bone
- Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pembahasan dalam membuat SK dan Finalisasi SK dalam upaya penetapan pencadangan KKP di wilayah perairan Teluk Bone.
- Peserta dari pertemuan ini adalah DKP Bone dan Sinjai, instansi terkait di tingkat kabupaten, Kepala Pemerintahan Kecamatan Pesisir Kabupaten Bone dan Sinjai, LSM dan Tokoh Masyarakat.
- Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu KKP yang terkelola dengan baik dan memberi manfaat yang bagi seluruh stakeholder tanpa terkecuali sehingga nantinya akan terwujud tujuan akhir dari suatu KKP adanya tercapainya kesejahteraan masyarakat.

5. Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil

- Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan pada hari Senin – Rabu, tanggal 3 – 5 Agustus 2015 di Hotel Sinjai dan Wisma Pertemuan Pulau Burung Loe, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai.
- Tujuan dari kegiatan ini adalah membentuk kelompok rehabilitasi dan mitigasi bencana/perubahan iklim di pulau-pulau kecil; meningkatkan kapasitas anggota kelompok rehabilitasi dan mitigasi bencana/perubahan iklim di pulau-pulau kecil dan mewujudkan kelompok rehabilitasi dan mitigasi bencana/perubahan iklim yang mandiri di pulau-pulau kecil.
- Peserta yang terlibat pada pertemuan ini antara lain : DKP Sinjai, Pemerintah Kecamatan Pulau Sembilan dan Masyarakat Pulau Burung Loe dan Kelompok Masyarakat.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah terwujudnya kelompok rehabilitasi dan kelompok mitigasi bencana/perubahan iklim yang mandiri di pulau-pulau kecil sehingga terciptanya pulau-pulau kecil yang memiliki ketahanan bencana/perubahan iklim.

6. Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Gugus Pulau

- Kegiatan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil Berbasis Gugus Pulau terdiri dari kegiatan persiapan, survey dan pengelolaan data, dan pembahasan laporan kegiatan. Kegiatan rapat persiapan dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015, disekretariat Tim Pokja RZWP3K, DKP Sulsel. Pelaksanaan Survey dilaksanakan pada akhir bulan Agustus 2015 dipulau Sabaru dan Sabalana Kabupaten Pangkep. Pengelolaan data hasil survey dilaksanakan pada bulan September - Oktober 2015. Dan Pertemuan Pembahasan Laporan Identifikasi dan Pemetaan Pulau-Pulau Kecil pada tanggal 16 November dan 27 November 2015 di Hotel D'Maleo Kota Makassar.
- Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan data dan informasi tentang potensi sumberdaya alam daratan, laut dan pesisir Pulau sabalana dan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkep; Mengidentifikasi berbagai peluang dan permasalahan dalam pengelolaan Pulau Sabalana dan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkep; dan memberikan arahan pengembangan dan pemanfaatan Pulau Sabalan dan Pulau Sabaru Kabupaten Pangkep.
- Arahan Program Pengembangan :
 - ❖ *Pulau Sabalana*
 - Melakukan studi " Penyusunan Rencana Startegi, Rencana Zonasi Rinci, Rencana Pengelolaan dan rencana aksi serta Bisnis Plan untuk pengembangan Pulau Sabalana dan perairan sekitarnya.
 - Melakukan rehabilitasi terhadap ekosistem mangrove dan terumbu karang di Pulau Sabalana.
 - Pembentukan dan penguatan kelembagaan kemasyarakatan dalam pengawasan sumberdaya alam dan usaha produktif.
 - Diversifikasi kegiatan ekonomi masyarakat.
 - ❖ *Pulau Sabaru*
 - Menjadwalkan patroli laut rutin oleh aparat keamanan dan patroli laut gabungan untuk menindak para pelaku illegal fishing terutama para perusak terumbu karang.
 - Melakukan studi Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Zonasi Rinci, Rencana Pengelolaan dan Rencana Aksi serta Bisnis Plan untuk pengembangan Pulau Sabaru dan perairan sekitarnya.

- Memberikan bantuan teknis berupa pelatihan manajemen dan teknologi budidaya perikanan dan penangkapan ikan ramah lingkungan dan berkelanjutan kepada para pembudidaya ikan dan nelayan sekitar Pulau Sabaru.
- Manfaat kegiatan ini tersedianya data dan peta potensi pulau-pulau kecil yang akurat selanjutnya akan memberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan dan stakeholder dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan pengembangan pulau-pulau kecil tersebut.

7. Konsultasi Publik Tindak Lanjut Penyusunan RZWP-3-K

- Konsultasi Publik Tindak Lanjut Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan satker DKP Sulsel dilaksanakan pada tanggal 9 September 2015 di Hotel D'Maleo, Jl. Pelita Raya I No I Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil sementara pelaksanaan penyusunan dokumen awal RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan dan menerima masukan untuk penyempurnaan RZWP-3-K provinsi Sulawesi Selatan
- Konsultasi Publik Tindak lanjut Penyusunan RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan diikuti oleh 41 (Empat Puluh Satu) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, DKP Sulsel, Instansi terkait ditingkat provinsi, Bappeda kab/Kota, DKP Kab/Kota, Tim Teknis RZ-WP3K Sulsel dan Kemitraan Bahari.
- Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelsetarian sumberdaya P3K.

8. Pembahasan Dokumen Awal RZWP-3-K Provinsi Sulawesi Selatan

- Pembahasan Dokumen Awal RZWP-3-K provinsi Sulawesi selatan Satker DKP Sulsel dilaksanakan sebanyak 2(Dua) kali pertemuan yaitu pada tanggal 29 Oktober 2015 di karebosi Condotel Jl. Jenderal M. Yusuf No. 1 dan pertemuan kedua di Hotel Grand Town Jl. Pengayoman Komp. Pasar Segar Blok E, No. 9B Makassar.
- Tujuan kegiatan ini adalah untuk menerima masukan-masukan dari Kab/Kota tentang lokasi-lokasi strategis yang berada di wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan belum terakomodir di draft RZWP-3-K yang disusun oleh Tim Pokja RZWP-3-K Sulsel.

- ✦ Pembahasan RZWP-3-K provinsi SulSel diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, DKP Sulsel, DKP Kab/Kota, Tim Teknis RZ-WP3K Sulsel, Dinas Perhubungan Sulsel, Perguruan Tinggi, Kemitraan Bahari dan LSM.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelsetarian sumberdaya P3K.

9. Konsultasi Publik RZWP-3-K

- ✦ Konsultasi Publik RZWP-3-K provinsi Sulawesi Selatan Satker DKP Sulsel dilaksanakan pada tanggal 27 November 2015, diHotel Grand Town Jl. Pengayoman Komp. Pasar Segar Blok E No. 9B Makassar.
- ✦ Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil sementara pelaksanaan penyusunan dokumen awal RZWP-3-K Provinsi Sulsel dan menerima masukan untuk penyempurnaan RZWP-3-K Provinsi Sulsel.
- ✦ Pembahasan RZWP-3-K provinsi SulSel diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari BPSPL Makassar, DKP Sulsel, DKP Kab/Kota, Tim Teknis RZ-WP3K Sulsel, Perguruan Tinggi, Kemitraan Bahari dan LSM.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah adanya Dokumen RZWP-3-K yang mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya WP3K yang optimal dan menjamin harmonisasi antara kepentingan pembangunan ekonomi dengan pelsetarian sumberdaya P3K.

10. Sosialisasi Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

- ✦ Kegiatan Sosialisasi jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Satker DKP dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 bertempat di Hotel Grand Town, Jl. Pengayoman Komp. Pasar Ikan Blok E, No. 9B.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman kepada stakeholders tentang manfaat adanya jejaring KKP untuk dapat meningkatkan peran serta stakeholders serta mengakomodasi isu-isu penting yang memiliki dampak terhadap pengelolaan kawasan konservasi perairan.

- ✦ Peserta yang ikut pada pertemuan ini sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang yang terdiri dari BPSPL Makassar, BKKN Kupang, DKP Sulsel, Instansi Terkait ditingkat provinsi, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan LSM
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu jejaring KKP yang terkelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat tanpa terkecuali sehingga nantinya akan terwujud tujuan akhir dari suatu KKPD adanya tercapainya kesejahteraan masyarakat.

11. Sosialisasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan

- ✦ Kegiatan Sosialisasi Pencadangan KKP Satker DKP dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 bertempat di Hotel Quality, Jl. Somba Opu No. 325. Makassar.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini melakukan pembahasan dalam membuat SK dan Finalisasi SK dalam upaya penetapan Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan/Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diwilayah perairan Teluk Bone.
- ✦ Sosialisasi Pencadangan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Satker Dinas Kelautan dan Perikanan diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari Instansi terkait ditingkat Provinsi. DKP Kab/Kota, aparat Kecamatan dan Desa di kabupaten Sinjai dan Bone serta LSM.
- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu KKP yang akan terkelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat tanpa terkecuali sehingga nantinya akan terwujud tujuan akhir dari suatu KKPD.

12. Konsultasi Publik Jejaring Kawasan Konservasi Perairan (KKP)

- ✦ Kegiatan Konsultasi Publik Jejaring KKP Satker DKP dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 17 November 2015 bertempat di Hotel D'Maleo, Jl. Pelita Raya I No. 1 Makassar.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menghimpun masukan/aspirasi dari stakeholder serta masyarakat di dalam maupun sekitar kawasan konservasi perairan dalam menyusun model pengelolaan kawasan konservasi laut yang baik secara lokal, regional serta nasional.
- ✦ Peserta yang ikut pada pertemuan ini sebanyak 30 (Tiga Puluh) orang terdiri dari BPSPL Makassar, DKP Sulsel, Instansi Terkait ditingkat provinsi, DKP Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan LSM.

- ✦ Manfaat kegiatan ini adalah terwujudnya suatu KKP yang akan dikelola dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat tanpa terkecuali sehingga nantinya akan terwujud tujuan akhir dari suatu KKPD

13. Fasilitasi dan Koordinasi Coremap-CTI

- ✦ Fasilitasi dan Koordinasi kegiatan Coremap-CTI ke 2 Satker DKP Prov. Sulsel dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 November 2015 bertempat di Hotel Same, Makassar.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan koordinasi program Coremap-CTI yang ada di kabupaten serta penanganan isu-isu lintas kabupaten yang berkaitan dengan kegiatan Coremap-CTI
- ✦ Peserta Koordinasi Kegiatan Coremap-CTI diikuti oleh 30 (Tiga Puluh) peserta yang terdiri dari DKP prov Sulsel, Instansi terkait di tingkat prov, Pelaksanaan Program Coremap-CTI di Kabupaten Pangkep dan Selayar, UPTD Pusat, Perguruan Tinggi dan LSM.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adanya koordinasi yang didukung dengan monitoring juga evaluasi kegiatan yang dapat mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program Coremap-CTI di Prov. Sulsel hingga tercapainya masyarakat yang sejahtera dengan mengedepankan pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berkelanjutan.

14. Promosi Investasi Pulau-Pulau Kecil

- ✦ Promosi Investasi Pulau-Pulau Kecil Satker DKP Prov. Sulsel dilaksanakan secara semi swakelola oleh DKP Sulsel, PT. Paraqita Mandiri Sejahtera dan TVRI Makassar pada Bulan September – Desember 2015 yang mengambil lokasi di Makassar dan Kabupaten Barru.
- ✦ Tujuan dari kegiatan ini adalah menyebarluaskan informasi dan memperkenalkan secara luas mengenai potensi dan peluang investasi di pulau-pulau kecil melalui kegiatan promosi berupa pameran atau festival dan publikasi dimultimedia.
- ✦ Manfaat dari kegiatan ini adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sejalan dengan makin minat investor untuk berinvestasi di pulau-pulau kecil khususnya di wilayah provinsi Sulawesi Selatan.

15. Penyusunan Strategi Pengembangan Wisata Bahari di Lautan dan Pesisir

- ✦ Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Wisata bahari di Lautan dan Pesisir Satker DKP Prov. Sulsel dilakukan pada bulan November – Desember 2015. Dimana kegiatan ini juga mencakup kegiatan

FGD Penyusunan Strategi Pengembangan Wisata Bahari dan FGD Penyusunan Profil Wisata Bahari yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 19 November 2015 di Hotel Grand Town, Makassar.

- Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan identifikasi potensi dan penyusunan strategi pengembangan wisata; melakukan penyusunan profil wisata bahari dilokasi prioritas; dan melakukan penyusunan strategi pengembangan wisata bahari dilokasi prioritas.
- Peserta yang dilibatkan pada pertemuan FGD dikegiatan Penyusunan Strategi Pengembangan Wisata Bahari diLautan dan Pesisir, masing-masing terdiri atas 30 (Tiga Puluh) peserta dari DKP prov. Sulsel, Instansi Terkait ditingkat provinsi, DKP Kab/Kota dan Perguruan Tinggi.
- Manfaat dari kegiatan ini adanya semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat sejalan dengan makin meningkatnya kunjungan wisata lokal dan mancanegara khususnya diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan

Pada pelaksanaan program kerja ditahun 2015, berbagai permasalahan yang didapatkan antara lain :

- ✘ Belum maksimalnya target peserta yang diharapkan kehadirannya di beberapa pertemuan.
- ✘ Pelaksanaan kegiatan di lapangan (dikabupaten) termasuk kegiatan survey dan monev pelaksanaannya masih terkendal/terhambat oleh kondisi cuaca.
- ✘ Keterlambatan beberapa proses administrasi kegiatan yang di pihak ketigakan.
- ✘ Adanya perubahan menu di TOR kegiatan APBN pada pelaksanaan kegiatan di pusat yang tidak diikuti perubahan di TOR di Provinsi (Kegiatan Promosi Investasi Pulau-Pulau Kecil).

Upaya pemecahan

Dalam memaksimalkan pencapaian target progran kerja yang telah direncanakan, beberapa upaya pemecahan permasalahan yang dilaksanakan antara lain:

- ✘ Memaksimalkan kehadiran peserta pertemuan dengan mendatangkan stakeholder yang terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- ✘ Mengkondisikan jadwal pelaksanaan survey dan monev dengan kondisi lapangan yang akan dikunjungi

- Memantau pelaksanaan untuk kegiatan yang dipihak ketigakan untuk memaksimalkan target yang diinginkan.
- Memaksimalkan output yang diinginkan dalam perencanaan kegiatan dalam hal ini kegiatan Promosi Investasi Pulau-Pulau kecil berupa bahan-bahan promosi yang direncanakan akan didistribusikan mengikut pada kegiatan-kegiatan pameran dilingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

4.4.3 Pengawasan dan Pengendalian SDKP

Tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan dibidang Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan adalah :

- Meningkatkan pelestarian SDKP melalui perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan dari kegiatan *Destructive fishing* dan *Illegal fishing*.
- Mewujudkan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Kelautan dan Perikanan.

Sasarn pembangunan kelautan dan perikanan bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan Sulawesi Selatan adalah : (1) Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP diwilayah pengelolaan perikanan Sulawesi Selatan secara terintegrasi, (2) Meningkatnya tertib usaha sesuai ketentuan, (3) Meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan yang bebas *Illegal fishing* dan *Destruktif fishing*, (4) Terlaksananya penyelesaian tindak pidana perikanan secara akurat dan tepat waktu.

Strategi pengawasan SDKP : (1) *Preventive* adalah pencegahan offense sebelum terjadinya pelanggaran diwilayah kelautan dan perikanan, (2) *Persuasif* adalah pembinaan terhadap pelaku untuk meningkatkan kesadaran tidak melanggar hukum, (3) *Responsif* adalah reaksi cepat dalam penanganan pelanggaran dan tindak pidana.

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang terdapat dalam pengawasan dan pengendalian SDKP yaitu :

a. Sarana dan Prasarana Pengawasan

APBN

Kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2015 pada seksi Sarana dan Prasarana Pengawasan adalah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Speed Boat meliputi perawatan rutin dan perbaikan Body Speed Boat. Untuk perawatan rutin meliputi pembelian bahan bakar, oli dan perawatan lainnya.

Untuk perbaikan speed boat tahun 2015 dilakukan dengan melibatkan pihak kedua mengingat besarnya perbaikan yang dilakukan yaitu :

- Penggantian lantai speed boat
- Penggantian tulang speed boat
- Pengecatan dalam dan luar body speed boat

Dari hasil perbaikan dan pemantauan yang dilakukan terdapat kemajuan yang sangat signifikan terhadap kondisi speed boat, dari yang semula tulang dan lantai keropos, maka setelah dilakukan perbaikan kondisinya sudah layak untuk melakukan kegiatan patroli pengawasan.

APBD

1. Kegiatan Inventarisasi, Identifikasi Data Sarana dan Prasarana Pengawasan

Maksud penyusunan laporan identifikasi sarana dan prasarana tahun 2015 DKP Prov. Sulsel dimaksudkan untuk mengidentifikasi data sarana dan prasarana pengawasan perikanan disetiap kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan

Tujuan disusunnya laporan identifikasi sarana dan prasarana pengawasan adalah untuk mengetahui tingkat pengelolaan pemanfaatan sarana dan prasarana pengawasan serta sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan yang dapat menunjang upaya dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pada pengawasan sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Adapun kabupaten/kota yang telah di Identifikasi Sarana dan Prasarana Sumberdaya Kelautan dan Perikanan selama tahun 2015 yaitu :

✿ Kabupaten Takalar

Tabel 20. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Takalar

No	Kab	Sarana Prasarana	Tahun	Jumlah	Lokasi
1	Takalar	- Pos Pemantauan	2009	3 Unit	Topejawam Lagardua, Bodia
		- Pos Pengawasan	2014	1 Unit	Ujung Baji
		- Kamera Nikon	2014	18 Buah	Untuk Kelompok
		- Handy Talky	2014	10 Buah	Untuk Kelompok
		- Perahu Jakpa	2013	5 Unit	Untuk Kelompok
		- Speed Boat	2014, 2011	2 Unit	Untuk Kelompok
		- Alat Pertukangan	2009	8 Buah	Untuk Kelompok
		- Baju Pelampung	2009	20 Buah	Untuk Kelompok

✿ Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan hasil Identifikasi ke Kabupaten Jeneponto dalam rangka inventarisasi dan identifikasi Pengawasan Sarpras diperoleh data bahwa kabupaten Jeneponto memiliki sarana dan prasarana seperti speedboat kapal pengawas senilai 6 M pada tahun 2009 dan sekarang sudah hilang, dan pos pengawas Tanrusape 1 buah.

Kabupaten Jeneponto memiliki daerah titik rawan illegal fishing berada di daerah perbatasan Takalar-Jeneponto tepatnya di daerah Bangkala, dan dari 10 Pokmaswas yang ada di Jeneponto, hanya Pokmaswas General yang aktif memberikan informasi kepada pejabat Pembina di DKP Kab. Jeneponto.

✿ Kabupaten Bantaeng

Berdasarkan hasil identifikasi ke Kabupaten Bantaeng, maka dapat dilaporkan sebagai berikut :

Tabel 21. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Bantaeng

No	Kab	Sarana Prasarana	Tahun	Kondisi	Ket
1	Bantaeng	- Speedboat Pengawas - Steiger (Rumah Speedboat) - Pos Pengawas	2014 2014	Mesin dalam keadaan rusak Baik Baik	1 Unit 1 Unit 1 Unit

✿ Kabupaten Bulukumba

Tabel 22. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Bulukumba

No	Kab	Sarana Prasarana	Tahun	Sumber Anggaran
1	Bulukumba	- Kapal Pengawas (KM. Baracuda) - Speedboat - Pos Pengawas - Teropong Panjang	2012 2007 2013 2014	DAK DAK DAU DAU

✿ Kabupaten Pangkep

Tabel 23. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kabupaten Pangkep

No	Kab	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Pangkep	- Speedboat Responbat - Speedboat Multi Speedboat - Pos Pengawas - Alat Komunikasi - GPS - Teropong - Pelampung - Radio Komunikasi	1 unit 2 Unit 1 Buah 1 Unit 11 Buah	Mesin Rusak Mesin Rusak

✿ Kota Pare - Pare

Tabel 24. Data Sarana dan Prasarana Pengawasan Kota Pare-Pare

No	Kab/Kota	Sarana Prasarana	Tahun	Sumber Anggaran	Kondisi
1	Pare-Pare	- Motor - Lapotop - Printer	2014 2014 2014	DAK DAK DAK	Baik Baik Baik

✿ Kabupaten Pinrang

Data Sarana dan Prasarana pengawasan yang terdapat di Kabupaten Pinrang yaitu 2 Pos Pengawasan yang terdapat di Kecamatan Suppa dan Kecamatan lembang dengan beban anggaran APBD.

❁ Kabupaten Luwu Timur

Berdasarkan hasil pelaksanaan Identifikasi, Verifikasi dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengawasan di kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan bahwa Luwu Timur kaya dengan potensi kelautan dan perikanan sangat rentan terhadap kerusakan akibat pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dengan illegal fishing, bom ikan, strum dan racun sehingga hal-hal tersebut harus dikendalikan melalui kegiatan pengawasan secara berkesinambungan.

2. Pengumpulan Data Statistik dan Informasi Pengawasan

Maksud penyusunan laporan pengumpulan data statistic dan informasi tahun 2015 dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap pentingnya data statistic pengawasan dan mengsinkronisasikan data pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di setiap kab/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Tujuan disusunnya laporan pengumpulan data statistic dan informasi pengawasan adalah untuk meningkatkan pemahaman terhadap statistic pengawasan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana pada pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

3. Analisis Kebutuhan Pengawasan

Hasil pelaksanaan kegiatan dititik beratkan kepada Kab/Kota yang dipantau yaitu Kabupate Selayar, Kabupaten Bone dan Kabupaten Barru. Dari hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dibuatkan matriks sebagai berikut :

Tabel 25. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Barru Tahun 2015

No	Kondisi Geografis	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Pemecahan Masalah	Kebutuhan Saprass pengawasan	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> - Memiliki luas wilayah penangkapan ikan 56.160 Ha - Berbatasan langsung 	<ul style="list-style-type: none"> - Perairan Kab. Barru menjadi sasaran kegiatan destructive fishing baik oleh nelayan barru maupun nelayan luar - Penganggaran dibidang pengawasan 	<p>Keadaan sarana dan prasarana saat ini :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pos Pengawas 1 (Satu) Unit b. Garasi Speed Boat c. Speedboat d. Perahu 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan anggaran untuk sector pengawasan & pengendalian SDKP baik yang bersumber dari APBD maupun APBN. - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 	<p>Berdasarkan kondisi yang ada maka sarana yang dibutuhkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengawas Perikanan dan PPNS - Pos Pengawas dipulau 	

LAPORAN TAHUNAN 2015

	dengan selat Makasar dan perairan Kab. Pangkep sehingga rawan kegiatan illegal fishing	masih kurang - Kondisi sarana dan prasarana masih sangat minim khususnya sumberdaya manusia	Pengawasan e. GPS f. Teropong	dalam melaksanakan patrol laut. - Menambah jumlah pengawasan perikanan - Menambah dan memberdayakan Pokmaswas	- Sarana penunjang pengawasan lainnya seperti rompi, kamera, senjata laras panjang dan teropong.	
--	--	--	-------------------------------------	---	--	--

Tabel 26. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Bone Tahun 2015

No	Kondisi Geografis	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Pemecahan Masalah	Kebutuhan Saprasi pengawasan	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kabupaten yang berbatasan langsung dengan selat Bone - Berbatasan dengan beberapa kab. lain sehingga rawan illegal dan destructive fishing 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sering terjadi kegiatan destructive fishing (Bom dan bius) 	Keadaan sarana dan prasarana saat ini : a. Kapal Pengawas 1 Unit b. Pos Pengawas dan gedung pengawas c. Pengawas 6 orang d. GPS, Radio komunikasi dan teropong	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan anggaran untuk sector pengawas dan pengendalian SDKP baik yang bersumber dari APBD maupun APBN - Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melakukan patrol laut. - Menambah dan memberdayakan POKMASWAS 	Berdasarkan kondisi yang ada, maka sarana yang dibutuhkan : a. Senjata Api b. Kapal pengawas untuk POKMASWAS	

Tabel 27. Matriks Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pengawasan di Kabupaten Selayar Tahun 2015

No	Kondisi Geografis	Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Pemecahan Masalah	Kebutuhan Saprasi pengawasan	Ket
	<ul style="list-style-type: none"> - Merupakan kabupaten kepulauan yang terdiri dari 130 pulau - Berbatasan langsung dengan laut 	<ul style="list-style-type: none"> - Perairan Selayar merupakan tujuan penangkapan dari berbagai kab/kota di Sulsel sehingga rawan terhadap illegal fishing - Penganggaran dibidang pengawasan masih 	Keadaan sarana dan prasarana saat ini : a. Kapal Pengawas 2 unit b. Pos pengawas dan gedung pengawas c. Pengawas 4 orang d. GPS, Radio	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan anggaran untuk sektro pengawasan dan pengendalian SDKP baik yang bersumber dari APBD maupun APBN - melakukan koordinasi dengan instansi 	Berdasarkan kondisi yang ada, maka sarana yg dibutuhkan : a. Kapal pengawas yang berkecepatan tinggi b. Pos pengawas dipulau c. Radio	

	Flores dan Selat Makassar - Sebagian besar penduduknya berprofesi dibidang perikanan dan kelautan	sangat minim dibanding kondisi geografis - Kondisi sarana dan prasarana masih sangat minim khususnya kapal pengawas dan SDM	komunikasi dan teleskop	terkait dalam melakukan patrol laut - Menambah jumlah pengawas perikanan - Menambah dan memberdayakan POKMASWAS	komunikasi yang terintegrasi dengan POKMASWAS yang ada dipulau d. Pengawas perikanan.	
--	--	--	-------------------------	---	---	--

4. Kegiatan Workshop Statistik Pengawasan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah menyamakan persepsi terhadap pentingnya data statistik pengawasan bagi pembangunan perikanan di Sulawesi Selatan dan mensinkronkan data pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil dan kesimpulan dari kegiatan ini adalah :

- Data Pengawasan dan pengendalian SDKP yang dihasilkan harus valid, accountable dan dapat dipertanggungjawabkan
- Data yang akurat menghasilkan program dan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian SDKP yang tepat sasaran, efektif dan bertanggung jawab.
- Isu tentang pentingnya data SDKP harus dihembuskan terus menerus agar perhatian dan keberpihakan anggaran yang lebih besar.
- Koordinasi antara kab/kota dengan provinsi harus selalu diintensifkan guna mendukung kegiatan pengawasan SDKP yang lestari dan berkelanjutan.

5. Jasa Pengamanan Pos Pengawas dan Speed Boat Pengawas

Maksud dan tujuan kegiatan Jasa Pengamanan Pos Pengawas dan Speed Boat Pengawas adalah Tersedianya sarana dan prasarana pos pengawasan dan speed boat yang dapat bermanfaat bagi kegiatan pengawasn SDKP.

6. Sewa Tempat Labuh Speed Boat Pengawasan

Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah tersedianya tambat labuh sarana dan prasarana pengawasan speed boat sehingga setiap saat dapat dioperasikan.

7. Belanja Modal Pengadaan Perahu Pengawas untuk POKMASWAS

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya 1 (Satu) unit perahu pengawas bagi kelompok masyarakat pengawas, memfasilitasi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal pengawas untuk POKMASWAS tahun 2015 dilakukan melalui pihak ketiga dengan masa kontrak selama 3 bulan dengan penerima adalah POKMASWAS “Sikamaseang” asal Kabupaten Selayar.

8. Pemeliharaan Alat Angkut Apung Bermotor

Kegiatan pemeliharaan speed boat untuk tahun 2015 dibagi atas 2 kegiatan

➤ Kegiatan Pemeliharaan Speed Boat

Pemeliharaan speed boat meliputi kegiatan perawatan rutin meliputi servis bulanan, penggantian aki dan peralatan kapal lainnya.

➤ Penggantian Suku Cadang Speed Boat

Penggantian suku cadang dilaksanakan berupa pembelian peralatan yang dapat mendukung kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, untuk tahun 2015 dilakukan pembelian beberapa peralatan :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Tenda Cover Speed Boat | 10). Teropong Night Vision |
| 2) Jok Kursi | 11). Pompa Celup |
| 3) Pelampung | 12). Peta laut |
| 4) Keset Alat Lantai Speed | 13). Kipas Angin |
| 5) Stater Relay | 14). Wiper |
| 6) Jangkar | 15). Kunci-Kunci |
| 7) Tali Jangkar | 16). Toa |
| 8) Dampira | 17). Pembungkus Sirine |
| 9) Sirine | |

b. Penataan dan Penegakan Hukum SDKP

APBD

1. Pertemuan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan

Kegiatan Pertemuan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilaksanakan sebanyak 12 (Dua Belas) kali di Kabupaten/Kota yaitu :

■ Kabupaten Takalar

- Peserta berasal dari Pokmaswas, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan perwakilan di pemuda di daerah setempat dengan jumlah sebanyak 30 orang.
- Permasalahan yang diperoleh di lapangan adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan sumberdaya kelautan dan perikanan dan kurangnya pemahaman masyarakat terutama pokmaswas dalam menangani kejadian tindak pidana perikanan tugas dan peran Pokmaswas.

■ Kabupaten Jeneponto

- ✦ Pertemuan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dihadiri peserta sebanyak 30 orang dari Tokoh Agama, Pemuka Masyarakat dan Tokoh Pemuda di daerah ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Empong Selatan
- ✦ Permasalahan adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan, minimnya partisipasi dan kerjasama pengawasan, dan masih maraknya praktek *Destructive Fishing* yang tidak dapat diatasi.

■ Kabupaten Gowa

- ✦ Pertemuan Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dihadiri oleh beberapa unsure masyarakat yaitu para pembudidaya, nelayan, pedagang ikan/*papalele*, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat dinas kabupaten serta aparat kepolisian/Babinsa dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan teknis yang ditemui adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan, minimnya partisipasi dan kerjasama pengawasan dengan aparat perikanan, rendahnya pemahaman anggota masyarakat dan masih maraknya praktek *Destructive Fishing*.

■ Kabupaten Maros

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan utamayang menjadi focus pembahasan dalam diskusi adalah pemahaman objek pengawasan berbasis masyarakat, serta pemahaman tindak pidana perikanan berikut sanksi-sanksi pidananya.

■ Kabupaten Pinrang

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dihadiri para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para pelaku usaha, aparat pemerintah desa dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan yang muncul adalah minimnya pembinaan mengakibatkan minimnya semangat dan kesadaran masyarakat diwilayah pesisir.

■ Kabupaten Pangkep

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan diikuti sebanyak 30 orang beserta aparat desa, semua peserta berasal dari desa setempat yakni Desa Kapoposang Kab. Pangkep.
- ✦ Ada beberapa hal yang merupakan suatu masalah yang ada dan sering terjadi dipulau Kapoposang adalah adanya nelayan dari kabupaten lin yang mencari ikan disekitar pulau Kapoposang dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak dianjurkan oleh pemerintah yaitu alat tangkap trawl dan juga menggunakan compressor.

■ Kabupaten Bantaeng

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Pada kegiatan ini masyarakat diberi pemahaman tentang hukum lewat pertemuan dimaksudkan untuk memberikan atau membekali kesadaran tentang hukum bagi masyarakat kelompok nelayan setempat, agar dikemudian hari masyarakat melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang sesuai.

■ Kabupaten Sinjai

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan yang rata-rata muncul dimasyarakat adalah kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

■ Kabupaten Bone

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan yang rata-rata muncul dimasyarakat adalah kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

■ Kabupaten Takalar

- ✦ Pelaksanaan pertemuan Penyuluhan Hukum bagi Masyarakat Perikanan dan Kelautan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab melalui tatap muka langsung dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.
- ✦ Permasalahan yang rata-rata muncul dimasyarakat adalah kurang pahamnya masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

■ Kabupaten Pangkep

- ✦ Pertemuan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Pulau Badi Kabupaten Pangkep yang dihadiri sebanyak 30 orang yang terdiri dari anggota Pokmaswas, Pemuka Agama, Tokoh Masyarakat dan Pemuda.
- ✦ Didaerah ini masyarakat sudah sadar akan pentingnya menjaga sumberdaya kelautan dan perikanan, dikarenakan aktifnya Pokmaswas yang ada memberikan pengarahan kepada masyarakat dan dukungan pemerintah serta Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep

■ Kota Makassar

- ✦ Pertemuan Penyuluhan Hukum dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo yang dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Lokasi ini dipilih dikarenakan seringnya masyarakat Pulau Barrang lompo melakukan penangkapan ikan di Pulau Jawa tepatnya didaerah Jawa Barat tanpa dilengkapi dokumen lengkap.
- ✦ Harapan dari kegiatan ini adalah dapat member dampak positif serta nilai tambah untuk masyarakat dengan maksud menekan atau mengurangi kasus pelanggaran dalam hal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan anjuran pemerintah.

2. Patroli Pengawasan dan Pengendalian Illegal Fishing

Alokasi anggaran untuk melaksanakan kegiatan Patroli Pengawasan dan pengendalian Illegal Fishing sebesar Rp. 46.913.000 (*Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*) dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) kali di Anggaran Pokok dan 5 (Lima) kali di Anggaran Perubahan dengan jumlah alokasi Anggaran sebesar Rp 134.550.000 (*Seratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*) dilaksanakan di Kabupaten Barru, Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Takalar.

Dari hasil kegiatan Patroli Pengawasan masih banyak ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan dimana masih ada yang menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah dan juga masalah kelengkapan dokumen.

Pelanggaran yang menggunakan alat tangkap Cantrang masih banyak ditemukan di perairan Kabupaten Takalar meskipun penggunaan alat tangkap tersebut sudah dilarang penggunaannya sebagaimana diatur dalam Permen No.2 Tahun 2015. Dari hasil operasi Patroli Pengawasan Perikanan bersama PPNS Perikanan diperairan Takalar berhasil menahan 7 (Tujuh) kapal nelayan dengan alat tangkap cantrang yang masih melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dari tujuh kapal tersebut masing-masing nahkoda kapal diamankan ke Kapal Pengawas dan kemudian dibawa ke Kantor DKP Prov.Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kasus tersebut langsung dilimpahkan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah mendengar arahan dan petunjuk dari Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, maka selanjutnya dibuatkan Berita Acara pemeriksaan kepada masing-masing nahkoda nelayan.

Adapun Nama Kapal beserta titik koordinat tempat dilakukan penangkapan yaitu :

No	Nama Kapal	Nahkoda Kapal	Titik Koordinat
1	KMN. Manis Manja	Agil Dg. Tutu	S 05°.12'.801" E 119°.22'.200"
2	KMN. Bunga Desa II	Matturungang Dg. Ngenjeng	S 05°.20'.330" E 119°.20'.921"
3	KMN. Baji Minasa	Takdir Dg. Lurang	S 05°.13'.283" E 119°.21'.397"
4	KMN. Tinggi Moncong	Faisal Dg. Rapi	S 05°.12'.844" E 119°.21'.486"
5	KMN. Bunga Desa	Hamsah Dg. Sikki	S 05°.16'.001" E 119°.20'.807"
6	KMN. Kendedes	Dg. Rappo	S 05°.13'.420" E 119°.21'.253"
7	KMN. Benteng Somba Opu	Haris Dg. Rukka	S 05°.17'.506" E 119°.20'.477"

3. Sosialisasi Illegal Fishing

Alokasi anggaran sebesar Rp. 50.687.500 (Lima Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali di kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Bone.

Maksud dilaksanakan Sosialisasi Illegal Fishing adalah agar masyarakat pelaku perikanan lebih memahami dan sadar hal-hal seperti apa yang harus dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan ikan dilaut dan kemudian menangkap ikan sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar sumberdaya perairan kita tetap lestari.

Tujuan dilaksanakan Sosialisasi Illegal Fishing agar masyarakat pelaku perikanan di Indonesia sadar tentang hukum dan mengetahui aturan serta tata cara menangkap ikan yang sesuai dan benar yang dianjurkan oleh pemerintah lewat kebijakan yang dikeluarkan.

Sasaran dari Sosialisasi Illegal Fishing adalah diperuntukkan untuk masyarakat pelaku perikanan dan masyarakat yang bermukim disekitar wilayah pesisir pantai dan pulau-pulau kecil dimana aktifitas kesehariannya adalah menangkap ikan dilaut baik yang menangkap dilaut dalam maupun yang menangkap didaerah pesisir.

4. Pemberkasan Perkara

Alokasi anggaran sebesar Rp. 5.500.000 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) untuk melaksanakan komponen kegiatan 1 (satu) kali di Makassar, kegiatan ini tidak terealisasi disebabkan tidak adanya kasus yang diproses oleh PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

5. Honor Tim Inventarisasi Data Tindak Pidana Perikanan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.600.000 (*Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Data Tindak Pidana Perikanan yang dibayarkan selama 4 kali (Per triwulan).

6. Honorarium Pengawas Distribusi Sarana dan Produksi Perikanan

Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.600.000 (*Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*) untuk melaksanakan kegiatan Inventarisasi Data Tindak Pidana Perikanan yang dibayarkan selama 4 kali (Per triwulan).

7. Belanja Jasa Pihak ketiga

Alokasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000 (*Sembilan Juta Rupiah*) untuk melaksanakan kegiatan yang dibayarkan sebanyak 12 bulan

8. Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 266.263.000 (*Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dan mendapat anggaran tambahan sebesar Rp. 46.702.500 (*Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*) untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah.

9. Perjalanan Dinas Luar Daerah

Alokasi anggaran sebesar Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dan tambahan sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah.

APBN

1. Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas

Tujuan dilaksanakan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kapal Pengawas adalah melaksanakan operasi pengawasan SDKP menggunakan speedboat pengawasan dan melaksanakan pemeliharaan speedboat pengawasan.

Sasaran yang ingin dicapai pada kegiatan ini adalah meningkatnya wilayah pengelolaan perikanan bebas illegal fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Selama tahun 2015, Tim Operasional Pengawasan SDKP telah melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap beberapa kapal perikanan, dari hasil pemeriksaan dapat dilaporkan sebagai berikut :

- Terdapat 96 unit kapal perikanan yang telah diperiksa dengan berbagai macam alat tangkap yang digunakan seperti Purse seine, cantrang dan pancing
- Kapal – kapal tersebut umumnya berukuran diatas 5 GT dan umumnya berasal dari Kabupaten Bone, Sinjai, Bulukumba, Pangkep, Takalar, Jeneponto, Barru dan Kota Makassar
- Selain kapal-kapal tersebut terdapat juga puluhan kapal motor temple “Jolloro” yang beroperasi diperairan Makassar, Takalar dan Pangkep. Umumnya kapal-kapal “Jolloro” merupakan kapal pengangkut ikan.
- Selama melaksanakan operasi Pengawasan SDKP tahun 2015 didapatkan 17 unit kapal perikanan yang menggunakan alat tangkap cantrang yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 84 ayat (2) Jo pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004. Pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan penyitaan dokumen kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap nelayan/nahkoda/pemiliki kapal, serta memberikan peringatan untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang dengan menandatangani surat pernyataan.
- Selain itu, ditemukan juga 28 unit kapal perikanan yang tidak memiliki dokumen seperti SIUP, SIPI, SIKPI, SLO dan PSB, serta ketidaksesuaian alat tangkap yang digunakan dengan dokumen yang dimiliki. Untuk pelanggaran ini, tim

pengawasan memberikan pembinaan dan peringatan kepada nelayan/pemilik kapal perikanan tersebut.

- Umumnya pelaku *Illegal Fishing* membuang hasil tangkapannya kelaut sebelum dilakukan pemeriksaan sehingga kegiatan yang dilakukan hanya pencatatan dan sosialisasi terhadap dampak penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan bagi kelangsungan sumberdaya kelautan dan perikanan diperairan Sulawesi Selatan.

2. Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Kegiatan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan terdiri dari tiga sub kegiatan yaitu : Forum Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum yang Terselenggara, Data dan Informasi Penanganan pelanggaran Bidang Perikanan yang Akuntabel, Daerah yang difasilitasi Penyelesaian Konflik Nelayan.

Tujuan Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yaitu : 1). Penyelesaian penyidikan barang bukti dan tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu, 2). Penanganan barang bukti dan awak kapal secara akuntabel dan tepat waktu pada tingkat penyidikan, 3). Penyampaian laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu.

■ Forum Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Forum Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum yang terselenggara telah dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali pertemuan di Aula Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi selatan dan ruang pertemuan Dinas Kelautan Perikanan Pertanian dan Peternakan Kota Makassar. Peserta pada kegiatan ini berjumlah 18 orang terdiri dari anggota Forum Koordinasi TPP Provinsi Sulawesi selatan, Pengawass Perikanan dan PPNS Perikanan DKP Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Forum TPP terdiri dari unsure Ditpolair Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Pengadilan negeri I Makassar, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, Kanwil Imigrasi Makassar dan Biro Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan.

Rekomendasi yang didapatkan dalam kegiatan Forum Koordinasi TPP sebagai berikut :

- Perlu strategi dan kerjasama operasi secara terpadu dengan TNI AL dan/atau Polair dalam memutus jalur distribusi peredaran pengangkutan bahan ANFO (Pupuk Matahari) guna menangkap para pelaku destructive fishing sebagai target operasi pada wilayah perairan dan kepulauan.
- Guna mendukung proses penegakan hukum secara cepat, tepat dan akuntabel dalam tindak pidana perikanan, maka masing-masing anggota forum

diharapkan memanfaatkan forum koordinasi dan konsultasi tersebut untuk dapat menyelesaikan penanganan kasus secara akuntabel, cepat dan tepat.

- Untuk mengatasi maraknya peedaran pupuk ammonium nitrat (ANFO) secara illegal, maka diperlukan kerjasama pengawasan dengan aparat terkait, khususnya antar aparat Ditjen Bea dan Cukai Sulawesi Selatan, Ditpolair Polda Sulselbar dan Lantamal VI Makassar dalam hal pengawasan distribusi antar pulau atau provinsi pada pulau-pulau tertentu yang menjadi rute pelayaran sindikat.

■ Kegiatan Identifikasi data Penanganan TPP

Kegiatan Identifikasi Data Penanganan TPP telah dilaksanakan pada Bulan Februari sampai dengan Desember 2015 dengan hasil sebagai berikut :

a) Kabupaten Wajo

- Pada tanggal 11 April 2015 di Kecamatan Takkalala Kabupaten Wajo terjadi pelanggaran berupa pemboman ikan yang dikenai dasar pengenaan pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo dengan meningkatkan pengawasan diwilayah tersebut.
- Tanggal 13 April 2015 di Siwa dan Keero diterima laporan terjadi pemboman ikan dan penggunaan alat tangkap mini trawl yang diduga berasal dari dalam dan luar Kabupaten Wajo yang dikenai dasar pengenaan pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015, hal ini ditindaklanjuti oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo dengan memaksimalkan tim pengawasn SDKP dan Pokmaswas yang ada.
- Pada Tanggal 18 April 2015 di Saidanging adanya laporan dari Pokmaswas bahwa terjadi pemboman ikan yang dilakukan oleh masyarakat luar Kabupaten Wajo. Pengenaan Pasal Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015.

b) Perairan Selat Makassar

- Posisi koordinat kejadian 05°15'169" S- 116°45'570" E, waktu kejadian 5 April 2015 jam 08.00 Wita, pelaku Kartono Bin Toha umur 45 tahun yang merupakan nahkoda KM. Mulyo Sejati IV beralamat Desa Tambak Agung Kecamatan

Kaliori Kabupaten rembang Jawa Tengah. Pelanggaran memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap dan pengangkut ikan tanpa dilengkapi surat izin yang sah (SIPI, SIKPI dan SPB).

Barang Bukti :

- 1 (satu) Unit KM. Mulyo Sejati IV
 - 1 (Satu) Unit Bundle dokumen KM. Mulyo Sejati IV
 - 4 (Empat) unit Cantrang
 - 19 Ton Ikan campuran
- Posisi Koordinat kejadian 05°14'522" S – 116°45'572" E, waktu kejadian 5 April 2015 jam 16.30 Wita, pelaku Slamet Bin Saripin umur 45 tahun yang merupakan nelayan/nahkoda KM. Mulyo Sejati II beralamat Desa Tambak Agung Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Pelanggarannya adalah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap dan pengangkutan ikan tanpa surat izin yang sah (SIPI, SIKPI dan SPB).

Barang Bukti :

- 1 (Satu) unit KM. Mulyo Sejati II
- 8 ton kan jenis campuran
- 3 (Tiga) unit Cantrang
- 1 (Satu) dokumen KM. Mulyo Sejati II

Kedua kasus diatas diproses oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda Sulselbar dengan menghadirkan saksi ahli dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

c) Kabupaten Takalar

- Tempat kejadian di Perairan Galesong pada tanggal 25 Juli 2015, pelaku Samang Dg Tutu Bin Dg Nongka yang merupakan nelayan/nahkoda KMN. Minsabone. Pelanggarannya adalah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap dan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi surat izin yang sah (SIPI dan SPB).

Barang Bukti :

- KMN. Minsabone
- Dokumen Kapal
- Jenis alat tangkap cantrang
- Ikan campuran ± 20 kg

Dikenai dasar pengenaan pasal 93 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Tempat kejadian di Perairan Galesong pada tanggal 25 Juli 2015, pelaku Rahman Dg Rangka Bin H. Emba dan Tawang Dg Bonto Bin Saripuddin yang merupakan nelayan/nahkoda KMN. Minasa Bone. Pelanggarannya adalah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap dan pengangkutan ikan tanpa dilengkapi surat izin yang sah (SIPI dan SPB).

Barang Bukti :

- KMN. Minasa Bone
- Dokumen Kapal
- Jenis alat tangkap cantrang
- Ikan campuran ± 20 kg

Dikenai dasar pengenaan pasal 93 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kasus tersebut telah ditindaklanjuti dan berada dalam proses tahap ke 21.

- Tempat kejadian di Perairan Galesong pada tanggal 16 September 2015, pelaku Daeng Muntu yang merupakan nelayan/nahkoda KMN Sunggumanai. Pelanggarannya adalah melakukan penangkapan dengan menggunakan alat tangkap ikan jenis cantrang.

Barang Bukti :

- KMN. Minsabone
- Dokumen Kapal
- Jenis alat tangkap cantrang
- Ikan campuran ± 20 kg

Dikenai Pasal 9 Sub Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan Ditpolair Polda Sulselbar dengan meminta keterangan ahli dari PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

d) Kota Makassar

Tempat kejadian di ± 3 mil laut sebelah Utara Pulau Dayang – Dayangan Taka Bone Pute pada tanggal 17 September 2015, pelaku Nawir Bin Haya pemilik perahu jolloro.

Barang Bukti :

- Jolloro (1 Unit)
- Kompresor (1 unit)
- Roll Selang (2 buah)
- Sepatu Katak (1 pasang)
- Kacamata Selam (2 buah)
- Dakor/Regulator (2 buah)
- Selang Penutup/Pengamanan Sumbu Api (41 buah)
- Ikan Campuran

Dikenai pasal 84 ayat (1) sub pasal 85 Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan Ditpolair Polda Sulselbar dengan meminta keterangan ahli dari PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan.

e) Kabupaten Sinjai

Tempat kejadian di perairan ± 13 mil laut sebelah Timur Laut Pulau Sembilan pada posisi koordinat 04⁰58'19.24" S – 120⁰26'1.14" E, Pelaku Suhardi Bin Ambo Akkang beralamat di Desa BajoE kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone yang merupakan nelayan/nahkoda KMN. Rifai.

Barang Bukti :

- KMN. Rifai (1 Unit)
- Kompresor (1 unit)
- Roll Selang (1 buah)
- Sepatu Katak (1 pasang)
- Dakor (1 buah)
- Kacamata Selam (1 buah)
- Sumbu Api Rakitan (30 buah)
- Botol bekas diduga berisi pupuk Ammonium Nitrat (10 buah)

Diduga melanggar pasal 84 ayat (1) sub pasal 85 Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan Jo pasal 53 KUHP. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan Ditpolair Polda Sulselbar dengan meminta keterangan ahli dari PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan

f) Kabupaten Pangkep

Tempat kejadian di perairan Pulau Badi Selat Makassar pada tanggal 30 Oktober 2015. Jenis pelanggaran adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom ikan. Pelaku Jamaluddin Pemilik perahu Katinting.

Barang Bukti :

- Perahu Katinting (1 Unit)
- Kompresor (1 unit)
- Roll Selang (1 buah)
- Sepatu Katak (1 pasang)
- Kacamata Selam(1 buah)
- Botol diduga berisi Ammonium Nitra (4 buah)

Dikenai pasal 84 ayat (1) sub pasal 85 Undang – undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Kasus ini masih dalam proses penyelidikan Ditpolair Polda Sulselbar.

✦ **Fasilitasi Penanganan Konflik Nelayan**

Fasilitasi Penanganan Konflik Nelayan dilaksanakan di Provinsi Bali, hal ini didasarkan informasi yang dihimpun oleh tim penanganan konflik nelayan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana informasi yang diperoleh bahwa nelayan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penangkapan ikan di Perairan Bali tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi berupa SIPI yang tidak mencantumkan lokasi ground fishing di Provinsi Bali, selain itu kedatangan kapal dan nelayannya tidak dilaporkan kepada pemerintah setempat. Berdasarkan hasil kegiatan tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Provinsi Bali, Satker PSDKP Benoa dan Pembina nelayan andon di Bali berharap kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk memfasilitasi pengurusan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) di kabupaten Sinjai yang mana proses pengurusan izin tersebut telah menjadi kewenangan Provinsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 2) Guna meminimalisir pelanggaran pelanggaran dan konflik dilaut yang dilakukan oleh nelayan andon Sulawesi Selatan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum terhadap kabupaten/kota yang memiliki nelayan andon.

- 3) Memetakan provinsi yang menjadi tujuan Grounf Fishing dan membuat perencanaan untuk melakukan kerjasama pengelolaan andon dengan provinsi tersebut.

3. OPERasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan

Tujuan dilakukan operasional Pengawasan Sumberdaya kelautan yaitu : 1). Meningkatkan WPP RI yang bebas kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan illegal dan yang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya, 2). Meningkatkan WPP RI yang bebas kegiatan pencemaran perairanyang merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya, 3). Meningkatkan WPP RI yang bebas dari pemanfaatan jasa kelautan dan sumberdaya non hayati yang illegal dan merusak sumberdaya ikan dan lingkungannya.

Hasil Kegiatan :

- 1) Kegiatan Pembinaan Pengawasan Pemanfaatan SDK ke Kab/Kota telah dilaksanakan di Luwu Utara, Luwu Timur, Maros, Barru, Sinjai, Bulukumba dan Pulau Barrang Lompo dengan jumlah peserta 25 orang untuk masing-masing lokasi yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat dan aparat desa. Adapun hasil pelaksanaan Pembinaan Pengawasan Pemanfaatan SDK dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan laporan masyarakat setempat bahwa praktek penangkapan ikan dengan menggunakan handak masih marak terjadi dan diduga kuat dibackup oleh oknum TNI AL
 - Ancaman kerusakan potensi sumberdaya kelautan disebabkan oleh cara penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan dan faktor alam
 - Dibutuhkan bimbingan teknis pemantauan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan bagi aparat pelaksana di kab/kota
 - Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota diharapkan melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) guna meningkatkan peran serta Pokmaswas dalam pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
- 2) Kegiatan Kampanye dan Informasi Peraturan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dilaksanakan di Pulau Barrang Lompo bertempat di Aula Pertemuan Field Station Fakulats Ilmu Kelautan dan Perikanan UNHAS dengan jumlah peserta 100 orang yang terdiri dari nelayan, tokoh masyarakat dan aparat Kelurahan Barrang Lompo.

Berdasarkan hasil diskusi, masukan data dan informasi yang berkembang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelanggaran Kompresor sebagai alat bantu perikanan diharapkan dikaji kembali karena melihat penggunaan compressor yang selama ini hanya digunakan untuk menangkap teripang dan tidak untuk illegal fishing dan destructive fishing.
- Pemerintah daerah diharapkan dapat memfasilitasi pelaku illegal fishing dan destructive fishing untuk mendapatkan mata pencaharian alternative berupa bantuan sarana prasarana usaha perikanan.
- Sangat diperlukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perikanan secara rutin guna meminimalkan pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan.

Permasalahan dan Upaya Pemecahan

Permasalahan pada Kegiatan Seksi Penataan dan Penegakan Hukum SDKP Tahun Anggaran 2015.

1. Pengawas Perikanan

- a) Pelaksanaan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di kab/kota berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 2009, belum dapat dioptimalkan akibat minimnya jumlah dan kualitas SDM Pengawas Perikanan.
- b) Pelaksanaan tugas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, belum dapat dilaksanakan lantaran Peraturan Gubernur sebagai payung hukum atau rujukan pelaksanaannya belum terbit sampai sekarang.
- c) Untuk kepentingan pengadaan SDM Pengawas Perikanan membutuhkan biaya sendiri. Pengadaan calon aparat Pengawas Perikanan bagi daerah kab/kota dan prov tahun 2015 untuk mengikuti Diklat Pengawas Perikanan dimaksud memerlukan kontribusi biaya sebesar Rp. 11.000.000 per/org yang harus didukung alokasi anggaran masing-masing SKPD.
- d) Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap objek Sumberdaya Kelautan dan Perikanan kab/kota belum dapat dioptimalkan akibat terbatasnya jumlah dan kualitas Pengawas Perikanan.

2. PPNS Perikanan

- a) Minimnya kualitas dan kuantitas SDM PPNS Perikanan.
- b) Kurangnya kemampuan teknis dan Juridis PPNS Perikanan dalam melaksanakan analisa kasus, pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana

perikanan termasuk pemenuhan aspek formil dan materil berdasarkan juknis penyidikan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pengawasan SDKP KKP RI.

- c) Minimnya kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak PPNS perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan secara cepat, tepat waktu dan akuntabel.
- d) Minimnya fungsi koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan instansi teknis terkait (Satuan Polair, TNI AL & DKP kab/kota/Prov Sulsel)
- e) Minimnya kemampuan PPNS perikanan dalam mengurai pemenuhan unsur-unsur pasal pidana berdasarkan pasal yang dipersangkakan penyidik.
- f) Lemahnya fungsi koordinasi dan kerjasama pengawasan dan penegakan hukum dengan aparat/instansi penegak hukum di daerah.

Upaya Pemecahan Kegiatan Seksi Penataan dan Penegakan Hukum SDKP Tahun Anggaran 2015 yaitu :

1. Pengawas Perikanan

- a) Pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan SDKP di daerah telah dikerjasamakan dengan pengawas perikanan UPT Ditjen Pengawasan SDKP yang berada di Pos PSDKP Kab/Kota.
- b) Pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan hukum dilaksanakan secara terpadu dengan instansi terkait termasuk satuan Kepolisian Perairan Kab/Kota sampai sekarang.
- c) Untuk kepentingan pengadaan SDM Pengawas Perikanan telah dilakukan usulan calon aparat pengawas perikanan untuk mengikuti Diklat Pengawas Perikanan dimaksud melalui APBD.
- d) Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap objek SDKP di kab/kota diupayakan berdasarkan kesesuaian anggaran biaya, jumlah dan kualitas SDM Pengawas Perikanan.

2. PPNS Perikanan

- a) Mengusulkan pengadaan penambahan aparat PPNS Perikanan melalui Diklat PPNS Perikanan setiap tahunnya melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan
- b) Meningkatkan kemampuan teknis PPNS perikanan dalam penanganan kasus tindak pidana perikanan melalui pelatihan dan Coaching Clinic PPNS.
- c) Meningkatkan kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak PPNS perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan secara cepat, tepat waktu dan akuntabel melalui pertemuan teknis dan koordinasi penyidikan.

- d) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama penegakan hukum dengan instansi teknis terkait (Satuan Polair, TNI AL dan DKP Kab/Kota/Provinsi).

c. Pengembangan SDM Pengawasan SDKP

APBD

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas

Sub output Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan dikab/kota yang didukung oleh lima sub output lainnya.

Uraian pelaksanaan sub output peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas sebanyak 6 lokasi dan sub output pendukung lainnya sebagai berikut :

1.1. Kab. Luwu Timur

- Peserta yang hadir adalah pengurus Pokmaswas aktif, para tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan jumlah sebanyak 30 orang.
- Permasalahan Pokmaswas adalah minimnya pemahaman anggota tentang petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan SISWASMAS serta kurangnya penerapan administrasi pembukuan dan pelaporan kejadian TPP dalam hal pelaksanaan tugas dan peran POKMASWAS.

1.2. Kab. Luwu Utara

- Pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang dari pengurus pokmaswas.
- Permasalahn mendasar pokmaswas adalah minimnya semangat kerja, motivasi dan partisipasi aktif kelompok akibat minimnya kunjungan pembinaan oleh pejabat Pembina DKP Kab/Kota dan Provinsi, akibatnya dapat berdampak pada menurunnya semangat kerja dan komitmen kelompok bahkan berpotensi untuk mengabaikan kepentingan kelompok dengan melakukan pembiaran terhadap *detructive fishing*.

1.3. Kab. Bulukumba

- Pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang dari perwakilan Pokmaswas Cakalang, Lumba-Lumba Putih, Pantai Bahari, Batu mesu, Batu Totto, Ujung Baru.
- Permasalahan Pokmaswas adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan, minimnya partisipasi dan kerjasama pengawasan antar

anggota Pokmaswas dengan aparat perikanan, rendahnya pemahaman anggota Pokmaswas terhadap tugas dan fungsi Pokmaswas dan minimnya pemahaman pokmaswas terhadap petunjuk pelaksanaan siswamas serta masih maraknya praktek *destructive fishing* yang tidak dapat diatasi.

1.4. Kab. Pinrang

- Pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang yang terdiri dari para pembudidaya, nelayan, pedagang ikan/*papalele*, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparat desa dan aparat penyuluh perikanan, aparat dinas kabupaten serta aparat kepolisian.
- Permasalahan teknis yang ditemui adalah masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat pesisir dalam mendukung upaya perlindungan dan pelestarian sumberdaya ikan, minimnya partisipasi dan kerjasama pengawasan antar anggota Pokmaswas terhadap tugas Pokmaswas dan masih maraknya *detructive fishing* yang tidak dapat diatasi oleh Pokmaswas.

1.5. Kab. Wajo

- Pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang dari pengurus pokmaswas
- Permasalahan utama Pokmaswas adalah pemahaman dasar hukum pelaksanaan Siswamas, hubungan antara Siswamas dan Pomaswas, tatacara pembentukan Pokmaswas, dasar hukum pelaksanaan Pokmaswas, tugas dan Peran Pokmaswas, petunjuk/tatacara pelaksanaan Siswamas, pemahaman aspek teknis-sosial-manajemen Pokmaswas, pemahaman objek pengawasan berbasis masyarakat, serta pemahaman tindak pidana dan sanksi pidananya.

1.6. Kota Palopo

- Pertemuan pembinaan peningkatan kapasitas kelembagaan Pokmaswas dihadiri oleh peserta sebanyak 30 orang dari pengurus pokmaswas.
- Masalah yang ditemukan dalam kelembagaan Pokmaswas adalah belum adanya kelengkapan administrasi kelompok berupa buku rencana kerja kegiatan tahunan, terbatasnya kemampuan Pokmaswas dalam perencanaan dan penyusunan program kegiatan, pengadaan sejumlah kebutuhan buku administrasi, buku laporan kegiatan, buku laporan kejadian pelanggaran, buku potensi, buku agenda surat masuk-keluar serta buku keanggotaan kelompok.

1.7. Cetak Kartu Pengenal Anggota Pokmaswas sebanyak 250 buah

- Pelaksanaan sub output berupa pencetakan kartu pengenal anggota Pokmaswas sebanyak 250 buah.
- Maksud pencetakan kartu tanda pengenal anggota Pokmaswas adalah untuk memudahkan terlaksananya pembinaan administrasi dan control pengawasan dari pemerintah kepada setiap keanggotaan Pokmaswas dalam membantu pengawasan SDKP dilapangan.
- Pembagian kartu tanda pengenal Pokmaswas diberikan kepada Pokmaswas Kab. Takalar 70 lembar, Pokmaswas Kab. Luwu Utara 107 lembar, Pokmaswas Kab. Sinjai 48 lembar, Pokmaswas Kab. Pinrang 25 lembar.

1.8. Cetak Buku Saku Pokmaswas 250 eksamplar

- Maksud pencetakan buku saku Pokmaswas adalah sebagai acuan atau pedoman bagi Pokmaswas dalam menerapkan petunjuk teknis pelaksanaan system Pengawasan berdasarkan tatacara pelaksanaan Siswamas didaerah.
- Tujuannya adalah terwujudnya kesepahaman teknis, social dan manajemen Pokmaswas dalam pelaksanaan tugas dan peran Pokmaswas didaerah.
- Distribusi Buku Saku Pokmaswas diserahkan kepada Pokmaswas Kab. Bulukumba, Sinjai Bantaeng, Barru, Bone, Luwu, Gowa, Maros, Pinrang, Wajo, Luwu Utara, Enrekang, Selayar dan Kota Makassar dan Palopo.

1.9. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Kegiatan Monitoring dan Inventarisasi Data pokmaswas 10 Kab/Kota

- Maksud Monitoring dan Inventarisasi data Pokmaswas didaerah Kab/Kota adalah untuk terlaksananya pendataan, identifikasi dan inventarisasi terkait data legalisasi SK penetapan/pengukuhan Pokmaswas, jumlah anggota, data sarana prasarana Pokmaswas, data kasus/kejadian tindak pidana perikanan, jenis permasalahan dan kendala pelaksanaan tugas Pokmaswas.
- Tujuan monitoring dan inventarisasi data Pokmaswas didaerah kab/kota adalah untuk mengetahui data perkembangan dinamika kelembagaan Pokmaswas dalam pelaksanaan tugas Pokmaswas selama 1 tahun terakhir.
- Permasalahan yang dijumpai dalam Pokmaswas adalah belum terlaksananya sistem pencatatan atau pembukuan administrasi Pokmaswas secara tertib ditingkat pengurus kelompok, termasuk updateting jumlah

anggota, pencatatan kejadian pelanggaran, data potensi (Kapal, alat tangkap, areal budidaya), data sarana prasarana milik Pokmaswas, data penanganan kasus tangkap tangan, Pokmaswas dan jenis permasalahan dan kendala teknis Pokmaswas..

1.10. Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka Pembinaan Pokmaswas 19 Kab/Kota

- Maksud pembinaan Pokmaswas 19 lokasi Kab/Kota adalah terlaksananya kunjungan pembinaan kelompok guna meningkatkan pemahaman, kesadaran dan partisipasi anggota dan pengurus Pokmaswas dalam membantu Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di daerah.
- Tujuannya adalah meningkatnya kemampuan anggota dan pengurus Pokmaswas dalam menangani permasalahan teknis, social dan manajemen dalam internal kelembagaan Pokmaswas di daerah.
- Permasalahan yang dijumpai ditingkat Pokmaswas Kab/kota adalah minimnya partisipasi dan kemampuan Pokmaswas dalam melaksanakan tugas dan peran Pokmaswas, terbatasnya pengetahuan Pokmaswas dalam menerapkan juknis tatacara pelaksanaan Pokmaswas.

1.11. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Rapat Koordinasi Pengawasan Keluar Provinsi

2. Pertemuan Sosialisasi SISWAMAS

Pertemuan Sosialisasi Siswamas dilaksanakan pada 8 Kab/Kota yaitu Kab. Sidrap, Pinrang, Barru, Sinjai, Soppeng, Takalar, Kota Palopo dan Pare – Pare.

Sasarannya adalah terwujudnya system dan mekanisme pengawasan sumberdaya ikan yang berbasis masyarakat, yang terintegrasi antara pelaku usaha masyarakat, pemerintah dan aparat hukum dalam rangka mewujudkan penguatan kelembagaan pengawasan SDKP dikab/kota.

Maksud pelaksanaan Sosialisasi SISWAMAS adalah untuk terlaksananya penyamaan persepsi, penyadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berbasis masyarakat dikab/kota.

Tujuannya adalah meningkatnya pemahaman, penyadaran dan partisipasi masyarakat dalam membantu pelaksanaan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan yang melibatkan peran serta masyarakat secara mandiri dan bertanggung jawab dikab/kota.

3. Pertemuan Koordinasi Pengawas Perikanan

3.1. Pertemuan Koordinasi Pengawas Perikanan Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

- Maksud pertemuan Koordinasi Pengawas Perikanan lingkup Sulsel adalah untuk membahas sejumlah permasalahan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan pemahaman dan kesepahaman teknis operasional prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Tujuannya adalah meningkatkan optimalisasi kelancaran pelaksanaan tugas pengawas perikanan kabupaten/kota berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- Permasalahan operasional penangkapan ikan yang dikoordinasikan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah :
 - Temuan kasus penggunaan izin alat tangkap purse seine oleh pengawas perikanan namun faktanya adalah cantrang
 - Penunjukan lokasi pelabuhan pangkalan/muat singgah oleh pejabat pemerintah daerah cenderung tidak jelas menyebut kotanya, masih menyebut nama pulau kecil, akibatnya sulit mendapatkan pelayanan.
 - Banyak kapal nelayan ukuran > 5 GT belum didaftarkan berperan mensuplai ikan untuk kebutuhan ekspor bagi UPI di Makassar akibat sulit mendapat izin sertifikasi dari pemerintah daerah.
 - Banyak nelayan kecil menggunakan alat tangkap yang belum diatur dalam permen serta ditemukan tidak sesuai jenis alat tangkap dengan ukuran kapal yang digunakan namun mendapat rekomendasi pejabat pemberi izin dari pemerintah daerah.
- Salah satu kendala dalam penanganan tindak pidana perikanan di daerah adalah sulitnya memenuhi ketentuan formil penanganan tersangka dan barang bukti ketika menerima serah terima tersangka dan barang bukti hasil tangkap tangan dari daerah yang bertepatan pada hari libur, dimana pejabat berwenang kepolisian tidak berada ditempat khususnya pejabat kepolisian untuk tujuan permintaan bantuan penanganan.

3.2. Pengawasan Perikanan oleh Tim Pengawas Perikanan Sulawesi Selatan sebanyak 4 Triwulan

Uraian hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Perikanan tiap Triwulan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Perikanan DKP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sebagai berikut :

Triwulan I

- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Pinrang
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Pangkep
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Bone
- Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan tugas pengawasan di DKP Kab. Bone
- Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan tugas pengawasan di DKP Kab. Sinjai
- Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan di Kab. Luwu Utara
- Pemantauan Pemanfaatan Ekosistem Mangrove di Kab. Luwu Utara
- Pemantauan Pemanfaatan Ekosistem Perairan 2014-2015 di Kab. Luwu Utara
- Koordinasi penanganan tindak lanjut tindak pidana perikanan tahun 2015 di Provinsi SulSel.

Triwulan II

- Pengawasan/Pemantauan Usaha Budidaya Ikan (Obat, Pakan Ikan dan Izin Usaha) dan peredaran ikan yang dilarang dan yang dilindungi di Kota Makassar.
- Hasil Pengawasan/Pemantauan pemanfaatan SDK di Kota Makassar.
- Pemantauan Pemanfaatan SDK di Kab. Luwu Timur.
- Evaluasi dan monitoring pengawasan perikanan di DKP Kab. Pangkep.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kab. Luwu Utara.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kab. Wajo.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kab. Takalar.
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kab. Jeneponto
- Koordinasi penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan tindak pidana perikanan tahun 2015 dipolair Polda Sulsel

Triwulan III

- Pengawasan/Pemantauan operasional kapal perikanan dalam rangka penerbitan HPK dan SLO di Kota Makassar
- Pemantauan Distribusi Hasil Perikanan Keluar dari UPI di Makassar
- Pengawasan/Pemantauan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan atau kawasan konservasi di Kabupaten Maros
- Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan pengawasan perikanan di Kota Makassar
- Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan pengawasan perikanan di Kabupaten Takalar
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Bone

- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Sinjai
- Pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas di Kabupaten Maros
- Koordinasi penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan tindak pidana perikanan tahun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Triwulan IV

- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Pengawasan Perikanan Kabupaten Pangkep
- Pemantauan Operasional Kapal Perikanan (Penangkapan/Pengangkutan Ikan) di Makassar
- Pengawasan Pemanfaatan Ekosistem Perairan & Kawasan Konservasi di Pulau Badi Kabupaten Pangkep
- Pemantauan Ekosistem Perairan dan Konservasi laut Kota Makassar
- Evaluasi & Monitoring Pelaksanaan Pengawasan SDP di Kabupaten Barru
- Koordinasi Penanganan tindak lanjut pelanggaran/penyidikan tindak pidana perikanan periode Oktober Thun 2015 di Provinsi Sulawesi Selatan

3.3. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam Rangka Pembinaan Pengawas Perikanan sebanyak 10 kali dikab/kota

- Maksud Pembinaan Pengawas Perikanan di Kab/Kota Lingkup Provinsi Sulsel adalah terlaksananya pembinaan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta pemahaman teknis operasional pengawasan perikanan pada DKP Kab/Kota melalui identifikasi permasalahan teknis, sarana prasarana dan penerapan standart operasional prosedur pengawasan.
- Tujuannya adalah meningkatnya kesepahaman dan keseragaman teknis operasional dalam pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sasarannya adalah terwujudnya kesepahaman, keseragaman dan kelancaran teknis operasional pengawasan dalam pelaksanaan tugas pengawas perikanan di DKP Kab/Kota.

3.4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi Pengawas Perikanan ke Pusat

- Pelaksanaan Konsultasi Pengawasan perikanan dilakukan dengan para pejabat Eselon III dan IV Lingkup Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan KKP RI, dengan membahas sejumlah permasalahan teknis, kebijakan pemerintah daerah dan pusat serta

perkembangan regulasi terkait pelaksanaan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh aparat Pengawas Perikanan di daerah kab/kota dan provinsi Sulawesi Selatan.

- Penekanan utama pelaksanaan pengawasan SDP dititik beratkan pada kebijakan operasional penangkapan ikan dilaut oleh kapal asing atau penggunaan tenaga kerja asing pada berbagai bidang usaha perikanan lainnya dan kegiatan pengawasan didarat berupa budidaya tambak garam, sedang kebijakan pengawasan SDK di daerah difokuskan pada pengawasan alat tangkap yang merusak, ekosistem perairan, kawasan konservasi, pencemaran, pesisir dan PPK, jasa kelautan non hayati dan BMKT.

4. Forum Koordinasi PPNS Perikanan Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

4.1. Pertemuan Forum Koordinasi PPNS Perikanan Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan

- Pertemuan dimaksudkan untuk terlaksananya penyelesaian sejumlah permasalahan teknis dan juridis penanganan perkara tindak pidana perikanan termasuk aspek formil dan materil berdasarkan juknis penyidikan yang telah ditetapkan oleh KKP RI.
- Tujuannya adalah meningkatnya kesepahaman teknis dan keseragaman pola tindak PPNS perikanan dalam penanganan tindak pidana perikanan secara cepat, tepat waktu dan akuntabel.
- Permasalahan teknis-juridis dalam kasus operasional penangkapan ikan yang perlu dikoordinasikan di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 yaitu :
 - Banyak kasus penggunaan izin alat tangkap purse seine namun faktanya adalah cantrang;
 - Penunjukan lokasi pelabuhan pangkalan/muat singgah oleh pejabat pemerintah daerah cenderung tidak jelas, masih menyebut nama pulau-pulau kecil, yang semestinya wajib menyebutkan wilayah administrasi pemerintahan suatu daerah;
 - Banyak kapal nelayan dengan ukuran > 5 GT belum didaftarkan sehingga menyulitkan eksportir mendapatkan sertifikat hasil tangkapan ikan di Makassar;
 - Banyak nelayan kecil menggunakan alat tangkap yang belum diatur dalam permen serta ditemukan tidak sesuai jenis alat tangkap dengan

ukuran kapal yang digunakan namun mendapat rekomendasi pejabat pemberi izin dari pemerintah daerah.

- Pemberian izin penangkapan ikan oleh pejabat perizinan pemerintah daerah terhadap para nahkoda kapal nelayan, wajib memperhatikan ketentuan kesesuaian pelabuhan pangkalan, pelabuhan muat singgah dan lokasi fishing ground yang dimohon agar dapat dipastikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2. Cetak Buku Saku PPNS/Pengawas Perikanan 75 Eksampler

- Maksud pencetakan buku saku PPNS/Pengawas Perikanan adalah sebagai acuan atau pedoman bagi aparat PPNS /Pengawas Perikanan lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan tugas PPNS/Pengawas Perikanan serta sebagai keseragaman pola tindak operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara akuntabel dan tepat waktu.
- Tujuannya adalah tersedianya acuan atau pedoman bagi aparat PPNS/Pengawas Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas pengawasan dan/atau penyidikan sebagai keseragaman pola tindak operasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sasarannya adalah terwujudnya kesepahaman dan kemampuan teknis operasional bagi PPNS/Pengawas lingkup Provinsi Sulawesi Selatan dalam pengawasan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan berdasarkan Standar Operasional Prosedur.

4.3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Konsultasi PPNS Perikanan

- Konsultasi PPNS Perikanan kepusat dilaksanakan dilingkup Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen Pengawasan SDKP –KKP RI., dengan membahas sejumlah permasalahan teknis dan juridis penyidikan, kebijakan pemerintah daerah dan pusat serta perkembangan regulasi terkait pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di daerah kab/kota dan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Untuk mempercepat proses penyidikan perkara di dinas yang mengalami masa verifikasi berkas kasus yang panjang dari daerah hingga ke pusat, maka dapat disiasati dengan segera memeriksa tersangka dalam status pemeriksaan pendahuluan, namun tidak dilakukan penahanan.

5. Pertemuan Teknis Pokmaswas 4 Kab/Kota

Pertemuan Teknis Pokmaswas dikab/kota dimaksudkan untuk terlaksananya kesepahaman teknis operasional bagi seluruh anggota dalam melaksanakan tugas dan peran Pokmaswas berdasarkan tatacara pelaksanaan SISWASMAS.

Tujuannya adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan peran anggota Pokmaswas dalam membantu pelaksanaan pengawasan SDKP yang berbasis masyarakat.

Sasarannya adalah terwujudnya mekanisme pengawasan berbasis masyarakat dan terlaksananya kerjasama pengawasan yang terintegrasi antara masyarakat (POKMASWAS), pelaku usaha, pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

APBN

1. Operasional Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Kegiatan peningkatan Operasional Pengawasan Sumberdaya Perikanan memiliki salah satu sub, yaitu meningkatkan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan.

➤ Hasil Kegiatan pembinaan POKMASWAS

- Telah dilakukan pembinaan Pokmaswas yang berperan aktif dalam membantu kegiatan pengawasan dengan target 100 kelompok dan realisasi output mencapai 148 kelompok
- Pembinaan Pokmaswas dilakukan dikab/kota : Palopo, Luwu Utara, Pinrang, Barru, Jeneponto, Pangkep dan Maros dengan jumlah Pokmaswas yang dibina adalah 12 Kelompok.
- Pembinaan Pokmaswas dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan partisipasi para anggota dalam membantu pengawasan SDKP berdasarkan tatacara pelaksanaan Siswamas.

➤ Evaluasi Kinerja POKMASWAS

Evaluasi Kinerja Pokmaswas diSulawesi Selatan dilaksanakan di beberapa kab/kota yaitu :

1) Kota Palopo

- Evaluasi Pokmaswas di kota Palopo dilakukan pada Pokmaswas Sipatuo yang berlokasi di Kelurahan Penggoli Kecamatan Wara Utara dengan jumlah anggota 20 orang dan diketuai oleh Usman

- Hasil evaluasi terhadap Pokmaswas Sipatuo yaitu : a). Aspek Teknis = 48 poin, b). Aspek Sosial = 29 poin, c). Aspek Manajemen = 19 poin. Total Skoring = 96 poin

2) Kabupaten Wajo

- Evaluasi Pokmaswas Kabupaten Wajo dilakukan pada **Pokmaswas Bina Lestari** yang diketuai Mustamin dengan jumlah anggota 21 orang. Pokmaswas tersebut beralamat di Dusun Cenrana Desa Akkajeng Kecamatan Sajoanging dan telah dikukuhkan sejak tanggal 5 Agustus 2011 melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Wajo Nomor 523/704/VIII/DKP/2011.
- Hasil evaluasi terhadap Pokmaswas Sipatuo yaitu : a). Aspek Teknis = 84 poin, b). Aspek Sosial = 90 poin, c). Aspek Manajemen = 94 poin. Total Skoring = 268 poin

3) Kabupaten Takalar

- Evaluasi Pokmaswas Kabupaten Takalar dilakukan pada **Pokmaswas Very Sejahtera** yang diketuai Saharuddin Dg Tantu dengan jumlah anggota 25 orang. Pokmaswas tersebut beralamat di Desa Sampulungang Kecamatan Galesong Utara dan telah dikukuhkan sejak tanggal 29 September 2006 melalui SK Bupati Takalar Nomor 401/2006.
- Hasil evaluasi terhadap Pokmaswas Very Sejahtera yaitu : a). Aspek Teknis = 29,5 poin, b). Aspek Sosial = 28,5 poin, c). Aspek Manajemen = 18,4 poin. Total Skoring = 76,4 poin

4) Kabupaten Barru

- Evaluasi Pokmaswas Kabupaten Wajo dilakukan pada **Pokmaswas Bina Nirwana Bahari** yang diketuai Bowo Prianto dengan jumlah anggota 29 orang. Pokmaswas tersebut beralamat di Kelurahan Mallawa, Kecamatan Mallusetasi.
- Hasil evaluasi terhadap Pokmaswas Bina Nirwana Bahari yaitu : a). Aspek Teknis = 40 poin, b). Aspek Sosial = 25 poin, c). Aspek Manajemen = 16 poin. Total Skoring = 81 poin

5) Kabupaten Bone

- Evaluasi Pokmaswas Kabupaten Wajo dilakukan pada **Pokmaswas Mattirot Deceng** yang diketuai Suardi dengan jumlah anggota 23 orang. Pokmaswas tersebut beralamat di Kelurahan Kajuara Kecamatan Awangpone dan telah

dikukuhkan sejak tanggal 16 Juni 2007 melalui SK Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone nomor 523/170/VI/2007.

Hasil evaluasi kinerja Pokmaswas dinyatakan dalam bentuk pemenang evaluasi kinerja Pokmaswas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 1784/VIII/Tahun 2015 tanggal 4 Agustus 2015 tentang Penetapan Pemenang Evaluasi Penilaian Tahunan Kinerja Kelompok Masyarakat Pengawas Tingkat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 yang terdiri dari dua bidang kegiatan yaitu : Bidang Penangkapan Ikan dan Bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan.

- Pokmaswas pemenang bidang penangkapan ikan sebagai prestasi kinerja Pokmaswas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sebagai berikut :
 - a) Juara I Pokmaswas Bina Lestari Kabupaten Wajo
 - b) Juara II Pokmaswas Nirwana Bahari Kabupaten Barru
 - c) Juara III Pokmaswas Very Sejahtera Kabupaten Takalar
- Pokmaswas pemenang bidang Pelestarian Sumberdaya Perairan sebagai prestasi kinerja Pokmaswas tingkat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 sebagai berikut :
 - a) Juara I Pokmaswas Sipatuo Kota Palopo
 - b) Juara II Pokmaswas Mattiro Deceng Kabupaten Bone
 - c) Juara III Pokmaswas Sikamaseang Kabupaten Bantaeng

Dalam kegiatan ini disalurkan bantuan berupa sarana komunikasi yaitu Handphone android dan handy talkie kepada 29 Pokmaswas aktif yang tersebar di Kabupaten Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Sinjai, Barru, Wajo, Luwu Timur, Luwu Utara dan Kota Palopo.

➤ **Pertemuan Teknis POKMASWAS**

- Temu Teknis Pokmaswas dilakukan dilingkup Provinsi Sulawesi Selatan, bertempat di Aula Pertemuan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jumlah peserta 40 orang yang merupakan utusan Pokmaswas dari Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
- Hasil pertemuan teknis tersebut dapat disimpulkan dan dirumuskan beberapa poin sebagai berikut :
 - ✓ Untuk memperkuat kelembagaan pengawasan dalam hal tugas dan fungsinya di daerah, maka perlu dibangun jejaring kerja antar Pokmaswas melalui wadah semacam forum atau asosiasi Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) di level provinsi guna mengakomodasi permasalahan

pengawasan SDKP dan kepentingan Pokmaswas lainnya sebagai mitra pemerintah.

- ✓ Perlu dipertimbangkan untuk mengusulkan pengadaan identitas Pokmaswas berupa rompi Pokmaswas, Kartu Tanda Pengenal serta Buku Saku Pokmaswas/Buku Pintar Pokmaswas serta format pelaporan rutin oleh Pokmaswas baik kepada aparat maupun kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kab/Kota.
- ✓ Setiap ditemukan dugaan pelanggaran oleh Pokmaswas, maka Pokmaswas wajib melaporkan secara berjenjang melalui DKP Kab/Kota atau Kepolisian terdekat guna tindak lanjut penegakan hukum.
- ✓ Untuk memperkuat tugas dan peran Pokmaswas di daerah, maka keikutsertaan Kepala Desa atau Aparat Desa atau Pemangku Adat dan/atau Tokoh Masyarakat selaku Ketua Pokmaswas merupakan salah satu faktor penentu yang dapat membawa Pokmaswas melaksanakan tugas dan fungsinya secara ideal.

4.4.4. Bina Usaha dan Kelembagaan

Ada 3 (tiga) kegiatan pokok yang terdapat dalam program Bina Usaha dan Kelembagaan :

a. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

APBD

Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan yang didukung oleh Dana APBD, terdiri dari 2 (Dua) kegiatan yaitu :

1. Pembinaan Produksi Bernilai Tambah

Pembinaan Produk bernilai tambah merupakan program utama dan sangat penting saat ini khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, agar produksi hasil perikanan yang selama ini dihasilkan tidak hanya dijual dalam bentuk segar dan beku tanpa diolah akan tetapi bagaimana hasil budidaya dan hasil tangkapan tersebut dapat ditangani dan diolah agar dapat memberikan nilai ekonomi tinggi yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan pendapatan para stakeholder perikanan khususnya UMKM Perikanan.

Pengembangan produk bernilai tambah merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki produk yang sudah ada dengan cara meningkatkan kualitas, menganekaragamkan produk, dan beberapa kegiatan lainnya dengan maksud untuk

lebih menyesuaikan dengan selera konsumen atau permintaan pasar dan meningkatkan nilai ekonomi produk yang dihasilkan.

Tabel 28. Kegiatan Pembinaan Produksi Bernilai Tambah Sumber Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015

No	Uraian Kegiatan	Kinerja			Ket
		Input	Output	Outcome	
1	Bimtek Pengemasan dan pelabelan Produk Perikanan	31.850.000,-	Terlaksananya Bimtek Pengemasan dan Pelabelan Produk Perikanan	Meningkatnya akses pemasaran	Kab Bantaeng. Peserta : 30 orang
2	Bimtek Diversifikasi Pengolahan Produk Hasil Perikanan	34.250.000,-	Terlaksananya Bimtek Diversifikasi Pengolahan produk Hasil Perikanan	Peningkatan kualitas SDM mengenai ragam olahan produk hasil perikanan	DKP Sulsel Peserta : 40 Orang
3	Bimtek Pengolahan Produk Hasil Perikanan	72.150.000,-	Terlaksananya Bimtek Pengolahan Produk Hasil Perikanan	Meningkatnya pengetahuan & Keterampilan UMKM mengenai ragam olahan produk hasil perikanan	Kab. Bone Peserta : 30 Orang Kab. Enrekang Peserta : 40 orang
4	Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	17.050.000,-	Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi	Meningkatnya ragam & variasi menu kuliner hasil perikanan	Provinsi Peserta : 60 orang
5	Belanja Barang yang akan diserahkan kemasyarakat berupa : <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengolahan Abon Ikan • Alat Pengolahan Hasil Perikanan • Alat Penanganan dan Pengawetan Ikan (Oven Pengereng) 	250.000.000 (Relisasi 249.000.000) 82.000.000 (Realisasi 81.950.000) 100.000.000 (Realisasi 95.000.000)	Tersedianya alat pengolahan abon ikan sebanyak 20 paket Tersedianya alat pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 paket Tersedianya alat pengolahan hasil perikanan sebanyak 1 paket	Meningkatkan kualitas & kuantitas hasil olahan abon ikan Meningkatkan kualitas hasil olahan ikan Meningkatkan kualitas hasil olahan ikan	Luwu Utara Makassar Takalar

2. Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pembinaan mutu dan pemasaran hasil perikanan tidak dapat terpisahkan karena untuk memasuki pasar khususnya pasar ekspor saat ini, tuntutan konsumen akan jaminan mutu dan keamanan pangan sangat tinggi dan Indonesia sendiri telah melakukan harmonisasi system pembinaan dan pengawasan mutu dengan beberapa Negara mitra seperti Uni Eropa (27 Negara), Cina, Korea, Vietnam dan beberapa Negara lainnya melalui Memorendum of Understanding. Untuk itu setiap Unit Pengolahan Ikan (UPI/UKM) yang akan melakukan ekspor terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan kelayakan dasar unit produksinya dalam hal ini memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan untuk selanjutnya diusulkan ke BKIPM untuk proses

penerbitan Sertifikat Hazaed Analysis Critical Control Points (HACCP). Selain pembinaan system jaminan mutu di Unit Pengolahan Ikan skala Eksport, juga dilakukan pembinaan bagaimana penanganan ikan yang baik dan benar, pembinaan penerapan sanitasi dan hygiene di UMKM Kelautan dan Perikanan guna meningkatkan pemahaman Sumberdaya manusianya, pemberian bantuan sarana system rantai dingin agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi dan dapat berdaya saing.

**Tabel 29. Kegiatan Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan
Sumber Anggaran APBD Tahun Anggaran 2015**

No	Uraian Kegiatan	Kinerja			Ket
		Input	Output	Outcome	
1	Temu Teknis Pembina Mutu Daerah Se Sulawesi Selatan	16.125.000	Terlaksananya Temu Teknis Pembina Mutu daerah Se Sulawesi Selatan	Meningkatnya mutu dan jaminan keamanan makanan khususnya produk perikanan baik di pasar	Kab Bantaeng. Peserta : 30 orang
2	Bimtek Penerapan Sanitasi dan Higienis di Pasar Ikan Tradisional	16.225.000	Terlaksananya Bimtek Penerapan Sanitasi dan Higienis di Pasar Ikan Tradisional	Meningkatnya mutu dan jaminan keamanan produk hasil perikanan	Kab. Pangkep Peserta 40 orang
3	Bimtek Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Unit Produksi	46.125.000	Terlaksananya Bimtek Penerapan Sistem Jaminan Mutu pada Unit Produksi	Meningkatnya penerapan system jaminan mutu di unit produksi	Kab. Sinjai Peserta : 30 org Kab. Pangkep Peserta : 30 org
4	Bimtek Penyusunan Manual Mutu di UPI	46.325.000	Terlaksananya Bimtek Penyusunan Manual Mutu di UPI	Meningkatnya pengetahuan QC UPI/UKM tentang penyusunan manual mutu	Provinsi Peserta 30 orang sebanyak 2 kali
5	Percontohan Sarana Sistem Rantai Dingin	200.000.000	Tersedianya Percontohan Sarana Sistem Rantai Dingin (Cold Box)	Meningkatnya mutu hasil perikanan	Kab. Pangkep
6	Perencanaan Studi Industrialisasi Pangan Laut	75.000.000	Tersedianya buku identifikasi industrialisasi pangan laut di Kab. Takalar sebanyak 100 buah	Tersedianya informasi dan data tentang pangan laut di Kab. Takalar	Provinsi

APBN

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan yang pendanaannya didukung oleh APBN, adalah sebagai berikut :

A. Dana Dekonsentrasi

Alokasi Dana Dekonsentrasi untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2015 sebesar Rp. 2.987.417.000, realisasi keuangan sebesar Rp. 2.936.800.873 (98,31 %).

Program yang dilaksanakan dengan Dana Dekonsentarsi pada Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan yaitu :

1. Peningkatan Serapan Pasar Domestik Hasil Kelautan dan Perikanan

Program peningkatan serapan pasar domestic hasil kelautan dan perikanan yang dilaksanakan seperti Lomba Masak Serba Ikan, Safari GEMARIKAN, Desiminasi Alih Teknologi dan Informasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terutama ditujukan untuk mendorong minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan dan produk hasil perikanan dalam rangka peningkatan konsumsi ikan masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Selatan.

Selain upaya peningkatan serapan pasar terhadap ikan dan produk perikanan, yang tidak kalah pentingnya adalah memonitoring perkembangan harga ikan di tingkat produsen, pedagang besar, pedagang perantara hingga harga ditingkat konsumen yang dilakukan oleh Petugas Informasi Pasar di 12 Kab/Kota dan 4 sentra produksi hasil perikanan.

2. Penguatan dan Perluasan Akses Pasar Luar negeri Hasil Kelautan dan Perikanan

Penguatan dan perluasan akses pasar luar negeri dilakukan melalui pembinaan eksportir hasil kelautan dan perikanan dalam hal memberikan informasi tentang persyaratan teknis dan non teknis untuk melakukan ekspor ke Negara – negara maupun non mitra.

3. Pengembangan Produk dan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan

Upaya pengembangan produk nilai tambah kelautan dan perikanan dilakukan melalui antara lain pemetaan ragam dan jenis produk olahan yang telah berkembang dimasyarakat atau UMKM. Tersedianya data ragam produk dimaksud kemudian dilakukan perhitungan nilai tambah pada produk tersebut.

Selain pengembangan produk, agar usaha pengolahan dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan dapat berkembang dan berdaya saing maka dilakukan pembinaan disentra-sentra pengolahan dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) baik skala besar maupun UMKM. Pada tahun 2015, untuk memberikan award kepada Unit Pengolahan Ikan baik skala kecil maupun menengah (UKM) dalam penerapan system jaminan mutu, maka dilakukan lomba UKM Pengolah Terbaik Tingkat Provinsi maupun Tingkat nasional 2015. Sulawesi Selatan berhasil meraih Juara Pertama pada Lomba UKM Pengolah terbaik 2015 untuk kategori UKM Skala Menengah dengan omzet 2,5 M – 50 M pertahun oleh PT. Parleviet Paraba. Sebagai Juara Pertama Tingkat Nasional, PT. Parleviet Paraba mewakili Provinsi Sulawesi Selatan menerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari dari Menteri Kelautan dan Perikanan RI Ibu Susi Pudjiastuti untuk *Juara I Lomba IKM Kategori Skala Menengah* dengan omzet 2,5 M – 50 M.

Pembinaan yang dilakukan terhadap Unit Pengolahan Ikan terutamayang skala ekspor dan berpotensi ekspor adalah Pembinaan Penerapan Manajemen Mutu Terpadu yaitu bagaimana menyusun manual mutu di unit pengolahan ikan sebagai panduan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari dalam satu system dan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat HACCP.

Sebelum mendapatkan sertifikat HACCP pada suatu Unit Pengolahan Ikan (UPI), maka persyaratan yang harus dipenuhi oleh UPI adalah penerapan kelayakan dasar di UPI atau penerapan GMP dan SSOP dengan baik dan benar akan diberikan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI setelah melalui pra SKP sebagai pembinaan dan direkomendasikan oleh DKP Provinsi. SKP wajib dimiliki oleh setiap UPI.

Tahun 2015, target penerbitan SKP sebanyak 60 lembar sertifikat dan realisasi SKP sebanyak 72 (Tujuh Puluh Dua) SKP, ini menunjukkan bahwa capaian target SKP sebesar 120 %. Selain pembinaan terhadap Unit Pengolahan Ikan yang berskala ekspor, juga dilakukan pembinaan sanitasi dan hygiene dan cara pengolahan yang baik dan benar terhadap UMKM agar memenuhi persyaratan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan.

B. Dana Tugas Pembantuan

Dalam rangka pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan didaerah, maka tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mendapatkan alokasi anggaran Tugas Pembantuan di Bidang Bina Mutu, Usaha dan kelembagaan sebesar Rp. 1.569.990.000 (*Satu Milyar Lima Ratus Enam Sembilan Juta Sembilan ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun 2015 yang dialokasikan di Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a) Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan antara lain:

1. Pengadaan Sarana Prasarana Pengolahan Hasil Perikanan

Pengadaan paket alat pengolahan yang diadakan adalah sarana pengolahan ikan pindang dikabupaten Bulukumba.

2. Pengadaan Sarana Sistem Rantai Dingin

Sarana system rantai dingin yang diadakan adalah Cold Box kapasitas 300 liter sebanyak 80 buah yang disebar di Kabupaten Sinjai, Bone, Luwu, Soppeng dan Kota Palopo

3. Pengadaan Kendaraan Klinik Mutu Hasil Perikanan

Kendaraan klinik mutu adalah Kendaraan Operasional Pembina Mutu yang digunakan untuk melakukan penerapan kelayakan Dasar unit pengolahan dalam rangka pra SKP, penerapan SNI dan pembinaan dan Monitoring penggunaan bahan kimia berbahaya.

b) Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan Sarana Prasarana Produk Perikanan dan Non Konsumsi antara lain :

1. Kendaraan Roda 4 yaitu Mobil Pemasaran dan Promosi Ikan Hias

Mobil promosi dan pemasaran ikan hias didesain dan dilengkapi dengan sarana penanganan dan pemasaran ikan hias dan pemanfaatannya dikerjasamakan dengan kelompok pembudidaya dan pemasaran ikan Koi

2. Pembangunan Pabrik/Rumah Produksi Pupuk Organik Cair Rumput Laut

Pembangunan pabrik/rumah produksi pupuk organik cair rumput laut di kabupaten Bantaeng yang terdiri dari bangunan dan sarana produksi pupuk organik cair rumput laut. Pabrik/rumah produksi dimaksud diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng untuk selanjutnya dikerjasamakan dengan KUB Maju Bersama yang selama ini telah eksis dalam memproduksi pupuk organik cair dari rumput laut.

Tabel 30. Daftar Rekapitulasi Pengadaan melalui Jasa Pihak Ketiga Tugas Pembantuan Tahun 2015

No	Nama Barang	Vol	Pagu Anggaran	Realisasi (Rp)	Lokasi
1	Pengadaan sarana pengolahan dan SRD (Cold Box 300 liter)	80 Unit	400.000.000	347.920.000	Sinjai, Bone, Luwu, Palopo, Soppeng
2	Pengadaan sarana pengolahan ikan (Alat Pengolahan Pindang)	1 paket	63.000.000	62.900.000	Bulukumba
3	Pengadaan Kendaraan Klinik Mutu Daerah	1 paket	210.000.000	210.000.000	Provinsi
4	Pengadaan Sarana & Peralatan Mobil Klinik Mutu Daerah	1 paket	30.000.000	29.050.000	Provinsi
5	Pengadaan Sarana & peralatan pengolahan pupuk organik dari rumput laut	1 paket	90.000.000	89.880.000	Bantaeng
6	Pengadaan Kendaraan Roda empat Pemasaran Ikan Hias	1 Unit	208.500.000	208.500.000	Provinsi dikerjasamakan dengan UKM

7	Pengadaan sarana mobil pemasaran ikan hias	1 paket	41.500.000	41.380.000	Provinsi dikerjasama dengan UKM
8	Pembangunan gedung/ rumah prasarana produksi pupuk organic rumput laut	1 paket	369.210.000	337.900.000	Bantaeng
9	Konsultan Perencana Pembangunan Gedung/ rumah Prasarana produksi pupuk organic rumput laut	1 paket	15.880.000	15.880.000	Provinsi
10	Konsultan Pengawas Pembangunan Gedung/ rumah Prasarana produksi pupuk organic rumput laut	1 paket	11.910.000	11.850.000	Provinsi

b. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan

APBD

1. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan Di Kabupaten Bantaeng

Temu lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan dilaksanakan di Kabupaten Bantaeng yang bertempat di PPI Birea . Kegiatan ini terlaksana berkat bantuan dan kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantaeng yang telah membantu dalam mempersiapkan lokasi dan peserta yang berjumlah lebih dari 30 orang yang berasal dari nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut dan penyuluh perikanan kabupaten Bantaeng.

Narasumber temu lapang terbagi 2 (Dua) yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Bakorlul Provinsi Sulawesi Selatan dan Asosiasi Rumput Laut Indonesia, sementara yang berasal dari Kabupaten Bantaeng adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Bantaeng, Bapeluh, dan perbankan yang bersumber dari Bank Mandiri.

2. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan di Kabupaten Pangkep

Temu lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan dilaksanakan di Kabupaten Pangkep yang bertempat di Kelurahan Talaka Kecamatan Ma'rang. Kegiatan ini terlaksana berkat bantuan dan kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep yang telah membantu dalam mempersiapkan lokasi dan peserta yang berjumlah lebih dari 30 orang yang berasal dari nelayan penangkap ikan, pembudidaya rumput laut dan penyuluh perikanan kabupaten Pangkep

Narasumber temu lapang yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep, Kepala Seksi Informasi Pasar Kabupaten Pangkep, dan Bapeluh.

3. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan Di Kabupaten Soppeng

Temu lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan dilaksanakan di Kabupaten Soppeng yang bertempat di BBI Lajoa Kabupaten Soppeng. Kegiatan ini terlaksana berkat bantuan dan kerjasama Dinas Perikanan Kabupaten Soppeng yang telah membantu dalam mempersiapkan lokasi dan peserta yang berjumlah lebih dari 30 orang yang berasal dari penyuluh perikanan kabupaten Soppeng, Pembudidaya Kolam Air Tawar, Pembudidaya Mina padi dan Staf BBI Lajoa.

Narasumber temu lapang yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Soppeng, Kepala Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Penyuluhan, Kepala BBI Lajoa.

4. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan Di Kota Pare-Pare

Temu lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan dilaksanakan di Kota Pare-Pare yang bertempat di PPI Cempae. Peserta yang berjumlah lebih dari 30 orang yang berasal dari nelayan penangkap ikan, Pemasar Ikan, Penyuluh Perikanan dan staf PPI Cempae.

5. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan di Kabupaten Bulukumba

Peserta pertemuan sebanyak 30 orang yang terdiri dari nelayan, pembudidaya rumput laut, penyuluh dan tenaga teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bulukumba. Pertemuan ini diharapkan dapat memberikan pembinaan terhadap pengembangan kelembagaan terutama dalam penguatan organisasi pengolahan usaha dan aspek permodalan dari pasar.

Diharapkan temua lapang ini memberikan motivasi kepada masyarakat nelayan dan pembudidaya untuk mengembangkan keberadaan kelompoknya dan usaha yang dikembangkan.

6. Temu Lapang Penguatan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan di Kabupaten Sinjai

Temu lapang penguatan kelembagaan nelayan petani ikan dikabupaten Sinjai dilaksanakan di TPI Lappa yang berjumlah 30 orang yang diantaranya berasal dari

nelayan penangkap ikan, pemasar ikan, penyuluh perikanan dan staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sinjai. Dalam sambutan Kepala Dinas Kabupaten Sinjai menjelaskan pentingnya membentuk kelembagaan kelompok agar membuat suatu lembaga yang nantinya mudah dikoordinir oleh pemerintah.

7. Pertemuan Penyuluh Perikanan dan Kelembagaan Usaha Nelayan

Tujuan pertemuan penyuluh perikanan dan kelembagaan usaha nelayan diharapkan mampu memperkuat pengembangan kelautan dan perikanan, yang maju dan modern dalam system pembangunan yang berkelanjutan, memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif.

Peserta pertemuan ini terdiri dari penyuluh kabupaten Gowa dan kota Makassar dan UMKM dengan jumlah peserta 30 orang.

Penyuluhan perikanan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 16 Tahun 2006 merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisir dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian penangkapan perikanan.

8. Pertemuan Koordinasi Data Statistik Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah : 1). Mengkompilasi data statistic P2HP hasil pelaksanaan listing/sampling didaerah , 2). Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan statistic PsHP tahun 2015 didaerah dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, 3). Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya, 4). Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kab/kota dan provinsi dalam pengumpulan, pengolahan dan entry data statistic P2HP, 5). Tersedianya data statistic P2HP yang siap untuk diakses dalam rangka perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan.

9. Validasi Data Statistik Pembinaan Pemasaran Hasil Perikanan

Peserta pertemuan ini sebanyak 24 orang yang berasal dari 24 kab/kota sesulawesi selatan dan petugas entry di provinsi. Kegiatan ini dimaksudkan untuk tercapainya penguatan data statistic pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang

LAPORAN TAHUNAN 2015

akurat, tepat waktu, konsisten, terpercaya, mudah diakses, berguna dan penampilan yang friendly.

Diharapkan dari kegiatan ini tersedianya data statistic dari P2HP, tersusunnya perencanaan pengembangan statistic P2HP dan strategi peencanaan pengembangan statistic P2HP.

c. Seksi Pembinaan Usaha

APBD

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
1	Pertemuan Kemitraan Usaha Perikanan	Rp. 36.000.000	Terlaksananya Pertemuan Kemitraan Usaha Perikanan	Terjalinnnya kemitraan UMKM sector Kelautan dan Perikanan dengan pihak lain dalam hal permodalan dan pemasaran	Peserta : UMKM sector Kelautan dan Perikanan dan Petugas dinas Kab/Kota sebanyak 60 orang Tempat : Bantaeng
2	Pertemuan Pengembangan Kewirausahaan Kelompok Pengolah sebanyak 5 angkatan	Rp. 180.000.000 (5 angkatan)	Terlaksananya Pertemuan Pengembangan Kewirausahaan Kelompok Pengolah sebanyak 5 angkatan	Meningkatnya keterampilan kelompok pengolah hasil perikanan sehingga dapat menghasilkan produk yang dapat berdaya saing dipasaran	Peserta : Kelompok pengolah hasil perikanan dan petugas kab/- kota sebanyak 300 org Tempat : Pangkep, Soppeng, Bulukumba, Bone, Sinjai
3	Pertemuan Perizinan Usaha Perikanan terkait UU No. 23 Tahun 2014	Rp. 16.976.000	Terlaksananya Per-temuan Perizinan Usaha Perikanan terkait UU No. 23 Tahun 2014	Bertambahnya pengeta-huan dan pemahaman petugas dan pelaku usa-ha/nelayan tentang undang-undang yg baru	Peserta : Pelaku usaha/nelayan dan petugas kab/kota sebanyak 40 orang
4	Pameran Pekan Raya Jakarta	Rp. 17.775.000	Terlaksananya Pameran Pekan Raya Jakarta	Meningkatnya promosinya potensi sumberdaya kelautan dan perikanan serta pemasaran produk olahan perikanan SulSel kepada masyarakat luar	Tempat pelaksanaan : Jakarta
5	Pameran Festival dan Kerajinan	Rp. 15.275.000	Terlaksananya pameran festival dan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di SulSel serta inventttasi dibidang kelautan dan perikanan Terpromosinya pro-duk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh UKM 	
Lanjutan.....					
6	Pameran Pembangunan	Rp. 51.500.000	Terlaksananya Pameran Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Terinformasinya pro-gram-program pem-bangunan Kelautan dan Perikanan Prov SulSel baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan kepada 	

LAPORAN TAHUNAN 2015

				masyarakat	
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yg ada di SulSel serta investasi dibidang Kelautan & Perikanan 	
5	Pameran Festival dan Kerajinan	Rp. 15.275.000	Terlaksananya pameran festival dan kerajinan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di SulSel serta inventasi dibidang kelautan dan perikanan Terpromosinya produk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh UKM 	Tempat Pelaksanaan : Jakarta
6	Pameran Pembangunan	Rp. 51.500.000	Terlaksananya Pameran Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Terinformasinya program-program pembangunan Kelautan dan Perikanan Prov SulSel baik yang telah, sedang dan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di SulSel serta investasi dibidang Kelautan dan Perikanan 	Tempat Pelaksanaan : Celebes Convention Center (CCC) Makassar
7	Pameran Pekan Raya Sulawesi Selatan	Rp. 15.775.000	Terlaksananya Pekan Raya Sulawesi Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di SulSel serta inventasi dibidang kelautan & perikanan Terpromosinya produk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh UKM 	Tempat Pelaksanaan : Celebes Convention Center (CCC) Makassar
8	Pameran Hari Nusantra Tingkat Nasional	Rp. 35.500.000	Terlaksananya Pameran Hari Nusantra Tingkat Nasional	Meningkatnya promosi dan pemasaran Produk Olahan perikanan Sulawesi Selatan kepada masyarakat luar serta investasi dibidang kelautan dan perikanan	Tempat pelaksanaan : Kab.kota Banda Aceh . Provinsi Aceh
9	Pameran Hari Nusantara Tingkat provinsi	Rp. 69.400.000	Terlaksananya Pameran Hari Nusantra Tingkat Provinsi	Meningkatnya promosi dan pemasaran produk olahan perikanan	Tempat Pelaksanaan : Anjungan Pantai Losari Makassar.

APBN

NO	Kegiatan	Kinerja			Keterangan
		Input	Output	Outcome	
1	Pertemuan Fasilitasi akses permodalan UMKM sector kelautan dan	Rp.	Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi akses permodalan UMKM sector	Terfasilitasinya UMKM sector kelautan dan perikanan dalam mengakses permodalan	Peserta : UMKM sector kelautan dan perikanan dan petugas dinas kab/kota

LAPORAN TAHUNAN 2015

	perikanan		kelautan dan perikanan		sebanyak 30 orang Tempat
2	Pertemuan Fasilitasi Kemitraan Usaha dalam rangka mendukung industrialisasi/ minapolitan	Rp.	Terlaksananya Pertemuan Fasilitasi Kemitraan Usaha dalam rangka mendukung industrialisasi/ minapolitan	<ul style="list-style-type: none"> • Terfasilitasinya UMKM sector Kelautan dan Perikanan dalam mengakses permodalan 	Peserta : UMKM sector kelautan dan perikanan dan petugas dinas kab/kota sebanyak 30 orang Tempat : Kota Makassar
3	Pertemuan penyusunan profil usaha kelompok pengolah hasil perikanan	Rp.	Terlaksananya Pertemuan penyusunan profil usaha kelompok pengolah hasil perikanan	Terpromosinya usaha kelompok pengolah hasil perikanan yang mempunyai jaringan kemitraan	Peserta : Kelompok pengolah, petugas kab/kota, instansi terkait sebanyak 30 orang
4	Pameran Gelar Produk UMKM Binaan KKMB	Rp.	Terlaksananya Pameran Gelar Produk UMKM Binaan KKMB	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya promosi dan pemasaran produk hasil perikanan yang ada di SulSel serta inventasi dibidang kelautan dan perikanan • Terpromosinya produk-produk khas daerah yang dihasilkan oleh UKM 	Tempat pelaksanaan : Bandung, Provinsi Jawa Barat
5	Pameran Marine and Fisheries Expo	Rp.	Terlaksananya Pameran Marine and Fisheries Expo	Terpromosinya potensi kelautan dan perikanan provinsi Sulawesi Selatan	Tempat : Batam, Provinsi Kepulauan Riau
6	Pameran Industri Bahari Expo	Rp.	Terlaksananya Pameran Industri Bahari Expo	Terpromosinya produk-produk/industry hasil-hasil olahan perikanan prov. Sulawesi Selatan	Tempat : Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7	Pameran SEABFEX ke V	Rp.	Terlaksananya Pameran SEABFEX ke V	Meningkatnya investasi bisnis rumput laut serta ekspor di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan	Tempat : Provinsi DIY Yogyakarta
8	Pameran Bulan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Perikanan	Rp.	Terlaksananya Pameran Bulan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Perikanan	Terpromosinya produk hasil perikanan baik dari UPI maupun UMKM yang telah menerapkan standar pengolahan ikan sesuai SOP dan GMP	Tempat : Bandung, Provinsi Jawa Barat

Dari hasil pembinaan yang telah dilakukan ke UMKM sector Kelautan dan Perikanan, ada beberapa kendala/permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usahanya adalah :

1. Pemasaran

Pasar adalah merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM sector Kelautan dan Perikanan, ada beberapa UMKM yang memproduksi kalau ada pesanan, ada yang menitipkan di warung/toko dimana pembayaran setelah barang laku

terjual sehingga memproduksi kadang-kadang sekali dalam dua minggu, namun ada juga beberapa UMKM yang sudah berkembang dan pemasaran lancar seperti :

- Azzahra, produk olahannya abon ikan, otak-otak ikan di kota Makassar
- Eltisyah, produk olahannya bakso sea food dikota Makassar
- Ilo Mandiri, produk olahannya abon ikan dikota Makassar
- Marijo, produk olahannya bandeng tanpa duri, tik-tik tulang ikan dikab. Pinrang
- Cakalang Mas, produk olahannya teri guri dikota Palopo
- Jasuda, produk olahannya rumput laut seperti dodol, bakso, slei, permen.
- Marala Food, produk olahannya bakso, nugget, otak-otak goreng dan bakar, dragon ball ikan.

UMKM tersebut diatas pemasaran selain dipasarkan secara local, juga sudah ada yang keluar provinsi, ada pemasaran melalui internet seperti UMKK Jasuda.

2. Permodalan

Modal juga merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM sector Kelautan dan Perikanan dalam mengembangkan usahanya namun bukan menjadi kendala utama, dimana awalnya mereka dapat memproduksi dengan modal sendiri. Kelompok/UMKM sudah ada yang dapat mengakses permodalan baik kelembaga keuangan perbankan maupun non perbankan namun jumlahnya masih sangat terbatas, hal tersebut sesuai dengan jumlah produksinya.

3. Teknologi

Teknologi pengolahan yang dilakukan pada umumnya masih menggunakan teknologi sederhana atau alat-alat produksi yang sifatnya manual, sehingga mempengaruhi kualitas produksinya, namun ada juga beberapa UMKM yang sudah menggunakan mesin. Teknologi berpengaruh terhadap efisiensi didalam proses produksi kualitas produksi yang dihasilkan.

4. Manajemen Usaha

Manajemen usaha UMKM sector Kelautan dan Perikanan masih lemah, pada umumnya belum mempunyai administrasi seperti buku produksi, buku penjualan, dimana keuangan belum dipisahkan antara modal usaha dengan belanja sehari-hari.

Pemecahan Masalah :

1. Pemasaran

Untuk mengatasi permasalahan pasar yang dihadapi UMKM sector kelautan dan Perikanan, DKP Prov Sulsel melakukan kegiatan pertemuan kemitraan usaha perikanan, pengembangan kewirausahaan kelompok pengolah, dimana kegiatan

tersebut dapat memberikan informasi, keterampilan serta menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga kelompok/UMKM dapat menghasilkan produk yang berdaya saing dipasar dan mampu mencari peluang pasar.

2. Permodalan

Sedangkan untuk permodalan, kelompok/UMKM sector Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan memfasilitasi kelompok/UMKM dengan sumber permodalan yaitu perbankan dan non perbankan seperti BUMN (Pertamina, PT.Telkom) melalui kegiatan pertemuan.

3. Teknologi

Untuk teknologi pengolahan hasil dan kemasan serta pelabelan, pada umumnya UMKM sudah mengikuti pelatihan baik yang dilakukan oleh Kab/Kota maupun yang dilaksanakan oleh Provinsi.

4. Manajemen Usaha

Manajemen Usaha UMKM sector Kelautan dan Perikanan masih lemah, untuk mengatasi hal tersebut kepada petugas Kab/Kota agar membantu membuat buku administrasi/pencatatan seperti buku produksi, buku penjualan, dll sehingga dapat diketahui perkembangan usahanya.

V. HASIL PEMBANGUNAN PERIKANAN SULAWESI SELATAN

5.1. Ekonomi

5.1.1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Indikator makro ekonomi untuk pembangunan Kelautan dan Perikanan yang dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut selama kurun waktu 2010 - 2015 data produksi total perikanan Sulawesi Selatan mengalami peningkatan rata - rata sebesar 19,5 %. Peningkatan tersebut terjadi akibat peningkatan produksi dari usaha budidaya rumput laut baik yang diusahakan di laut (*Eucheuma spp*) maupun di tambak (*Gracillaria spp*).

5.1.2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 total tercatat sebesar 3.786.837,2ton. Dibanding dengan hasil yang dicapai tahun 2014 sebesar 3.377.689,6 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 409.147,9 ton atau kenaikan sebesar 12,1 %, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 31. Perkembangan Produksi Perikanan dari Kegiatan usaha di Sulawesi Selatan, Tahun 2014 - 2015

No.	Sumber Daya	Tahun		%
		2014	2015	
1	Penangkapan (Ton)	302.191,7	310.290,4	102,7
	a. Laut	287.896,2	295.239,2	102,6
	b. Perairan Umum	14.294,7	15.051,2	105,3
2	Budidaya (Ton)	3.075.497,8	3.476.546,8	113,0
	a. Tambak	1.001.235,7	1.052.395,1	105,1
	b. Laut	2.059.892,0	2.409.022,5	116,9
	c. Kolam	8.767,9	9.307,5	106,2
	d. Sawah	5.284,6	5.350,1	101,2
	e. KJA (Laut)	32,0	117,2	366,3
	f. KJA (Tawar)	285,7	351,8	123,1
	g. Ikan Hias (Ekor)	2.315.025	6.170.326	266,5
	Jumlah (Ton)	3.377.689,6	3.786.837,2	112,1

a. Budidaya

Ada 2 (dua) komoditi utama yang dipacu dalam menunjang ekspor perikanan yaitu udang dan rumput laut, disamping itu komoditi kepiting bakau juga memiliki prospek untuk diekspor.

Udang

Di Sulawesi Selatan ada beberapa jenis udang yang hidup di tambak, tetapi yang dibudidayakan ada 2 (dua) jenis yaitu udang Windu dan Vannamei.

Produksi udang di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat sebesar 40.346,8 ton yang terdiri dari udang windu 14.835,1 ton, udang vannamei 12.768 ton, dan udang lainnya 12.743,7 ton, Jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai pada tahun 2014 sebesar 43.865 ton, maka terjadi penurunan produksi sebesar 8,0 %.

Produksi udang di Sulawesi Selatan terbanyak terdapat di kabupaten Pinrang sebesar 7.479,5 ton (18,5%), Kabupaten Takalar sebesar 4.538,7 ton (11,2 %), Kabupaten Bone sebesar 4.189,4 ton (10,4 %), Kabupaten Luwu sebesar 3.585,9 ton (8,9 %) dan Kabupaten Maros sebesar 3.485,2 ton (8,6 %).

Rumput Laut

Di Sulawesi Selatan ada 3 (tiga) jenis rumput laut yang diusahakan oleh pembudidaya yaitu jenis *Eucheuma spp*, *Spinosium spp* dan *Gracillaria spp* , jumlah produksi ketiga jenis rumput laut tersebut pada tahun 2015 sebesar 3.289.907,6 ton (basah), yang terdiri dari *Eucheuma spp* sebesar 2.169.013,6 ton basah, *Gracillaria spp* sebesar 880.885,2 ton basah dan *Spinosium spp* sebesar 240.008,8 ton basah. Jika dibandingkan dengan produksi tahun 2014 sebesar 2.888.778,8 ton basah, maka terjadi peningkatan sebesar 13,9 %.

Produksi rumput laut jenis *Eucheuma spp* di Sulawesi Selatan adalah Luwu, Luwu Utara, wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Makassar, Maros, Pangkep, Barru, Pare-Pare, Pinrang, Luwu Timur dan Kota palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Eucheuma cottonii* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 636.195 ton basah (29,3 %), Kabupaten Luwu sebesar 392.024,1 ton (18,1 %), Kabupaten Wajo sebesar 262.965 ton (12,1 %), Kabupaten Pangkep sebesar 179.603 ton (8,3 %) dan Kabupaten Bulukumba sebesar 157.920 ton (7,3 %).

Daerah produksi *Gracillaria spp* yaitu Luwu, Luwu Utara, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, Takalar, Maros, Pangkep, Luwu Timur, Pinrang dan Kota Palopo.

Produksi Rumput laut untuk jenis *Gracillaria sp* terbesar terdapat di kabupaten Luwu sebesar 285.127,6 ton (32,4 %), Kabupaten Luwu Timur sebesar 151.361 ton (17,2 %), kabupaten Luwu Utara sebesar 147.990,6 ton (16,8 %), Kabupaten Takalar sebesar 103.995 ton (11,8 %) dan Kota Palopo sebesar 84.569,9 ton (9,6%).

Daerah produksi *Spinosium spp* yaitu Wajo, Jeneponto, Selayar, Takalar, Sinjai dan Bantaeng. Produksi Rumput laut untuk jenis *Spinosium spp* terbesar terdapat di kabupaten Takalar sebesar 210.200 ton (87,6 %), Jeneponto sebesar 12.331,3 ton (5,1 %) dan Bantaeng sebesar 9.483 ton (3,9 %).

Kepiting Bakau (*Scylla serrata*)

Adapun komoditi lainnya melalui usaha budidaya yaitu kepiting bakau (*Scylla serrata*). Produksi pada tahun 2015 tercatat sebesar 1.306,9 ton sedangkan pada tahun 2014 tercatat sebesar 1.385,1 ton atau terjadi penurunan produksi sebesar 5,6 %.

Selain komoditi udang, rumput laut dan kepiting bakau, ada beberapa komoditi ikan hasil budidaya yang dipacu untuk peningkatan konsumsi ikan masyarakat meliputi ikan bandeng, ikan mas, ikan nila dan ikan lainnya.

Ikan Bandeng (*Chanos chanos*)

Produksi ikan bandeng dari hasil budidaya pada tahun 2015 tercatat sebesar 126.229,1 ton dibandingkan tahun 2014 yang tercatat sebesar 123.933,6 ton, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 2.295,5 ton atau 1,9 %. Penghasil Bandeng di Sulawesi Selatan terdapat di kabupaten Bone sebesar 35.880 ton (28,4 %), Kabupaten Wajo sebesar 18.805,5 ton (14,9%), kabupaten Pinrang sebesar 18.383,9 ton (14,6%), kabupaten Pangkep sebesar 12.325 ton (9,8%) dan kabupaten Luwu Timur sebesar 10.054 ton (7,9 %).

Ikan Mas (*Cyprinus carpio*)

Produksi ikan Mas dari hasil budidaya di kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2015 tercatat sebesar 9.291 ton, dibanding dengan tahun 2014 tercatat sebesar 9.289 ton, maka terjadi kenaikan produksi sebesar 2 ton atau 0,02 %. Daerah - daerah yang selama ini andalan produksi ikan Mas yaitu Kabupaten Toraja Utara sebesar 3.220 ton (34,7 %), Kabupaten Pinrang sebesar 1.861,6 ton (20,0 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 917,8 ton (10,2%), Kabupaten Sidrap sebesar 504,3 ton (5,4 %) dan Kabupaten Enrekang sebesar 464,3 ton (4,9 %).

Ikan Nila (*Oreochromis niloticus*)

Produksi ikan Nila dari hasil budidaya kolam, sawah (mina padi), Tambak dan Keramba Jaring Apung (KJA) pada tahun 2015 tercatat sebesar 4.139,8 ton, dibanding dengan tahun 2014 tercatat sebesar 3.927,6 ton, maka terjadi peningkatan produksi sebesar 212,2 ton atau 5,4 %. Kabupaten penghasil ikan Nila di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep sebesar 995,0 ton (24,0 %), Kabupaten Pinrang

sebesar 724,8 ton (17,5 %), Kabupaten Luwu Utara sebesar 528,8 ton (12,8%), Kabupaten Maros sebesar 372,1 ton (8,9 %) dan Kabupaten Enrekang sebesar 288,2 ton (6,9 %).

Ikan Lainnya

Beberapa jenis ikan lainnya yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi dan jumlahnya cukup besar. Komoditas ini tetap dipertahankan oleh masyarakat pembudidaya seperti ikan betok, lele mujair, Patin. Pada tahun 2015 produksinya mencapai 3.051,8 ton, sedangkan pada tahun 2014 produksinya mencapai 3.731,8 ton atau terjadi penurunan sebesar 680 ton atau 18,2 %.

b. Penangkapan

Ikan Tuna /Cakalang/Tongkol

Dimaksudkan dengan ikan tuna/cakalang/tongkol adalah ikan-ikan pelagis besar dalam hal ini meliputi : Albakora, Madidihang, Tuna Mata Besar, Setuhuk Loreng, Setuhuk Biru, Setuhuk Hitam, Ikan Layaran, Ikan pedang, Tongkol Komo, Tongkol Krai, Tongkol Abu-Abu, Lisong, Kenyar, Cakalang.

Pada tahun 2015 produksi tangkapan ikan tuna/Cakalang/Tongkol di Sulawesi Selatan tercatat sebesar 60.706,1 ton, sedang pada tahun 2014 tercatat sebesar 56.773,7 ton hal tersebut berarti terjadi peningkatan produksi tangkapan ikan tuna/cakalang/tongkol sebesar 3.932,4 ton atau sebesar 6,9 %.

5.1.3. Konsumsi Ikan

Konsumsi ikan perkapita masyarakat Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat sebesar 49,7 kg/kapita/tahun dan pada tahun 2014 tercatat sebesar 46,8 kg/kapita/tahun dengan penduduk Sulawesi Selatan mencapai 8.432.163 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa pada tahun 2015 terjadi kenaikan konsumsi perkapita sebesar 5,6 %.

5.1.4. Pemasaran

Komoditi hasil perikanan Sulawesi Selatan dipasarkan tujuan ekspor, antar Provinsi dan lokal. Pada tahun 2014 volume dan nilai ekspor hasil perikanan tercatat sebesar 135.802 ton dengan nilai US\$ 296.447.000,- dan pada tahun 2015 tercatat sebesar 139.602 ton dengan nilai US\$ 244.660.200 atau terjadi kenaikan volume sebesar 2,8 % dan penurunan nilai 17,5 %. Peningkatan volume ekspor terhadap hasil perikanan Sulawesi Selatan disebabkan komoditi Rumput laut (*E.cottoni* dan *Gracillaria*) mengalami peningkatan yang cukup tinggi.

5.1.5. Pendapatan Nelayan dan Pembudidaya

Tingkat pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan sangat bervariasi besarnya, dimana sangat ditentukan oleh sumberdaya yang dikelola dan komoditi yang diusahakan.

Tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya ikan di Sulawesi Selatan pada tahun 2015 tercatat antara Rp. 8.632.557 sampai Rp. 30.894.877. Secara berurutan tingkat pendapatan rata-rata pertahun pembudidaya di Sulawesi Selatan adalah di Budidaya Tambak Rp.22.989.700, Budidaya Rumput Laut (*Eucheuma* sp) Rp. 22.292.553, Budidaya KJA Air Laut Rp. 16.816.667, Budidaya Kolam Rp. 13.691.078, Budidaya KJA Air Tawar Rp. 8.863.693 dan Budidaya Sawah Rp. 8.632.557 sedangkan pendapatan nelayan laut Rp. 30.894.877 dan nelayan perairan umum Rp. 17.291.360.

5.1.6. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap pada sektor Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat pada Tahun 2015 sebanyak 804.161 orang atau 9,5 % dari jumlah penduduk, yang terdiri dari tenaga kerja pembudidaya sebanyak 292.823 orang (36,4 %), Nelayan (Laut + Perairan Umum) sebanyak 136.274 orang (16,9%), Pengolahan dan Pemasaran sebanyak 370.296 orang (46 %) dan Pembudidaya garam sebanyak 4.768 orang (0,6 %)

5.2. Proyek dan Pembiayaan

5.2.1. Dekonsentrasi (APBN)

Pada tahun 2015 jumlah dana dekonsentrasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan pada 7 (Tujuh) satuan kerja sebesar Rp.14.418.310.000. Realisasi pembiayaan sampai dengan akhir Desember 2015 tercatat sebesar Rp. 13.655.567.973 atau sebesar 94,7 %, dengan sisa anggaran sebanyak Rp. 762.742.027,- Adapun rincian alokasi dan realisasinya terlihat tabel di bawah ini.

Tabel 32. Alokasi dan Realisasi Anggaran pada Masing-Masing Satuan Kerja, Tahun 2015

No	uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	Sekretariat Jenderal (01)	652.293.000	645.649.050	6.643.950	98,9
2	Ditjen Perikanan Tangkap (03)	3.474.588.000	3.095.322.030	379.265.970	89,1
3	Ditjen Perikanan Budidaya (04)	3.483.310.000	3.418.145.150	65.164.850	98,1
4	Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (05)	1.142.825.000	1.125.479.800	17.345.200	98,5
5	Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (P2HP) (06)	2.987.417.000	2.936.800.873	50.616.127	98,3
6	Ditjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (07)	2.254.000.000	2.012.525.970	241.474.030	89,3
7	Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (13)	423.877.000	421.645.100	2.231.900	99,5
Jumlah		14.418.310.000	13.655.567.973	762.742.027	94,7

Sumber: Sub Bagian Program

5.2.2. Provinsi

Pada tahun 2015 jumlah dana provinsi yang dialokasikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan untuk membiayai kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp. 57.364.337.664,-. Realisasi pelaksanaan pembiayaan sampai dengan akhir Desember 2015 sebesar Rp. 53.304.160.317,- atau sebesar 92,9 %. Rincian alokasi belanja publik dan tingkat realisasi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 33. Rincian Alokasi dan Tingkat Realisasi Belanja Publik, Tahun 2015

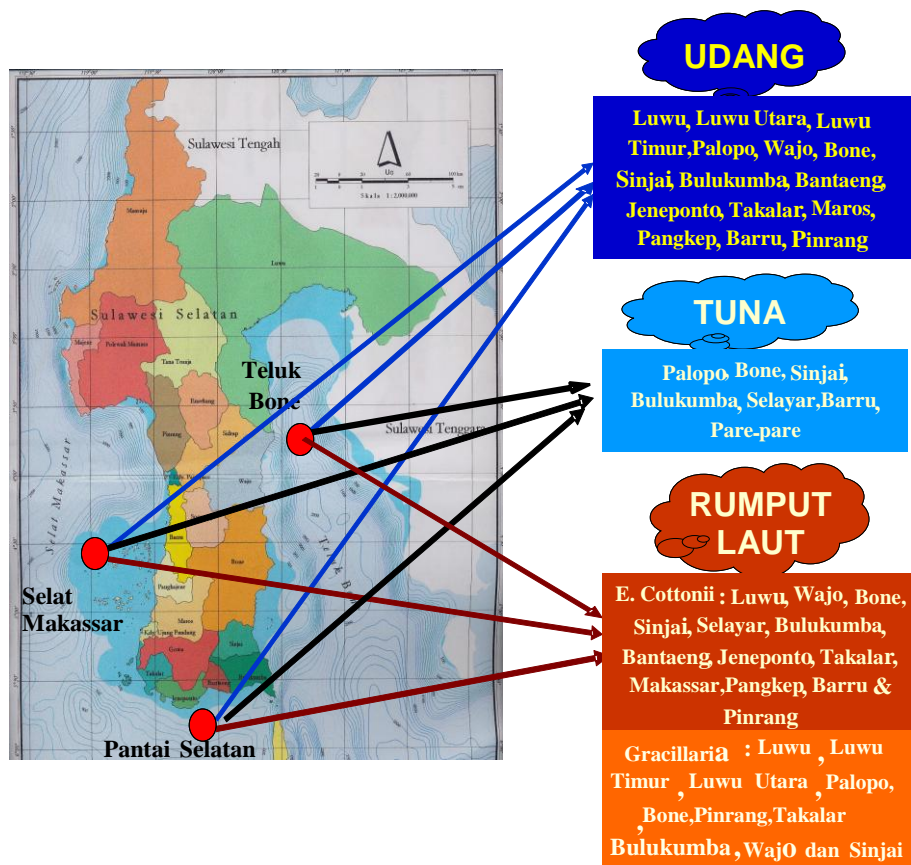
No	Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
A SEKRETARIS		18.252.006.914	16.731.965.739	91,7
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		16.246.336.914	14.784.773.454	91,0
1	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	3.683.798.914	3.467.155.492	94,1
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMHP Makasar	6.310.658.000	5.219.950.500	82,7
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBPL Bojo Barru	2.159.480.000	2.073.183.150	96,0
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPBAT Lajoa Soppeng	1.881.300.000	1.823.323.349	96,9
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPSKI Pangkep	952.800.000	951.416.813	99,9
6	Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Kantor UPTD PPMPT Barombong	742.000.000	739.054.450	99,6
7	Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Dinas	516.300.000	510.689.700	98,9

Program Peningkatan Disiplin Aparatur		770.000.000	736.935.250	95,7
1	Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur	770.000.000	736.935.250	95,7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1.235.670.000	1.210.257.035	97,9
1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan & Pelaporan Capaian Kinerja SKPD	1.078.620.000	1.054.766.832	97,8
2	Kegiatan Penyusunan Laporan Tahunan dan Data Statistik	157.050.000	155.490.203	99,0
B PERIKANAN TANGKAP, PESISIR & PULAU-PULAU KECIL		12.833.475.000	11.202.016.220	87,3
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir		3.318.725.000	3.176.773.920	95,7
1	Kegiatan Pengembangan Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	1.095.000.000	1.044.164.220	95,4
2	Kegiatan Pengembangan Unit Usaha dan Ekonomi Masyarakat Pesisir	2.223.725.000	2.132.609.700	95,9
Program Pengembangan Perikanan Tangkap, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		9.514.750.000	8.025.242.300	83,0
1	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Mekanisasi Perikanan Tangkap	5.748.000.000	4.542.566.400	79,0
2	Kegiatan Penyusunan Data Statistik Perikanan Tangkap	62.000.000	51.970.000	83,8
3	Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap Pengembangan Pelabuhan	3.704.750.000	3.430.705.900	92,6
C BINA USAHA DAN KELEMBAGAAN		4.610.438.000	4.393.217.415	95,3
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan		4.610.438.000	4.393.217.415	95,3
1	Pengembangan dan Pembinaan Kelembagaan Nelayan Petani Ikan	202.725.000	195.402.820	96,4
2	Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan	660.650.000	550.294.083	83,3
3	Pengembangan Lab. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan	1.507.050.000	1.496.244.999	99,3
4	Pembinaan Produksi Bernilai Tambah	1.540.713.000	1.500.076.490	97,4
5	Penyusunan Data Statistik Pengolahan Hasil-Hasil Perikanan	114.700.000	113.485.000	98,9
6	Pengembangan dan Promosi Hasil produk Perikanan	300.000.000	292.344.160	97,5
7	Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan dan Koperasi	284.600.000	284.600.000	86,2
D PERIKANAN BUDIDAYA		20.013.734.750	19.359.877.403	96,7
Program Pengembangan Budidaya Perikanan		20.013.734.750	19.359.877.403	96,7
1	Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Tawar	1.074.175.000	1.056.033.700	98,3
2	Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Komoditas Unggulan Perikanan (Udang dan Bandeng)	7.392.193.750	7.392.193.750	97,1
3	Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar	1.931.250.000	1.929.990.000	99,9

4	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	1.025.000.000	922.770.400	90,0
5	Pengembangan Kelompok Pembudidaya Ikan	1.549.800.000	1.472.247.900	95,0
6	Pengembangan Pelayanan Usaha Komoditas Unggulan Rumpun Laut	4.923.499.000	4.757.744.400	96,6
7	Penyusunan Data statistik Perikanan Budidaya	65.000.000	64.509.780	99,3
8	Pengembangan Laboratorium Kesehatan Ikan Pangkep	1.438.900.000	1.437.317.950	99,9
9	Pengembangan Teknologi Sistem Perbenihan Air Payau dan Laut	613.917.000	543.951.473	88,6
E PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SDKP		1.654.683.000	1.617.083.540	97,7
Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan		1.654.683.000	1.617.083.540	97,7
1	Pengawasan dan Peningkatan SDM Pengawas, PPNS dan Masyarakat Pengawas	595.770.000	594.159.510	99,7
2	Peningkatan Operasional Pengawas dan Sarana Prasarana Pengawas	300.000.000	288.785.250	96,3
3	Penyuluhan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan	758.913.000	734.138.780	96,7
TOTAL		57.364.337.664	53.304.160.317	92,9

Sumber : Sub Bagian Program

Lampiran 1. Wilayah Peta Penangkapan Udang, Tuna dan Rumput Laut



Lampiran 3. Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten /Kota di Sulawesi Selatan,
Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	Selayar	62.590	67.609	130.199
2	Bulukumba	194.013	216.472	410.485
3	Bantaeng	88.490	94.896	183.386
4	Jeneponto	171.882	183.717	355.599
5	Takalar	137.913	148.993	286.906
6	Gowa	355.381	367.321	722.702
7	Sinjai	115.202	122.897	238.099
8	Maros	165.881	173.419	339.300
9	Pangkep	156.288	167.309	323.597
10	Barru	82.207	89.010	171.217
11	Bone	354.502	388.410	742.912
12	Soppeng	106.391	119.725	226.116
13	Wajo	187.910	205.308	393.218
14	Sidrap	141.588	148.199	289.787
15	Pinrang	177.910	188.879	366.789
16	Enrekang	100.400	99.589	199.998
17	Luwu	172.092	178.126	350.218
18	Tana Toraja	115.913	113.071	228.984
19	Luwu Utara	151.993	150.694	302.687
20	Luwu Timur	141.687	133.908	275.595
21	Toraja Utara	113.291	112.225	225.516
22	Makassar	717.047	732.354	1.449.401
23	Pare-Pare	68.094	70.605	138.699
24	Palopo	82.301	86.593	168.894
	J u m l a h	4.160.975	4.359.329	8.520.304

Sumber : BPS prov. Sulsel

LAPORAN TAHUNAN 2015

Lampiran 4. Rekapitulasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Pengumpul, Penampung, Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan Tahun 2015 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014

NO	BULAN	SIUP
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	3.0
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	6.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	10.0
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	81.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	4.0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	0
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	150.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	1.0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	3.0
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	102.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	5.0
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	114.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	1.0
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	46.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	1.0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	5.0
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	93.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	7.0
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	56.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	8.0
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	75.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	2.0
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	46.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	3.0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	4.0
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	79.0
	- Kapal Perikanan 10 - 20 GT	4.0
	- Kapal Perikanan 21 - 30 GT	12.0
	TOTAL	921.0

Lampiran 5. Rekapitulasi Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Tahun 2015 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014

NO	BULAN	SIPI
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4.0
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	7.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4.0
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	102.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	10.0
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	199.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	12.0
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	110.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	8.0
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	121.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	6.0
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	52.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7.0
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	92.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	19.0
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	56.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	16.0
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	73.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7.0
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	40.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	18.0
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	65.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	21.0
TOTAL		1,049.0

LAPORAN TAHUNAN 2015

Lampiran 6. Rekapitulasi Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) Tahun 2015 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2013 dan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 872/IV/2014

NO	BULAN	SIKPI
1	JANUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5.0
2	FEBRUARI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	20.0
3	MARET	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7.0
4	APRIL	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	12.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5.0
5	MEI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	16.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	3.0
6	JUNI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	6.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	1.0
7	JULI	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	5.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7.0
8	AGUSTUS	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	10.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4.0
9	SEPTEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	11.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	4.0
10	OKTOBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	18.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	7.0
11	NOVEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	9.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	2.0
12	DESEMBER	
	- Kapal Perikanan 1 - 9 GT	24.0
	- Kapal Perikanan 10 - 30 GT	5.0
TOTAL		181.0

Sumber : Seksi Pembinaan Usaha

Lampiran 7. Data usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Kab/Kota	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja
1	Gowa	7	46
2	Wajo	5	85
3	Selayar	17	115
4	Luwu Utara	4	39
5	Soppeng	9	94
6	Bantaneg	53	730
7	Takalar	30	242
8	Palopo	56	527
9	Luwu Timur	7	68
10	Sinjai	8	105
11	Enrekang	8	186
12	Pinrang	40	539
13	Makassar	50	240
14	Pare-Pare	11	146
15	Bone	49	562
16	Bulukumba	9	100
17	Sidrap	5	54
18	Barru	34	381
19	Maros	8	80
20	Tana Toraja	5	47
21	Toraja Utara	3	25
22	Jeneponto	15	147
23	Pangkep	44	496
24	Luwu	5	52
TOTAL		480	5.106

Sumber :Seksi Pembinaan Usaha

Lampiran 8. Produksi BBW/Hatchery di Sulawesi Selatan, Tahun 2015

No	Nama BBW/Hatchery	Produksi Benur (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kab. Barru					
	Mitra sejahtera (Udang Vannamei)		21,000.0	68,000.0	69,000.0	158,000.0
	CV.Dewi Windu (Udang Windu)	2,786.0	2,675.0	627.0	835.0	6,923.0
	PT. Fishindo (Bandeng)		900.0	900.0	900.0	2,700.0
	MBK					
	- Bandeng	800.0				800.0
	- Udang Windu	22,000.0	12,500.0	-	6,000.0	40,500.0
	PT. Esa Putli Prakarsa Utama					
	- Bandeng	12,936.0	14,911.6	13,408.2	19,880.3	61,136.0
	- Udang Vannamei	303,346.4	257,288.9	236,015.0	451,186.6	1,247,836.8
	PT. Saniri jaya					
	- Udang Windu	30,000.0	-	21,000.0	54,000.0	105,000.0
	- Udang vannamei	53,000.0	12,000.0	6,000.0	36,000.0	107,000.0
	Puncak Sinunggal (Udang Windu)	17,500.0	9,500.0	8,000.0	10,500.0	45,500.0
	PT. IPUW Sidlo (Udang Windu)	1,031.4	-	1,687.0	241.3	2,959.7
	BBU BOJO					
	- Udang Windu	1,000.0	-	-	-	1,000.0
	- Udang vannamei	-	-	-	3,000.0	3,000.0
	Subjumlah (9)	444,400	330,775	355,637	651,543	1,782,356
2	Kab. Pinrang					
	PT. Jajaran Pantai Nusantara (Udang Windu)	5,900.0	7,000.0	5,200.0	7,500.0	25,600.0
	Bagindo Utama Suppa (Udang Windu)	14,000.0	24,000.0	14,000.0	15,000.0	67,000.0
	Bagindo benur Utama Langga (Udang Windu)	3,000.0	3,000.0	-		6,000.0
	PT. Andatu					
	- Udang Windu				4,000.0	4,000.0
	- Udang vannamei	2,500.0	2,500.0	2,000.0		7,000.0
	PT. Kencana Suppa Permai (Udang Vannamei)	38,000.0	38,500.0	35,000.0	38,000.0	149,500.0
	Subjumlah (5)	63,400.0	75,000.0	56,200.0	64,500.0	259,100.0

No	Nama BBW/Hatchery	Produksi Benur (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
3	Kab. Takalar					
	BBAP Takalar					
	- Bandeng	250,000.0	320,000.0	210,000.0	225,000.0	1,005,000.0
	- Udang Windu	15,000.0	15,800.0	16,300.0	18,000.0	65,100.0
	- Kerapu	13.0	12.0	15.0	17.0	57.0
	- Gracillaria	3.5	4.8	5.5	7.0	20.8
	- Eucheuma cottonii	5.0	5.0	7.0	8.0	25.0
	PT. Harapan Mina Jaya (Udang Windu)	3,500.0	6,000.0	5,500.0	6,600.0	21,600.0
	Windu Mas/Sentosa					
	- Bandeng	18,000.0	18,000.0	20,000.0	20,000.0	76,000.0
	- Udang Windu	2,500.0	7,000.0	6,400.0	7,500.0	23,400.0
	PT. Central Pertiwi Bahari (U. Windu)	2,200.0	5,500.0	7,000.0	8,000.0	22,700.0
	PT. Unimexco Jaya Sakti (U. Windu)	3,200.0	6,300.0	5,800.0	7,500.0	22,800.0
	UD. Karya Mandiri Benur					
	- Udang Windu	2,700.0	6,800.0	7,500.0	4,900.0	21,900.0
	- Udang Vannamei	6,500.0	8,000.0	12,500.0	15,000.0	42,000.0
	PT. Hartaco (U. Windu)	4,500.0	5,500.0	3,700.0	5,500.0	19,200.0
	PT. Surya Monodon (U. Windu)	4,300.0	5,000.0	7,500.0	8,000.0	24,800.0
	Subjumlah (8)	312,422	403,922	302,228	326,032	1,344,603
	Total Produksi (22)	820,221	809,697	714,065	1,042,075	3,386,058

umber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Lampiran 9. Produksi Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) di Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Nama Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	Produksi Benur (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kabupaten Barru					
	Hj. Hafsah/Sukardi (U.Windu)	650.0	-	-	475.0	1,125.0
	A. Ilham/Alesman (U.Windu)	1,113.0	-	1,600.0	1,200.0	3,913.0
	Umar/Jasman (U.Windu)	1,085.0	-	-	-	1,085.0
	Naufa Benur (U.Windu)	1,965.0	410.0	1,290.0	-	3,665.0
	Halim Asri Bahari (U.Windu)	150.0	80.0	-	480.0	710.0
	Windu Asyura Raya (U.Windu)	1,064.0	778.0	220.0	606.0	2,668.0
	Windu Pasifik (U.Windu)	450.0	300.0	250.0	450.0	1,450.0
	Cv. Rano (U.Windu)	5,000.0	2,500.0	2,000.0	9,000.0	18,500.0
	Anugrah Bumi Hero (U.Windu)	6,300.0	1,420.0	1,900.0	2,300.0	11,920.0
	Kupa Indah (U.Windu)	-	-	4,200.0	1,980.0	6,180.0
	Rezky Bersama (U.Windu)	3,450.0	3,600.0	1,300.0	770.0	9,120.0
	Benur Afiat-Komang (U.Windu)	4,430.0	2,750.0	2,250.0	1,850.0	11,280.0
	Benur Afiat-Mustakim (Bandeng)	-	-	430.0	420.0	850.0
	Ahmad (Bandeng)	-	850.0	700.0	950.0	2,500.0
	Benur sejahtera (U.Windu)	1,280.0	730.0	1,200.0	150.0	3,360.0
	Bahari (U.Windu)	1,800.0	1,150.0	1,900.0	1,700.0	6,550.0
	Ir. Amiruddin (U.Windu)	1,975.0	1,800.0	1,450.0	1,900.0	7,125.0
	H. Bennu-Meldi (Bandeng)	230.0	275.0	550.0	-	1,055.0
	H. Bennu-Sahrul (U.Windu)	450.0	-	-	-	450.0
	Meldi (U.Windu)	1,800.0	1,800.0	1,600.0	1,800.0	7,000.0
	Perintis (U.Windu)	3,400.0	1,000.0	2,100.0	1,500.0	8,000.0
	Malewa Monodon					
	- Udang Windu	6,400.0	975.0	500.0	1,475.0	9,350.0
	- Udang Vannamei	-	-	9,000.0	6,000.0	15,000.0
	M. Amin/A. Aco					
	- Udang Windu	2,500.0	1,750.0	1,000.0	550.0	5,800.0
	- Udang Vannamei	-	1,020.0	900.0	1,720.0	3,640.0
	Ezhar Benur (U. Windu)	1,800.0	2,300.0	-	2,000.0	6,100.0
	H. Burhan-Rusli (U. Windu)	1,200.0	800.0	-	1,500.0	3,500.0
	Anugrah Benur (U. Windu)	1,002.0	733.0	1,588.6	2,295.0	5,618.6
	A. Anwar-Yakub (U. Windu)	520.0	410.0	-	-	930.0
	Cakra Buana Monodon (U. Windu)	3,000.0	500.0	500.0	700.0	4,700.0
	Arminda Benur/Syamsu Rijal (U. Windu)	8,600.0		2,150.0	3,700.0	14,450.0
	Arminda Benur 2/Amri (U. Windu)	2,500.0		-	-	2,500.0
	Eva Benur (U. Windu)	600.0	870.0	-	1,900.0	3,370.0
	Benur Turikalle (U. Windu)	1,100.0		500.0	-	1,600.0
	Benur Segar (U. Windu)	225.0	461.0	100.0	1,249.0	2,035.0
	H. Baharuddin (U. Windu)	2,500.0	2,500.0	-	3,500.0	8,500.0
	Terang Abadi (U. Windu)		1,600.0	-	2,000.0	3,600.0
	Windu sinar Mas (U. Windu)	2,200.0	1,250.0	850.0	2,350.0	6,650.0

No	Nama Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	Produksi Benur (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
	Putra Benur (U. Windu)	700.0	1,400.0			2,100.0
	Herman (U. Windu)	830.0				830.0
	Bintang Benur (U. Windu)	3,350.0	3,650.0	2,200.0	-	9,200.0
	H. saharuddin					
	- Udang Windu	4,200.0	2,800.0	800.0		7,800.0
	- Udang Vannamei	3,150.0	2,100.0			5,250.0
	M. Tang- Hasanuddin (U. Windu)	600.0				600.0
	Sipurennu Benur (U. Windu)	1,440.0	960.0	700.0	840.0	3,940.0
	Matone Benur					
	- Udang Windu	2,700.0	7,000.0	2,970.0	4,600.0	17,270.0
	- Udang Vannamei	900.0		2,015.0		2,915.0
	Sinar Benur Lembae (U. Windu)	700.0	8,600.0	3,300.0	4,500.0	17,100.0
	Taromase benur (U. Windu)	30,000.0		-	85,000.0	115,000.0
	Subjumlah (45)	119,309	61,122	54,014	153,410	387,855
2	Kab. Pinrang					
	Benur Utama (U. Windu)	2,700.0	3,000.0	2,000.0	6,500.0	14,200.0
	Mahkota Windu (U. Windu)	3,400.0	3,500.0	1,800.0	5,000.0	13,700.0
	Buana Windu (U. Windu)	2,000.0	3,000.0	1,500.0	3,000.0	9,500.0
	Dua Putra (U. Windu)	1,500.0	1,300.0	500.0	1,000.0	4,300.0
	Ihlas (U. Windu)	2,400.0	3,000.0	1,700.0	4,500.0	11,600.0
	Rezki Benur (U. Windu)	3,100.0	3,500.0	3,000.0	5,000.0	14,600.0
	Subjumlah (6)	15,100.0	17,300.0	10,500.0	25,000.0	67,900.0
3	Kab. Takalar					
	Aeng Batu batu					
	- Bandeng	20,000.0	32,000.0	44,000.0	48,000.0	144,000.0
	- Udang Windu	500.0	750.0	750.0	1,000.0	3,000.0
	Mappakalombo					
	- Bandeng	15,000.0	26,000.0	43,000.0	52,000.0	136,000.0
	- Udang Windu	3,000.0	2,500.0	4,700.0	5,500.0	15,700.0
	Bontosunggu					
	- Bandeng	10,000.0	13,000.0	16,000.0	22,000.0	61,000.0
	- Udang Windu	3,000.0	3,000.0	5,000.0	5,000.0	16,000.0
	Bodia					
	- Bandeng	1,850.0	1,850.0	2,000.0	2,000.0	7,700.0
	- Udang Windu	2,500.0	3,500.0	4,000.0	5,000.0	15,000.0
	Sanrobone (Bandneg)	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	6,000.0
	Subjumlah (5)	57,350	84,100	120,950	142,000	404,400

No	Nama Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT)	Produksi Benur (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
4	Kab. Bone					
	H. Sumardi (U. Vannamei)	500	600	450	339	1,889.0
	SubJumlah (1)	500	600	450	339	1,889.0
5	Kab. Pangkep					
	Irwan (Bandeng)	1,000.0				1,000.0
	H. Ruslan (Bandeng)	1,500.0	1,450.0			2,950.0
	H. Muh Kasim (Bandeng)	1,050.0	1,100.0			2,150.0
	H. Mansur (Bandeng)	2,100.0	2,000.0			4,100.0
	H. Usman (Bandeng)	1,500.0	1,500.0		200.0	3,200.0
	Ansar (Bukit harapan (Bandeng))		700.0	120.0	173.0	993.0
	Minu (U. Windu)	2,800.0	3,600.0			6,400.0
	H. Abidin (U. Windu)	12,000.0	7,000.0	4,000.0	2,500.0	25,500.0
	Maulana (U. Windu)		800.0	500.0	500.0	1,800.0
	Budiman					
	- Bandeng			180.0	190.0	370.0
	- Udang Windu		900.0	250.0	900.0	2,050.0
	Mende (Bandeng)			150.0	107.0	257.0
	SubJumlah (11)	21,950	19,050	5,200	4,570	50,770
6	Kota Pare - Pare					
	UD. EDI LUMPUE (U. Windu)	55,000.0	40,000.0	65,000.0	40,000.0	200,000.0
	SubJumlah (1)	55,000.0	40,000.0	65,000.0	40,000.0	200,000.0
	TOTAL PRODUKSI	269,209	222,172	256,114	365,319	1,112,814
Jumlah HSRT yang memproduksi						69

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Lampiran 10. Produksi Balai Benih Ikan di Sulawesi Selatan Tahun 2015

No	Nama BBI	Produksi Benih (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Kab. Sijai					
	Tassilu (Ikan Mas)	58.3	62.0	78.0	88.0	286.3
	Palangka					
	- Ikan Mas	15.0	21.0	13.0	14.0	63.0
	- Ikan Nila	69.0	56.3	77.0	85.7	288.0
	Subjumlah (2)	142.30	139.30	168.00	187.70	637.30
2	Kota Palopo					
	Salupao					
	- Ikan Mas	145.0	158.0	178.0	169.0	650.0
	- Ikan Nila	145.0	259.0	355.0	229.0	988.0
	- Ikan Lele	22.0	35.0	44.0	67.0	168.0
	Subjumlah (1)	312	452	577	465	1,806
3	Kab. Wajo					
	Surae (Ikan Mas)	150.0	130.0	170.0	142.0	592.0
	Kalola					
	- Ikan Mas	123.0	159.0	168.0	152.0	602.0
	- Ikan Nila	145.0	168.0	215.0	184.0	712.0
	Subjumlah (2)	418.0	457.0	553.0	478.0	1,906.0
4	Kab. Bone					
	Amali					
	- Ikan Mas	11.0	15.3	17.0	10.0	53
	- Ikan Nila	16.0	13.0	15.9	22.0	66.9
	- Ikan Lele	16.0	13.0	21.0	17.0	67.0
	Subjumlah (1)	27	28	38	27	120
5	Kab. Pinrang					
	Malimpung					
	- Ikan Mas	130.0	95.0	130.0	90.0	445.0
	- Ikan Nila	136.0	155.0	78.0	104.0	473.0
	Subjumlah (1)	266.0	250.0	208.0	194.0	918.0
6	Kab. Takalar					
	Barugaya (Ikan Mas)	25.0	20.0	22.0	27.0	94.0
	Subjumlah (1)	25.0	20.0	22.0	27.0	94.0
7	Kab. Tana Toraja					
	Sangalla					
	- Ikan Mas	33.0	41.0	28.0	48.4	150.4
	Subjumlah (1)	33.0	41.0	28.0	48.4	150.4

No	Nama BBI	Produksi Benih (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
8	Kab. Toraja Utara					
	Rantepao					
	- Ikan Mas	300	320.0	280.0	300.0	1,200.0
	- Ikan Nila	100.0	120.0	100.0	100.0	420.0
	- Ikan Lele	30.0	50.0	50.0	100.0	230.0
	Subjumlah (1)	430	490	430	500	1,850.0
9	Kab. Luwu					
	Karetan (Ikan Mas)	-	425.0	275.0	300.0	1,000.0
	Rantai Damai I (Ikan Mas)	-	100.0	125.0	150.0	375.0
	Rantai Damai II (Ikan Mas)	-	150.0	175.0	194.0	519.0
	Bajo (Ikan Mas)	150.0	150.0	90.5	90.0	480.5
	Lamasi (Ikan Mas)	100.0	110.0	112.5	115.0	437.5
	Subjumlah (5)	250.0	935.0	778.0	849.0	2,812.0
10	Kab. Gowa					
	Limbung					
	- Ikan Mas	134.0	145.0	155.0	175.0	609.0
	- Ikan Nila	115.0	157.0	134.0	152.0	558.0
	Bontomanai					
	- Ikan Mas	295.8	301.0	227.0	311.0	1,134.8
	- Ikan Nila	259.0	221.0	198.0	301.0	979.0
	Bulu Tana					
	- Ikan Mas	170.0	144.0	135.0	120.0	569.0
	- Ikan Nila	132.0	120.0	116.0	135.0	503.0
	Subjumlah (3)	1,105.8	1,088.0	965.0	1,194.0	4,352.8
11	Kab. Enrekang					
	Sudu					
	- Ikan Mas	22.0	68.4	110.7	33.0	234.1
	- Ikan Nila	75.0	55.0	157.5	65.0	352.5
	Karrang					
	- Ikan Mas	39.3	100.1	71.4	106.0	316.8
	- Ikan Nila	85.0	74.0	359.4	144.0	662.4
	Subjumlah (2)	221.3	297.5	699.0	348.0	1,565.8
12	Kab. Soppeng					
	Sentral					
	- Ikan Mas	791.0	910.0	884.0	978.0	3,563.0
	- Ikan Nila	350.0	320.0	299.0	219.0	1,188.0
	- Ikan Lele	250.0	200.0	350.0	200.0	1,000.0
	Ompo					
	- Ikan Mas	120.0	150.0	100.0	80.0	450.0
	- Ikan Nila	200.0	180.0	120.0	100.0	600.0
	Citta					
	- Ikan Mas	80.0	95.0	80.0	150.0	405.0
	- Ikan Nila	220.0	135.0	115.0	175.0	645.0

No	Nama BBI	Produksi Benih (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
	Lajoa					
	- Ikan Mas	165.0	160.0	140.0	130.0	595.0
	- Ikan Nila	170.0	165.0	150.0	125.0	610.0
	Subjumlah (4)	2,346.0	2,315.0	2,238.0	2,157.0	9,056.0
13	Kab. Sidrap					
	Passeno					
	- Ikan Mas	110.8	86.0	108.0	151.0	455.8
	- Ikan Nila	145.0	175.0	145.0	174.0	639.0
	Pangkajene					
	- Ikan Mas	123.0	105.8	55.0	92.0	375.8
	- Ikan Nila	132.0	245.0	127.0	108.0	612.0
	Majjelling					
	- Ikan Mas	78.0	83.0	79.0	88.0	328.0
	- Ikan Nila	117.0	138.0	162.0	185.0	602.0
	Kalosi					
	- Ikan Mas	61.0	59.0	77.0	93.0	290.0
	- Ikan Nila	112.0	121.0	132.0	150.0	515.0
	Subjumlah (4)	878.8	1,012.8	885.0	1,041.0	3,817.6
14	Kab. Maros					
	Bantimurung					
	- Ikan Nila	150.0	198.0	165.0	221.0	734.0
	Subjumlah (1)	150.0	198.0	165.0	221.0	734.0
15	Kab. Bulukumba					
	Tanete					
	- Ikan Mas	19.0	16.0	17.0	18.0	70.0
	- Ikan Nila	135.3	145.0	119.0	227.0	626.3
	- Ikan Lele	12.0	15.0	13.0	11.0	51.0
	Subjumlah (1)	166.3	176.0	149.0	256.0	747.3
16	Kab. Luwu Utara					
	Salulemo					
	- Ikan Mas	132.0	125.0	110.0	150.0	517.0
	- Ikan Nila	120.0	135.0	160.0	148.0	563.0
	Subjumlah (1)	252.0	260.0	270.0	298.0	1,080.0
17	Kab. Luwu Timur					
	Margolembo (Ikan Mas)	93.0	88.0	95.0	79.0	355.0
	Towuti (Ikan Mas)	77.0	85.0	102.0	95.0	359.0
	Subjumlah (2)	170.0	173.0	197.0	174.0	714.0

No	Nama BBI	Produksi Benih (1.000 ekor)				Jumlah
		I	II	III	IV	
18	Kab. Bantaeng					
	Rappoa					
	- Ikan Mas	239	375	441	490	1,545
	- Ikan Nila	177.0	258.0	311.0	163.0	909
	- Ikan Lele	560.0	489.0	595.0	375.0	2,019
	Subjumlah (1)	416	633	752	653	2,454
19	Kota Makassar					
	Parang Tambung					
	- Ikan Mas	1	2	-	1	4
	- Ikan Nila	18.0	14.0	11.0	17.0	60
	- Ikan Lele	1.0	3.0	1.0	5.0	10
	Subjumlah (1)	20	19	12	23	74
	TOTAL PRODUKSI	8,206	9,487	9,745	9,538	36,975
	TOTAL BALAI BENIH IKAN YANG BEREPRODUKSI					35

Sumber : Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya

Lampiran 11. Realisasi Volume dan Nilai Ekspor Hasil Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME (TON)	NILAI (US\$)
1	DRIED SEA WEED (RUMPUT LAUT KERING)	21,748.45	104,919,593.55
2	FROZEN SHRIMP (UDANG BEKU)	4,219.88	54,548,089.45
3	FRESH FISH (IKAN SEGAR)	2,413.68	9,947,655.00
4	FRESH GROUPER FISH (IKAN KERAPU SEGAR)	1,973.20	5,321,107.50
5	FRESH MACKEREL FISH (DAGING IKAN TENGGIRI SEGAR)	1,838.53	5,867,586.50
6	FROZEN OCTOPUS (GURITA BEKU)	1,278.34	5,325,717.16
7	FROZEN YELLOWFIN TUNA (DAGING TUNA BEKU)	1,138.01	8,005,686.40
8	DRIED FLYING FISH ROE (TELUR IKAN TERBANG KERING)	1,037.13	15,402,322.10
9	PASTEURIZED CRAB MEAT CANNED (DAGING KEPITING KALENG)	985.39	17,754,247.04
10	FRESH TUNA LOIN (DAGING IKAN TUNA LOIN SEGAR)	514.50	3,947,284.50
11	FROZEN MAHIMAH (DAGING MAHIMAH BEKU)	433.46	3,429,813.75
12	DRIED SEA CUCUMBER (TERIPANG KERING)	352.63	622,208.35
13	FROZEN GROUPER FILLET (DAGING IKAN KERAPU FILLET BEKU)	192.84	1,247,320.24
14	FROZEN FLYING FISH ROE (TELUR IKAN TERBANG BEKU)	176.69	1,306,346.70
15	FROZEN CUTTLEFISH (CUMI-CUMI BEKU)	174.09	334,717.16
16	FROZEN SNAPPER (IKAN KAKAP BEKU)	155.78	1,391,987.20
17	FROZEN FISH (DAGING IKAN BEKU)	126.92	836,775.00
18	FROZEN RIBBON FISH/HAIRTAIL (IKAN LAYUR BEKU)	125.12	204,827.75
19	FROZEN SNAPPER FILLET (DAGING IKAN KAKAP FILLET BEKU)	119.32	1,359,494.62
20	FROZEN FISH FILLET (DAGING IKAN FILLET BEKU)	106.32	692,173.49
21	FROZEN SQUID (SOTONG BEKU)	83.09	206,018.51
22	FRESH SNAPPER (IKAN KAKAP SEGAR)	72.88	434,257.50
23	FRESH PARROTFISH (DAGING IKAN KAKAK TUA SEGAR)	34.48	124,860.00
24	FROZEN SEA EEL FILLET (BELUT BEKU)	31.52	40,141.60
25	FRESH PARROTFISH FILLET (DAGING IKAN KAKAK TUA FILLET BEKU)	28.88	99,717.50
26	FROZEN MACKEREL FISH FILLET (DAGING IKAN TENGGIRI FILLET BEKU)	22.48	110,653.50
27	FROZEN MACKEREL FISH (DAGING IKAN TENGGIRI BEKU)	20.30	97,290.00
28	FROZEN LEATHER JACKET FISH (IKAN SUKANG BEKU)	19.94	15,952.40
29	KATSUOBUSHI (IKAN KAYU)	19.75	163,769.00
30	FROZEN SLIPPER LOBSTER (LOBSTER BEKU)	19.58	296,059.22
31	FROZEN PARROTFISH FILLETS (DAGING IKAN KAKAK TUA FILLET BEKU)	16.90	80,673.00
32	FRESH RIBBON FISH/HAIRTAIL (IKAN LAYUR SEGAR)	16.14	19,793.60
33	FROZEN ANCHOVY (IKAN TERI BEKU)	13.96	22,640.00
34	FROZEN PARROTFISH (DAGING IKAN KAKAK TUA BEKU)	12.41	48,958.04
35	FROZEN GROUPER (DAGING IKAN KERAPU BEKU)	9.08	22,061.40

NO	JENIS KOMODITI	VOLUME (TON)	NILAI (US\$)
36	FRESH EMPEROR (IKAN KATAMBA SEGAR)	8.13	22,750.00
37	FROZEN MAHIMAHI FILLET (DAGING MAHIMAHI FILLET BEKU)	7.18	19,467.00
38	FROZEN EMPEROR FILLETS (IKAN KATAMBA FILLET BEKU)	7.17	64,302.60
39	FROZEN CRAB MEAT CANNED (DAGING KEPITING KALENG BEKU)	6.74	50,720.80
40	FRESH MAHIMAHI (IKAN MAHIMAHI SEGAR)	6.66	33,510.00
41	FROZEN EMPEROR (IKAN KATAMBA BEKU)	6.16	57,054.02
42	FROZEN POMFRET (IKAN BAWAL BEKU)	6.15	21,675.00
43	FROZEN THREADFIN (IKAN MERAH BEKU)	5.64	15,560.00
44	FROZEN THREADFIN BREEM FILLET (IKAN MERAH FILLET BEKU)	4.37	12,230.00
45	DRIED SQUID (SOTONG KERING)	3.23	72,856.20
46	FRESH POMFRET (IKAN BAWAL SEGAR)	2.98	14,660.00
47	FROZEN SWEETLIPS FISH FILLET (DAGING IKAN KANEKE FILLET BEKU)	2.26	5,077.40
48	FROZEN BARRAMUNDI (IKAN BARRAMUNDI BEKU)	1.51	15,142.00
49	FRESH BARRAMUNDI (IKAN BARRAMUNDI SEGAR)	0.98	4,650.00
50	FROZEN SILVER SILLAGO (IKAN PERAK BEKU)	0.51	408.00
51	DRIED FISH MAWS (PERUT IKAN KERING)	0.45	1,575.00
52	FRESH SHRIMP (UDANG SEGAR)	0.08	320.00
53	FROZEN SALTED SEA URCHIN (TELUR BULU BABI BEKU)	0.02	426.00
54	FROZEN SHRIMP HEAD (KEPALA UDANG BEKU)	0.01	12.00
55	FROZEN SWORDFISH (IKAN PEDANG BEKU)	0.003	12.50
56	POWDER KATSUOBUSHI (IKAN SERBUK ASAP)	0.001	0.75
TOTAL		139,601.88	244,660,208.00

Sumber : Disperindag dan Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

Lampiran 12. Rekapitulasi Volume Pengujian Tahun 2015

No	Parameter	Jenis Pengujian				Total Pengujian Tahun 2015
		Test Result (TR)	Monitoring	Monitoring Internal	Targeting Sampel	
	Organoleptik					
1	- Uji Sensori	2.052	8	21	40	2.121
	Kimia					
2	- Histamin	459	80	30	55	624
3	- Chlorampenikol	450	52	35	10	547
4	- Logam Berat (Pb)	344	101	40	12	497
	(Hg)	344	101	40	12	497
	(Cd)	344	101	40	12	497
5	- Tetracyclin	319	1	13	0	333
6	- Formalin	0	155*)	0	0	155
	Mikrobiologi					
7	- ALT	1.604	211	78	105	1.998
8	- ALT (kualitas Air)	0	0	677	10	687
9	- E. coli	1.604	220	80	147	2.051
10	- Coliform	1.604	15	25	4	1.648
11	- E.coli dan coliform (kualitas air)	0	0	986	102	1.088
12	- Salmonella	1.595	213	79	192	2.079
13	- Vibrio Chollerae	1.590	159	66	2	1.817
14	- Vibrio parahaemolyticus	1.181	101	34	0	1.316
15	- Staphylococcus aureus	932	60	26	27	1.045
16	- Listeria monocytogenes	209	102	0	0	311
17	Kapang dan Khamir	55	10	0	49	114
18	- Enterococci Intestinal (kualitas air)	0	0	291	51	342
19	TVB	6	98	0	0	104
		HC	Non HC			19.871

Sumber : UPTD Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Sulsel

Ket :

Monitoring : Pengujian Monitoring terhadap sampel atas permintaan dari UPI

Monitoring Internal : Pengujian Monitoring Internal yang diprogramkan oleh Lab terhadap sampel dari UPI sebagai data atas mutu produk masing-masing UPI (dilakukan 4 kali dalam setahun)

Targeting Sampel : Pengujian berdasarkan hasil surveilen ke UPI

Test Result : Pengujian berdasarkan permintaan UPI

*) : Monitoring yang dilaksanakan oleh pengujian

Lampiran 13. Rekapitulasi Jumlah Pokmaswas Aktif Berdasarkan Hasil Evaluasi Kinerja Tahunan Pokmaswas sampai dengan Desember 2015

	Kab/Kota	Jumlah Pokmaswas	Jumlah Anggota Aktif	Jumlah Pokmaswas (Klp)	
				Aktif	Tidak
1	Takalar	18	373	17	1
2	Bulukumba	20	172	11	9
3	Luwu Timur	14	92	4	10
4	Wajo	7	137	7	0
5	Bone	58	213	12	46
6	Barrau	5	99	5	0
7	Makassar	6	36	4	2
8	Luwu Utara	11	157	10	1
9	Sinjai	11	193	8	3
10	Pangkep	32	489	16	16
11	Palopo	8	25	2	6
12	Selayar	7	34	4	3
13	Pinrang	9	184	7	2
14	Luwu	7	63	4	3
15	Jeneponto	10	45	2	8
16	Maros	4	53	3	1
17	Bantaeng	11	121	11	0
18	Gowa	2	65	2	0
19	Sidrap	1	0	0	1
20	Pare - Pare	2	29	2	0
JUMLAH		243	2.580	131	112

Sumber : Seksi Pengembangan SDM Pengawasan KP

Lampiran 14. Data SDM PPNS Perikanan yang Aktif dibidang Pengawasan SDKP Kab/Kota dan Provinsi Hasil Pembinaan Seksi Pengembangan SDM Pengawasan KP Tahun 2015.

No	Nama PPNS	Satuan Instansi	Status SKEP PPNS		No.SKEP PPNS/Tahun Penerbitan
			Ada	Tdk Ada	
1	Harun Usman	DKP Sulsel	-	-	AHU.35.AH.09.04.2012
2	Syamsuddin Nur, S.Pi	DKP Sulsel	Ada	-	-
3	Anwar Abd. Rahim	DKP Sulsel	-	-	AHU-69AH09.01 Tgl 8-12-2010
4	Nursalam, S.Pi, M.Si	DKP Sulsel	Ada	-	-
5	Muh. Gazali, S.Pi	DKP Sulsel	-	-	-
6	Sumailu, S.Pi	DKP Sulsel	-	-	-
7	A.Muh. Abdul R, S.Pi	DKP Sulsel	-	-	-
8	Martinus Sujarwo	DKP Kota Makassar	Ada	-	-
9	Muh. Ansar	DKP Sinjai	Ada	-	C-7 PW 07.03
10	Subandi	DKP Sinjai	Ada	-	C-48 PW 07.03
11	Sanawiah, S.St	DKP Pangkep	-	-	-
12	Asrul, S.Pi	DKP Pangkep	Ada	-	AHU-72.AH.09.01 Tgl 13-12-2010
13	Ir. Fatahillah, MM	DKP Palopo	-	-	-
14	Muh. Nur, A.Md	DKP Palopo	Ada	-	C-52-HN-05.01
15	Dr. Marjani Sultan, M.Si	DKP Selayar	Ada	-	AHU-45.AH.09.01
16	Andi Jaelani, SP	DKP Selayar	Ada	-	C-52-HN-05.01 Tgl 6-10-2005
17	Zul Janwar, S.Kel, M.Si	DKP Selayar	Ada	-	AHU-45.AH.09.01 Tgl 24-11-2011
18	Kaharuddin, S.Pi	DKP Jeneponto	Ada	-	AHU-32.AH.09.01 Tgl 7-6-2011
19	Muh. Ibrahim, S.Sos	DKP Barru	Ada	-	C-7 PW 07.03
20	Abdul Rachman, SE, S.Sos	DKP Bone	Ada	-	AHU-70.AH.09.01 Tgl 8-12-2010
21	Pahmi, S.Pi	DKP Pinrang	Ada	-	AHU-.AH09.01
22	Lutfi, S.Pi, M.Si	DKP Pinrang	Ada	-	AHU-.AH09.01
23	Abd. Hakim Ischak, S.Pi	DKP Takalar	Ada	-	AHU-69.AH.09.01 Tgl 8-12-2010
24	Muh Erwin Azis, S.Pi	DKP Sulsel	Ada	-	AHU-50.AH.09.01.2015

Sumber : Seksi Pengembangan SDM Pengawasan Kelautan dan Perikanan

Lampiran 15. Produksi Benih dan Jumlah Induk pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Air Payar La'joa Soppeng Tahun 2015

I. PRODUKSI BENIH

Produksi benih ikan yang dihasilkan selama tahun 2015 sebanyak 4.750.000 Ekor berukuran 1 – 3 cm, dengan perincian sebagai berikut :

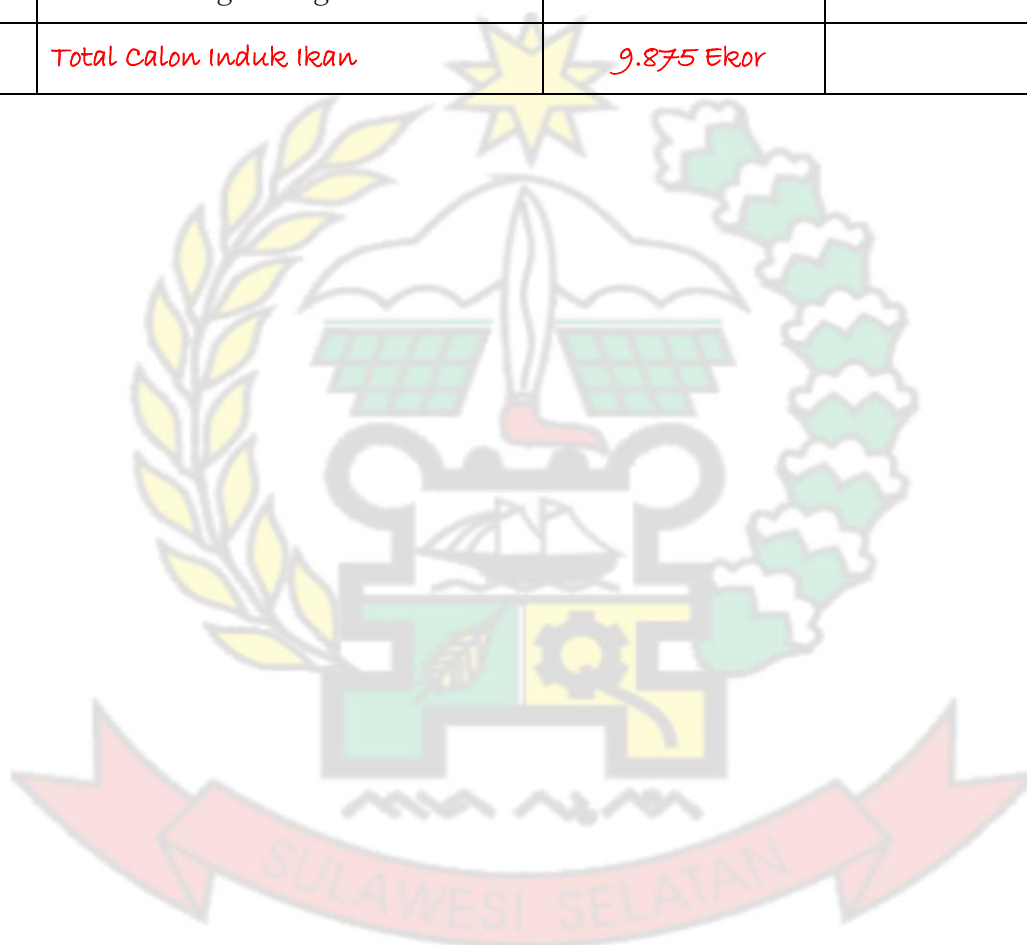
- Ikan Mas : 3.562.500 Ekor
- Ikan Nila : 1.187.500 Ekor

II. JUMLAH INDUK DAN ASAL

No	Jenis	Jumlah	Asal
1	Ikan Mas - Jantan - Betina	300 Ekor 100 ekor 200 ekor	Sukabumi
2	Ikan Nila Best - Jantan - Betina	400 Ekor 100 ekor 300 ekor	Bogor
	Ikan Nila Sultana - Jantan - Betina	100 Ekor 30 ekor 70 ekor	Sukabumi
	Ikan Nila Merah - Jantan - Betina	250 Ekor 75 ekor 325 ekor	Surabaya
	Ikan Nila Silver - Jantan - Betina	100 Ekor 25 ekor 75 ekor	Surabaya
3	Lele Sangkuriang - Jantan - Betina	70 Ekor 40 ekor 30 ekor	Sukabumi
4	Ikan Patin - Jantan - Betina	40 Ekor 10 ekor 30 ekor	Bogor
5	Ikan Koi - Jantan - Betina	25 Ekor 15 ekor 10 ekor	Makassar
	Total Induk Ikan	1.285 Ekor	

III. CALON INDUK DAN ASAL

No	Jenis	Jumlah	Asal
1	Benih Ikan Patin	5.000 Ekor	Sukabumi
2	Ikan Mas GPS Majalaya	875 Ekor	Manado
3	Ikan Nila Sultana	3.600 Ekor	Manado
4	Ikan Lele Sangkuriang	400 Ekor	Manado
	Total Calon Induk Ikan	9.875 Ekor	



Lampiran 16. Data Produksi Pembenihan Udang Windu pada UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai Tahun 2015

A. Data Produksi Perbenihan Udang Windu dan Vannamei Tahun 2015

1. Data Siklus

No	uraian	Keterangan
1	Siklus I	Maret 2015
2	Siklus II	Juni 2015
3	Siklus III	Oktober – Desember 2015

2. Data Jumlah Benur

No	uraian	Jumlah Benur
1	Siklus I	400.000 Ekor
2	Siklus II	800.000 Ekor
3	Siklus III	600.000 Ekor Windu 1.501.000 Ekor Vannamei

3. Data Distribusi Benur

No	uraian	Daerah Distribusi
1	Siklus I	Pinrang, Pangkep, Luwu Timur & Majene
2	Siklus II	Pare-pare, Pinrang, Pangkep & Mamuju
3	Siklus III	Barro, ParePare, Pangkep & Malili

B. Data Produksi Budidaya Tambak Tahun 2015

Panen Udang Vannamei pada tambak percontohan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel UPTD Pembinaan dan Pengembangan Budidaya Laut dan Pantai TA. 2015 diBacukiki Pare – Pare dan Palanro adalah sebesar 350 Kg dengan size yang bervariasi dengan rincian sebagai berikut :

- Petak I (Palandro) : 140 Kg (Tanpa Size)
- Petak II (Palandro) : 110 Kg (Size 200/Kg)
- Petak III (Bacukiki) : 100 Kg (Size 200/kg)
- Jumlah : 350 Kg

Lampiran 17. Daftar Unit Pengolahan Ikan/udang dan Rumput Laut Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2015

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
1	PT. Bogatama Marinusa	Jl. Kima Raya 2 Kav. N. 4-BI Makassar Telp (0411)513378 Fax (0411) 513373	Frozen cooked shrimp Frozen Breaded shrimp Frozen Raw Shrimp
2	PT. Mitra Kartika Sejati	Jl. Kima Raya I Kav. D-1b , Makassar Telp (0411) 514515,514782 Fax (0411) 515430	Frozen Shrimp Frozen cooked shrimp
3	CV. Bone Agung Mina Persada	Jl. Wiyatamandala Kel. Lonrae Timur. Telp(0481)26555 Fax (0418) 26776 081 355 087 788	Frozen Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Pelagic Fish Frozen Chepalopods
4	PT. Multi Monodon Indonesia	Jl. Kima raya I Blok D-2B Telp(0411) 514515, 514782 Fax (0411) 515430 085 255 103 877	Frozen cooked shrimp Frozen Raw Shrimp Frozen Demersal Fish Frozen Cephalopods Frozen Tuna (loin, steak) Frozen Farm Raised Fish (lele) Dried Flying Fish Roe
5	PT. South Suco	Jl. Kima VI Blok G/IV B Telp(0411) 510201, 510215 Fax (0411) 510049	Frozen Shrimp
6	PT. Wahyu Pradana BM	Jl. Kima raya I Blok D No. 2C Telp(0411) 4720895, 870760 (0411) 6191011	Frozen shrimp Dried flying fish roe Frozen Demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh Tuna Frozen Tuna Frozen Cookedshrimp
7	CV. Prima Indo Tuna	Jl. Ir. Sutami No. 32 0811442826	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen Demersal Fish
8	PT. Sinar Graha	Jl. Sultan Abdullah No. 59 0816256106 (0411) 6074710 (Johan)/085 342 536 1093 081 356 152 866 (Indri)	Frozen Pelagic Fish Frozen Slipper Lobster Frozen Octopus Frozen Fish Fillet
9	PT. Perikanan Nusantara	Jl. Sabutung 1 No.1. Telp.)411-21625	Frz Demersal & Pelagic Fish Frozen Chepalopods
10	PT. Prima Bahari Inti lestari	Jl. Kima 12 Kav. 5C Telp (0411) 512688 Fax (0411) 514163	Fresh tuna, Frozen Tuna Fresh chepalopods Frozen Chepalopods Fresh fillet fish Frozen Chepalopods Fresh fish Frozen Demersal Fish Frozen Boneless Milkfish

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
11	PT. Chen Woo Fishery	Jl. Kima 4 Blok K. 9/B2 Telp (0441) 515555 Jl.Kima 4 Kav.P-28,Makassar	Fresh tuna Frozen tuna Ikan Demersal Beku Ikan Demersal Segar
12	PT. Phillips Seafood Indonesia	Jl. Lamellang No. 42 kel. Bojo baru Kec. Mallusetasin Kab. Barru Fax (0411) 21105 Telp (0411) 21625	Chilled pasteurized crab meet Frozen Pasteurized crabmeat Can Frozen demersal fish Ikan Scombroid Beku
13	CV.Ome tradingcoy	Jl. Poros kanjilo gowa 085243020588 Fax (0411) 8216946 085 243 020 588, 081 355 468 790	Hana katsuobushi
14	PT. Donglim Jireh	Komp kima square blok B. 1-2, 0816251276	Dried Flying Fish Roe
15	PT. Dunia Marine Product	Jl. Kima 3 Kav. 4b Telp (0411) 512619 Fax (0411) 512625,081241629172	Dried flying fish roe Frozen Shrimp FrzCephalopods, Teripang krg
16	PT. Kawa Guti	Jl. Tool lama no.22 Telp (0411) 512615 Fax (0411) 514826	Frozen flying fish roe (Dried Flying Fish Roe)
17	PT. Omeresso food	Jl. Poros Kanjilo, Barombong Gowa 085243020588	Katsuo Powder Hana Katsuo
18	CV. Makassar jaya	Jl. Batara bira 6 Komp. PU No. 13 081524424900	Dried sea cucumber
19	PT. Multi Sari Makassar	Jl. Kima 14 Kav. SS 12 Telp (0411)4723232 085 342 729 113	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish Frozen chepalopods Fresh chepalopods Frozen Tuna, Fresh Tuna Frozen Shrimp, Fresh Shrimp
20	PT. Parlevliet Paraba	Jln. Jembatan Tua No.89 Kel. Bontoa Kec. Mandai Kab. Maros 0812 4219 685 Telp(0411)5439100, fax(0411)550623	Fresh Tuna & Frozen Tuna Fresh Pelagic, & Frz. Pelagic Fresh & Frz. Demersal Fish Fresh Cephalopods
21	PT. Kemilau Bintang timur	Jl. Kima 3 Kav. 2A Telp (0411) 512808, 512828 Fax (0411) 513000 082 193 088 277	Frozen Crabmeat Frozen Pasteurized crabmeat Frozen Raw shrimp Frozen chepalopods Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Demersal fissh Frozen Demersal fissh Fresh Farm Raised Fish Frozen Farm Raised Fish

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
22	CV. Usaha Centra Jaya Sakti	Jl. Kima V Kav. E No.31 Telp (0411) 514781 Fax (0411) 514781, 3619169 0811 416 889	Frozen octopus frozen tuna & fresh Tuna Fresh demersal fish Frozen Demersal Fish Fresh Milk Fish
23	UD Resky Bahari	Jl. Perintis kemerdekaan km. 19 Telp (0411) 5787951, fax 4813721 081 385 139 566 (Kasman) 081 397 222 534 (Lena)	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish
24	CV. Jaya Indah Cemerlang	Jl. Buru No. 47 Telp (0411) 6077171 081 342 540 495 (Frans)	Fresh Pelagic Fish Fresh Demersal Fish Dried Shark Fin Sea Cucumber
25	PT. Global Seafood International Indonesia	Jl. Poros Bantaeng, Bulukumba Km. 131 Ds. Pa'jukukang, Kec. Pa'jukukang Kab. Bantaeng Telp (0413) 2424828 Fax(0413) 2424873 085 256 245 392 (Fandi)	Frozen Surimi
26	PT. Ocean Cham Seafood	Jl. Kima 7 Kav. J-2 Telp(0411) 514827, 510866 Fax (0411) 510686	Pateurized Canned Crab meat
27	PT. Kelola Mina laut	Jl. Kima 17 Blok DD-15-16, Makassar 085242009787 Fax (0411) 4723256	Frozen demersal fish Frozen pelagic fish Frozen cephalopods
28	CV. Sumber Bahari Mandiri	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 12 Ruko No. 5 Telp(0411) 510666, 513518 Fax(0411) 511666	Produk kering (Dried Sea Cucumber, sirip Ikan, Perut Ikan, abalone dan rumput laut)
29	CV. Hokky Seafood	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko 17 Telp(0411) 48136251, 434018,5030822 Fax (0411)420618	Live Crab Fresh Tuna Fresh Demersal&Pelagic Fish
30	CV. Anugerah Sejati	Jl. Metro Tanjung Bunga A.33 Ruko Somba Opu (0411) 8113919	Dried Flying Fish Roe
31	CV. Udin Jaya	Jl. Komp Perumahan Nusa Indah mas	Frozen pelagic Fish Live fish
32	PT. Mina Maju Sejahtera	Jl. Cinrae No. 1, Bulu-Bulu Kec. Marusu Kab. Maros 081355689123, 081355105171 (Surya) Fax (0411) 555 386	Fresh Demersal Fish Fresh Pelagic Fish Fresh hrimp Live Fish
33	PT. Anugerah Bintang Cemerlang	Jl. Bambu runcing No. 99 081343512389	Fresh&Frozen Tuna
34	PT. Nusa Dwipa Citra Tunggal	Jl. Kima VII Blok J. N. 4 Telp (0411)514514,513555 081 342 089 182	Frozen Fish
35	PT. Wahyu Putra BimaSakti	Jl. Kima 10 T-2B Makassar	Carrageenan Chip
36	UD. Atops	Jl. Bahagia No. 2 Telp (0411) 556581 Fax (0411) 556582	Dried flying Fis Roe

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
37	CV. Inti Makmur	Jl. Kima 6 Blok F1/A2 telp (0411) 514242, Fax (0411)514338	Fresh & Frozen Tuna Fresh & Frozen demersal Fish Frozen Chepalopods Fresh & Frozen Shrimp
38	PT. Mitra Sejahtera Makassar	Jl. Ir. Sutami Blok G2 No.11 (0411) 2606099	Rumput Laut
39	UD. Delton	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Blok C No. 11 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
40	CV. Sentosa Bimantara Laut	Jl.Ir.Sutami Pergudangan karunia Sulawesi Blok C No. 10 Makassar SulSel	Rumput laut Kering
41	PT. Giwang Citra Laut	Poros Pabrik Gula Takalar Km 1,5 Ds.Pa'rappunganta,polombangkeng Utara.Kab. Takalar	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
42	Koperasi Agroniaga	JL. BAKAU NO. 66, KOTA PALOPO Fax (0471) 832513, 0812 4214 301	Dried Seaweed
43	PT. Sumberguna Makassar Nusa	Jl. Ujung Pandang Baru No.17 Makassar	Dried Seaweed
44	PT. Rapid Niaga International	Jl. Ir. Sutami Blok L.5, Makassar	Dried Seaweed
45	CV. Putri Jaya	Kawasan Pergudangan Parang Loe Indah Telp. 085399127997, 081141048815	Dried Seaweed
46	CV. Adi Tirta	Jl. Sabutung No. 123 Makassar (0411) 452782, 45282	Dried Seaweed
47	CV. Benur Rahma	Jl. Tala-Tala Ds. Pattinong, Kec. Galesong Takalar. Telp. 085343822833, (0411) 82326564	Dried Flying fish roe
48	PT. Rika Rayhan	Jl. Kima 4 Kav.P3A, Makassar	Dried Seaweed
49	UD. Centralindo Agar Utama	Gudang Parangloe Indah Blok E No. 10 Makassar Telp.(0411) 5774648, Fax.(Dried Seaweed
50	PT. Mega Citra Karya	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A.Mks	Dried Seaweed
51	CV. Bintang Mas Sportindo	Jl. Pemuda Pantai Salu Songka Kec. Wara Timur, Kota Palopo.	Dried Seaweed
52	CV. Pelita	Jl. Ir. Sutami No.1 Gudang A Mks	Dried Seaweed
53	UD. Baharu	Komplek Pergudangan lantebung Jl.Ir. Sutami Blok A.12 No.5 Makassar	Dried Seaweed
54	CV. Agro Mina Dewata	Jl. Sungai Saddang Baru N0.9A, Makassar	Fresh Demersal Fish
55	PT. Bantimurung Indah	Jl. Sam Ratulangi No. 163, Maros.	carrageenan Chips Semi Refined Carrageenan
56	PT. Biru Laut Nusantara	Jl. Kima VIII Kav. SS No.23A Kima, Makassa	Frozen Tuna
57	PT. Nuansa Cipta Magello	Jl. Kima 3 Kav.5 Makassar	Daging Rajungan Kaleng Past

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
58	PT. Mitra Timur Nusantara	Jl. Sultan Abdullah Raya Lrg,3 No. 9 Makassar Fax (0411) 428228 081 2413 3739	Ikan Demersal Beku Ikan Pelagis Beku Chephalopoda Beku Tuna Beku
59	PT. Mina Timur Indonesia	Jl.ABD.Kudus barombong kec. Tamalate, Makassar. Telp (0411) 2122637 081 241 333 359 (Sri)	Telur ikan terbang kering.
60	PT. Sentosa Sumber galesong	Komps.Graha Satelit Blok A/20 Jl. Sultan Hasanuddin , Sungguminasa Gowa, Makassar.	Telur ikan terbang kering
61	PT. Sinar Laut Nusantara	Ds Cikoang,DesaLakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Fresh Demersal Fish Frozen Demersal Fish Fresh Pelagis Fish Frozen Pelagis Fish Fresh Chepalopods Frozen Cephalopods Fresh&Frozen Lobster Fresh&Frozen Slipper Lobster, Fresh Milkfish Fresh Shrimp
62	PT. Tujuh Samudera Jaya	Jl. Malino Ds. Nirannuang, kec Bontomarannu, Gowa	Frozen Flying Fish Roe
63	PT. Asia Sejahtera Mina	Jl. Ir. Sutami Kawasan Terpadu Logistik Blok A-1 Makassar	Dried Seaweed
64	UKM "88 Marijo"	Jl. Poros Pinrang-Pare,Kel.Manarang (bulu) Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang	Boneless Milkfish
65	PT. Mitra Sejahtera	Jl. Ir. Sutami No. 38 Blok H2-10, Makassar	Dried Seaweed
66	CV. Eltisyah	Jl. Monumen Emmy Zaelan III Komplek BTN Agraria blok q9/24,Makassar	Fish JELLY Product
67	PT. Karya Jaya Mandiri	Jl. Prof.Ir. Sutami no.15A, Makassar	Dried Seaweed
68	PT. Goh Fadel Buana	Jl. Poros Makassar-Maros no. 126 Ballu- Ballu Kel. Taroada, Kec. Turikale, Makassar	Fresh Pelagic Fish Frozen Pelagic Fish fresh Demersal Fish frozen Demersal Fish Frozen Fish Fillet
69	PT. Lintas Antar Nusa	Jl. Poros Kupa , Kec. Mallusetasi, Barru	Ikan Terbang beku
70	PT. Lintas Antar Nusa	Desa Aeng batu-Batu, Galesong Utara, Kab. Takalar	Frozen Dried Flying fish roe
71	PT. Anugerah Gemilang sukses sedayu	Jl.Poros Macoppa Maros Km.26. No.44 Kab.Maros	Dried Seaweed
72	PT. Galesong	Jl. Baso Dg. BellaDesa Kalukuang Galesong Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
73	PT. Prima Global Sukses	Jl. Prof.Dr.Ir.SutamiNo.32A	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Fresh Tuna, Frozen Tuna Cephalopoda Beku

NO	NAMA UPI	ALAMAT	JENIS PRODUK
1	2	3	4
74	PT. Boddia Jaya	Jl.Karaeng Salamaka, Dusun Boddia, Kec. Galesong, Kab. Takalar	Dried Flying fish roe
75	UD. Generasi Baru	Jl. Andi Malla Poros pattiro Bajo. Kel. Biru kec. Tanete Riattang, Bone sulsel	Bandeng asap Bandeng duri lunak & tanpa duri
76	PT.Jireh Commodity	Jl. Kima Raya 2 Komplek Kima Square warehouse 2 No.11,12,13, Makassar	Dried Flying fish roe Frozen Flying fish roe Teripang Kering Teripang Beku
77	PT. Agarindo	Kab. Bone	Rumput Laut Kering
78	CV. Persada Semesta	Dusun Cikoang, Desa Lakatong, Kec. Mangarabombang, Takalar	Rumput Laut Kering
79	PT.Sinar Laut Nusantara	Jl.Kima 4.Kav.P-3B, Makassar	Ikan Demersal Segar Ikan Demersal beku Ikan Pelagis segar Ikan Pelagis Beku Udang segar Udang Beku Cephalopoda segar Cephalopoda Beku Udang Kipas Segar Udang Ikan Beku Tuna Segar Tuna Beku
80	Cv. Indah sari	Jl. Dg. Tata IV. Griya Tata Asri Blok E 13 A Takalar	Dried Flying fish roe

Sumber : Kasie Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan

Lampiran 18. Data Unit Pengolahan Ikan yang Memperoleh Sertifikat HACCP Tahun 2015

No	Nama UPI	Jenis HACCP	Grade
1	PT. Multi Monodon Indonesia	Frozen Raw Shrimp, Frozen Cooked Shrimp, Frozen Cephalopod, Frozen Tuna, Frozen Demersal Fish, Frozen Fresh Water Fish, Dried Flying Fish Roe	A
2	PT. Chen Woo Fishery	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish	A
3	PT. Prima Indo Tuna	Fresh Tuna, Fresh Demersal Fish, Frozen Tuna, Frozen Demersal Fish, Frozen Fresh Water Fish	A
4	PT. Wahyu Pradana Binamulia	Frozen Shrimp, Frozen Cephalopod, Frozen Demersal Fish, Frozen Flying Fish Roe, Dried Flying Fish Roe	A
5	PT. Multisari Makassar	Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod, Fresh Shrimp, Frozen Demersal Fish, Frozen Cephalopod, Frozen Shrimp, Frozen Tuna, Fresh Tuna, Frozen pelagic Fish	A
6	PT. South Suco	Frozen Shrimp	A
7	PT. Nuansa Cipta Magello	Pasteurized Canned Crab Meat	A
8	PT. Parlevliet Paraba Seafood	Frozen Tuna, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Fresh Tuna, Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod, Fresh Demersal Fish with CO, Fresh Tuna with CO Treatmean, Fresh Pelagic Fish With CO, Frozen Demersal Fish With CO, Frozen Tuna With CO Treatmean, Frozen Pelagic Fish With CO, Fresh Shrimp, Frozen Shrimp	A
9	PT. Mitra Kartika Sejati	Frozen Raw Shrimp, Frozen Cooked Shrimp	A
10	PT. Ocean Champ Seafood	Pasteurized Crab Meat	A
11	PT. Prima Bahari Inti Lestari	Fresh Demersal Fish, Fresh Tuna, Fresh Cephalopod, Frozen Demersal Fish, Frozen Tuna, Frozen Cephalopod, Fresh Milk Fish, Fresh Shrimp, Frozen Milk Fish, Frozen Shrimp	A
12	PT. Bogatama Marinusa	Frozen Shrimp, Frozen Breaded Shrimp, Frozen Cooked Shrimp	A
13	PT. Kemilau Bintang Timur	Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Pasteurized Crab Meat, Frozen Octopus, Frozen Aquaculture Fish, Pasteurized Crab Meat, Fresh Aquaculture Fish	A
14	PT. Kelola Mina Laut	Frozen Cephalopod, Frozen Demersal Fish, Frozen Tuna	A
15	PT. Omereso Foods	Hanakatsuobushi	A
16	CV. ome Trading Coy	Katsuobushi	A
17	PT. Inti Makmur	Fresh Shrimp, Frozen Tuna, Frozen Demersal Fish, Frozen Cephalopod, Frozen Shrimp, Fresh Tuna, Fresh Demersal Fish	A
18	PT. Four Bright Star	Frozen Shrimp	A
19	PT. Philipis Seafood Indonesia	Chilled Pasteurized Crab Meat, Frozen Pasteurized Crab Meat, Frozen Demersal Fish, Frozen Tuna, Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Fresh Cephalopod	A
20	PT. Donglim Jireh	Dried Flying Fish Roe, Dried Sea Cucumber	A

No	Nama UPI	Jenis HACCP	Grade
21	PT. Usaha Central Jaya Sakti	Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Fresh Tuna, Fresh Cephalopod, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Tuna, Frozen Cephalopod, Frozen Sliper Lobster, Frozen Milk Fish, Dried Flying Fish Roe, Fresh Shrimp, Frozen Shrimp	B
22	CV. Atops	Dried Flying Fish Roe, Frozen Flying Fish Roe	B
23	PT. Sinar Graha	Fresh Demersal Fish, Fresh Sliper Lobster, Frozen Demersal Fish, Frozen Sliper Lobster	B
24	PT. Dunia Marine Product	Frozen Shrimp, Frozen Cephalopod, Dried Flying	B
25	CV. Resky Bahari	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish, Frozen Pelagic Fish, Frozen Cephalopod	B
26	UD. Anugerah Bintang Cemerlang	Fresh Tuna, Frozen Tuna	B
27	CV. Makassar Jaya	Dried Bioled Sea Cucumber	B
28	PT. Shrimp Champion	Frozen Tuna, Fresh Tuna	B
29	CV. Sumber Bahari Mandiri	Dried Sea Cucumber, Dried Shark Fin, Dried Abalone, Dried Fish Maw, Dried Flying Fish Roe, Dried Seaweed	B
30	PT. Kawaguti	Dried Flying Fish Roe, Frozen Flying Fish Roe	B
31	CV. Anugerah Sejati	Dried Flying Fish Roe	B
32	PT. Sinar Laut Nusantara	Fresh Tuna, Fresh Cephalopod, Fresh Sliper Lobster, Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish, Frozen Shrimp, Frozen Tuna, Frozen Cephalopod, Frozen Sliper Lobster, Frozen Pelagic Fish, Frozen Demersal Fish	B
33	PT. Sentosa Sumber Galesong	Dried Flying Fish Roe	B
34	PT. Tujuh Samudera Jaya	Frozen Flying Fish Roe	B
35	CV. Benur Rahma	Frozen Flying Fish Roe	B
36	UD. Baharu	Dried Seaweed	B
37	PT. Tobiko Utama	Dried Flying Fish Roe	B
38	PT. Biru Laut Nusantra	Frozen Tuna	B
39	CV. Sentosa Bimantara Laut	Dried Seaweed	B
40	PT. Mega Citra Karya	Dried Seaweed	B
41	UD. Centralindo Agar Utama	Dried Seaweed	B
42	PT. Koperasi Agroniaga	Dried Seaweed	B
43	PT. Mitra Timur Nusantara	Frozen Demersal, Frozen Pelagic	B
44	CV. Jaya Indah Cemerlang	Dried Sea Cucumber, Dried Abalone, Fresh Demersal Fish, Dried Shark Fin, Fresh Pelagic Fish, Dried Fish Maw	C
45	CV. Agro Mina Dewata	Fresh Demersal Fish, Fresh Pelagic Fish	B
46	CV. Hokky Seafood	Live Crab, Fresh Demersal, Fresh Pelagic Fish	B
47	CV. Indah Sari	Dried Flying Fish Roe	B
48	CV. Ariny	Dried Seaweed	

Sumber : UPTD Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan